CR28

MEDIA GROUP NEWS

Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
16 HALAMAN/20 HALAMAN EPAPER

MEDIA INDONESIA

REFERENSI BANGSA

Kasus Covid-19 di Indonesia
(Data per 9 Maret 2021)

- Positif: **1.392.945** (+6.389)
- Sembuh: **1.210.877** (+7.496)
- Meninggal: **37.757** (+210)

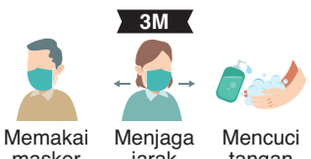

Sumber: Satgas Penanganan Covid-19

NO. 14447/ TAHUN KE-52 | RABU, 10 MARET 2021

EPAPER.MEDIAINDONESIA.COM

Media Indonesia | @mediaindonesia | Harian Umum Media Indonesia

"Pencabutan rencana revisi UU Pemilu, yang juga mencakup revisi UU Pilkada, mengusung kepentingan nasional yang lebih besar."

Editorial | Hlm 2

Militer Myanmar Beredel Lima Media

Enam jurnalis didakwa melanggar undang-undang ketertiban umum karena meliput kudeta.

Selekta | Hlm 2

Barca Mencari Keajaiban

Barcelona menyiapkan strategi menyerang sejak awal, tetapi tetap mewaspadai serangan balik yang menjadi keunggulan PSG.

Olahraga | Hlm 15

"Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya."

Yasonna H Laoly
Menteri Hukum dan HAM

Politik | Hlm 3

SENO

ANTARA/RONY MUHARRMAN

PEMADAMAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT: Prajurit TNI menyemprotkan air untuk memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, kemarin. Satgas Karhutla Riau terus berupaya mengatasi kebakaran lahan yang masih terjadi di Riau agar bencana kabut asap tidak terulang.

Pilkada Tetap 2024

Keinginan sebagian pihak agar Pilkada 2022 dan 2023 digelar di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis pun gagal terwujud.

PUTRA ANANDA
putra@mediaindonesia.com

PEMERINTAH dan DPR sepakat tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 akan digelar serentak pada 2024.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, PPP, dan PKB, menyetujui RUU Pemilu dicabut dari daftar Prolegnas Prioritas 2021. Hanya dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS, yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.

"Dengan demikian, selesailah pandangan minifraksi," ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.

"Merespons yang disampaikan ketua dan menyikapi surat Komisi II tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar prioritas tahun 2021, pemerintah sepakat," papar Yasonna.

Dengan kesepakatan tersebut, keinginan sebagian kalangan agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis gagal terwujud. Dengan begitu, ada 271 daerah yang akan diisi oleh penjabat menggantikan kepala daerah hasil pemilihan 2017 dan 2018.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan kriteria penjabat pengganti sambil menunggu Pilkada 2024. Usulan yang mengemuka ialah menunjuk sekretaris daerah sebagai penjabat mengisi jabatan gubenur, bupati, dan wali kota.

"Penunjukan sekda dirasakan lebih efisien. Tidak ada risiko yang besar karena kepala daerah yang sudah selesai tidak bisa memengaruhi (sekda) lagi," tutur Akmal.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah Putra menilai perlunya regulasi pendukung agar penjabat kepala daerah punya kewenangan kuat untuk melanjutkan pembangunan. "Upaya pemerintah menyerempakkan pilkada layak diapresiasi meski akan ada persoalan karena secara kewenangan, penjabat tentu berbeda dengan kepala daerah definitif," jelasnya.

Regulasi pendukung juga penting untuk menjamin agar penjabat kepala daerah tidak akan mencalonkan diri pada Pilkada 2024.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyayangkan pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, sementara RUU itu masih berada di prolegnas jangka panjang 2020-2024.

"Khawatirnya nanti RUU Pemilu baru dibahas di 2022 atau 2023 yang justru mepet ke 2024 sehingga tak akan efektif."

Modifikasi

Sementara itu, KPU akan segera membuat simulasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. "Kami sedang menyiapkan simulasi mengacu pada UU No 7/2017 dan UU No 10/2016 (UU Pilkada)," terang Plt Ketua KPU Ilham Saputra.

Anggota KPU Pramono Ubaid menjelaskan, karena tak ada RUU Pemilu, desain Pemilu 2024 akan serupa dengan Pemilu 2019 dengan 5 surat suara. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi, diperlukan pula berbagai modifikasi agar beban penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilanjutkan dengan pilkada di tahun yang sama tak terlalu berat. "Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif sebagaimana pada Pemilu 2019 lalu."

KPU sedang mematangkan konsep modifikasi tersebut. Beberapa opsi yang ada antara lain menghilangkan tahapan pencocokan dan penelitian dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap, pendaftaran parpol peserta pemilu sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik untuk rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. (Sru/Ind/Che/X-8)

MAFIA TANAH

Orang Dalam-Cukong Bobol Rp244 Miliar

"SAYA tahu dan paham siapa yang terlibat," kata Eko Djasa Bagiyo, mantan pegawai PT Pertamina (persero), kepada *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

Eko, yang kini dalam lindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena pernah menjadi *whistleblower* (pelapor pelanggaran) untuk kasus korupsi lahan Pertamina di Simprug, Jakarta Selatan, mengatakan kisruh lahan Pertamina di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, merupakan kongkalikong orang dalam dan cukong yang menanggung biaya operasional.

"Taksiran biaya operasional untuk lahan Jalan Pemuda itu Rp30 miliar guna membuat surat-surat tanah palsu hingga pengamanan persidangan sampai proses PK," kata Eko, yang kini menjadi pegiat Volunteer Anti Korupsi (VAK), LSM yang mengedukasi masyarakat untuk berani melaporkan korupsi.

"Kasus ini melibatkan jaringan cukup rapi. Ada pemodal atau cukong yang berani mengeluarkan modal karena hasilnya berlipat ganda. Lalu notaris, makelar kasus, aparat pemerintahan, mulai dari kelurahan, lembaga peradilan, penegak hukum, sampai orang dalam Pertamina," ujar Eko.

Eko, yang menjabat Asisten Manager Land Dispute Pertamina pada 2010-2018, mengatakan orang dalam yang terlibat antara lain mantan atasannya yang kini mendekam di penjara karena korupsi lahan Pertamina di Simprug. "Perannya melemahkan posisi Pertamina saat sengketa aset."

Eko dan atasannya itu merupakan pegawai Pertamina yang membereskan semua aset bermasalah. "Memang ada orang dalam lain yang terlibat. Kini, sebagian besar sudah pensiun."

Eko menyayangkan lambannya Pertamina saat rekening diblokir pada 2 Juni 2020. Sebaliknya lawan bergerak cepat sehingga pada 8 Juni 2020 uang Rp244,6 miliar dicairkan ke penggugat. "Gerakan lambat ini diduga mempermudah lawan mengeksekusi uang Pertamina."

Lalu yang bertindak sebagai cukong, Eko menyebut nama AR, pengusaha di Pasar Minggu. "Saya pernah bertemu AR dan mengaku membeli tiga dokumen tanah yang diduga bodong sebagai dasar gugatan yang akhirnya meraup Rp244 miliar itu. Tiga dokumen itu dibeli seharga Rp100 juta," katanya.

"Saya dengar sendiri AR menyatakan penggugat yang menang sebenarnya tidak punya surat apa pun sebagai bahan gugatan. AR pun menyebut akan mengusahakan semua dokumen itu dengan biaya darinya," lanjut Eko.

Eko mengatakan telah melaporkan kasus ini ke KPK. "Saya juga sudah mengajak orang-orang yang terlibat menjadi *justice collabolator* agar penjarahan aset negara ini terungkap." (Ars/X-3)

SELA

Vegan Buruk untuk Tulang

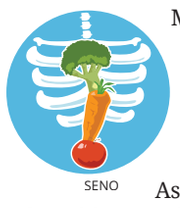

SENO

MENGIKUTI pola makan vegan, tanpa daging dan susu, dapat membuat tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko patah tulang. Demikian menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal *Nutrients* baru-baru ini.

Penelitian German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) itu membandingkan kesehatan tulang 36 vegan dan 36 nonvegan melalui USG. Hasilnya, vegan cenderung memiliki kesehatan tulang lebih buruk karena kekurangan nutrisi utama yang biasanya diperoleh dari produk hewani. Bukti ilmiah, kata Presiden BfR Andreas Hensel, menunjukkan pola makan vegan atau vegetarian memang dapat melindungi dari banyak penyakit kronis, misalnya diabetes, penyakit kardiovaskular, atau kanker. Namun, pola makan seperti itu berisiko untuk tulang. (Daily Mail/Nur/X-8)

TIDAK TERBIT

BERKENAAN dengan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1442 H dan merupakan hari libur nasional, *Media Indonesia* tidak terbit pada Kamis, 11 Maret 2021. *Media Indonesia* kembali terbit pada Jumat, 12 Maret 2021. Relasi dan pembaca harap maklum.

Pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan berita dengan mengakses *mediaindonesia.com* dan *medcom.id*.

PENERBIT

Satu Tahun Pandemi Covid-19

Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang sejak Juli aktif menggalang kerja sama internasional bagi pengembangan vaksin covid-19.

Opini | Hlm 7

EDITORIAL

Pemilu 2024 Menanti Kepastian

SENO

BADAN legislasi DPR RI dan pemerintah untuk kedua kalinya dalam tahun ini menyepakati daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Seperti pada Januari lalu, prolegnas yang disepakati mencakup 33 RUU. Bedanya, pada kesepakatan kali ini, RUU Pemilu ditarik dari daftar dan diganti RUU Ketentuan Umum Perpajakan.

Kesepakatan itu masih harus mendapatkan pengesahan di Rapat Paripurna DPR RI. Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU Pemilu dicoret dari usulan Prolegnas sangat mungkin melontarkan penolakan atas daftar rencana pembahasan RUU tersebut pada Rapat Paripurna.

Keberatan kedua partai utamanya pada tertundanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang habis masa jabatan mereka dalam kurun waktu 2022-2023. Ada kekosongan kepemimpinan di daerah selama masa itu yang berpotensi membuat pembangunan daerah mandek.

Kemudian, pelaksanaan pilkada pada 2024, tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan legislatif, memberikan beban luar biasa besar pada penyelenggaraan. Hal itu berkaca pada Pemilu serentak 2019 yang tanpa pilkada saja sudah menimbulkan kelelahan petugas pemilu hingga merenggut korban jiwa.

Akan tetapi, bila ditelaah lebih jauh, pencabutan rencana revisi UU Pemilu yang juga mencakup revisi UU Pilkada, mengusung kepentingan nasional yang lebih besar. Bukan sekadar gontok-gontokan memperebutkan kekuasaan. Pun ada wibawa pembentukan undang-undang yang dipertaruhkan.

Tahun depan, pandemi covid-19 diperkirakan belum berakhir. Betul, pemerintah menargetkan vaksinasi tuntas pada triwulan ketiga 2022. Namun, pencapaian target memerlukan usaha keras dan kerja bareng.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memusatkan pikiran, tenaga, anggaran, dan kebijakan secara umum pada penanganan wabah covid-19 serta penuntasan vaksinasi. Hiruk-pikuk penyelenggaraan pilkada akan mengganggu konsentrasi, bahkan bisa menghambat penanggulangan pandemi.

Apalagi, ada pilkada DKI Jakarta yang pada 2017 berlangsung begitu panas. Tidak ada jaminan hal serupa tidak terulang kembali. Cekcok di tengah masyarakat hingga elite akan menimbulkan berbagai persoalan yang kontraproduktif terhadap upaya menyudahi pandemi covid-19.

Hal lain yang perlu dicermati ialah amanat undang-undang yang menyerentakkan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah di 2024 belum dilaksanakan. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan produk legislasi nasional yang tidak sembarangan disusun.

Seyogianya, beri kesempatan aturan terlaksana demi kewibawaan undang-undang itu sendiri. Toh, kedua undang-undang itu disetujui oleh seluruh fraksi, termasuk Demokrat dan PKS.

Saat ini ada jeda waktu sekitar tiga tahun untuk mematangkan persiapan Pemilu serentak 2024. Semakin matang persiapan, maka musibah kelelahan petugas pemilu bisa terhindarkan.

Demikian pula perihal kekhawatiran kekosongan kepemimpinan di daerah. UU Pilkada telah mengatur jabatan kepala daerah yang sudah berakhir diisi penjabat gubernur/bupati sampai kepala daerah baru dilantik.

Tentu ada keterbatasan kewenangan bagi penjabat kepala daerah. DPR dan pemerintah dapat membahas lebih lanjut perlu atau tidaknya kewenangan tersebut diperluas agar kemajuan daerah tidak terhambat.

Rapat Paripurna DPR harus segera memutuskan nasib UU Pemilu dengan mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021 tanpa RUU Pemilu di dalamnya. Dengan begitu, semua pemangku kepentingan bisa segera beranjak menyiapkan Pemilu serentak 2024.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediaindonesia.com dan
www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di:
www.mediaindonesia.com/editorials

AFP/MYITKYINA NEWS JOURNAL

MEMOHON POLISI TIDAK MENYAKITI DEMONSTRAN: Seorang biarawati berlutut memohon kepada aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif kepada pengunjuk rasa yang menolak kudeta di Myitkyina, Myanmar, Senin (8/3). Dia memohon agar polisi memaafkan mereka yang melakukan aksi protes dan mengambil nyawanya sebagai ganti.

Militer Myanmar Beredel Lima Media Independen

Enam jurnalis, termasuk jurnalis foto Associated Press Thein Zaw, didakwa melanggar undang-undang ketertiban umum karena meliput kudeta.

ATIKAH ISHMAH WINAHYU
atikah@mediaindonesia.com

JUNTA militer Myanmar terus menekan perlawanan sipil atas kudeta yang mereka lakukan. Dari perkembangan terbaru, militer Myanmar memberedel lima media independen, yaitu *Mizzima, Suara Demokratik Burma* (DVB), *Khit Thit Media, Myanmar Now,* dan *7Day News*.

Mereka mengatakan perusahaan media tersebut tidak lagi diizinkan untuk menyiarkan atau menulis atau memberikan informasi dengan menggunakan platform media apa pun atau menggunakan teknologi media apa pun.

Media independen itu telah melaporkan secara ekstensif tentang protes atas kudeta selama beberapa pekan terakhir, serta aksi brutal pasukan keamanan.

Di laman *Facebook*-nya Senin (8/3), Redaktur Utama *Mizzima*, Soe Myint, mengecam aksi itu. Dia mengatakan *Mizzima* akan terus berjuang melawan kudeta militer dan memulihkan demokrasi dengan memublikasikan dan menyiarkan berita lewat berbagai platform, termasuk *Facebook*.

Pada Senin (8/3) malam, sebelum junta mengumumkan akan melarang beberapa perusahaan media itu, tentara dan polisi menggerebek markas *Myanmar Now*. Pihak keamanan menyita komputer, bagian dari server data dan peralatan lainnya.

Hampir 1.800 orang telah ditahan selama tindakan keras militer, termasuk puluhan jurnalis. Dalam satu video yang dibagikan minggu lalu, Kaung Myat Hlaing, seorang jurnalis yang bekerja untuk *DVB* di kota selatan Myeik, merekam dari balkonnya ketika pasukan keamanan mengepung apartemennya, berteriak agar dia turun.

Suara seperti tembakan dapat terdengar dari video tersebut. Dia berteriak dan meminta tetangganya untuk membantunya. *DVB* kemudian mengonfirmasi bahwa dia telah ditahan.

Enam jurnalis, termasuk jurnalis foto *Associated Press* Thein Zaw, didakwa melanggar undang-undang ketertiban umum karena meliput kudeta. Mereka bisa dipenjara hingga tiga tahun.

DVB mengatakan tidak terkejut dengan pembatalan lisensinya dan menambahkan bahwa mereka akan terus mengudara di TV satelit dan *online*.

"Kami mengkhawatirkan keselamatan reporter dan staf kami, tetapi dalam pemberontakan saat ini, seluruh negara telah menjadi jurnalis warga dan tidak ada cara bagi otoritas militer untuk menutup arus informasi," kata Direktur Eksekutif *DVB* Aye Chan Naing.

Biarawati berlutut

Seorang biarawati Katolik kembali berlutut di hadapan petugas bersenjata di Myanmar, Senin (8/3).

Dia memohon agar polisi memaafkan anak-anak yang melakukan aksi protes dan mengambil nyawanya sebagai ganti.

Tindakan berani suster Ann Rose Nu Tawng terjadi di Kota Myitkyina di tengah aksi protes. Saat polisi mulai berkumpul di sekitar demonstran, Suster Ann Rose dan dua biarawati lainnya memohon agar mereka pergi.

"Polisi mengejar untuk menangkap mereka dan saya mengkhawatirkan anak-anak," kata Suster Ann Rose.

> Hampir 1.800 orang telah ditahan selama tindakan keras militer, termasuk puluhan jurnalis.

Pada saat itulah biarawati berusia 45 tahun itu berlutut. Namun, beberapa saat kemudian, saat dia memohon untuk menahan diri, polisi mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa di belakangnya.

Sebelumnya pada 28 Februari 2021, biarawati berusia 45 tahun itu juga berlutut ke aparat demi melindungi demonstran beberapa saat sebelum mereka ditembaki. Biarawati itu menjadi perhatian setelah memohon sambil menangis agar polisi dan militer tak menembaki pengunjuk rasa. Insiden yang terjadi di Kota Myitkyina pada 28 Februari 2021 itu dijuluki sebagai 'Momen Tiananmen' di Myanmar. (AFP/The Guardian/Nur/X-10)

BERSATU LAWAN COVID-19

Badan POM Nyatakan Vaksin Astra Zeneca Aman Digunakan

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah melakukan uji klinis vaksin Astra Zeneca terhadap 23.745 subjek dengan laporan hasil yang aman dan dapat ditoleransi dengan baik.

''Badan POM sudah melakukan proses evaluasi untuk keamanan khasiat dan mutu vaksin, proses dilakukan bersama tim ahli, dan berbagai klinis terkait,'' kata Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito dalam keterangan virtual, kemarin.

Penny mengatakan hasil evaluasi keamanan berdasarkan data uji klinis secara keseluruhan, pemberian vaksin dua dosis dengan interval 4-12 minggu pada total 23.745 subjek, dinyatakan aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian efek samping yang dilaporkan dalam studi klinis umumnya sedang dan ringan.

Penny menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap khasiat, vaksin tersebut dapat merangsang pembentukan antibodi yang baik pada populasi dewasa ataupun lansia dengan rata-rata peningkatan antibodi Imunoglobulin M (IgM) berkisar 32 kali setelah dosis kedua usia 18-60 tahun serta 21 kali pada kelompok lansia di atas 65 tahun.

Penny menjelaskan Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau *emergency use authorization* (EUA) vaksin Astra Zeneca pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 2158100143A1.

"Sebagaimana vaksin covid-19 yang telah memperoleh EUA, sebelum produk siap untuk digunakan, Badan POM melakukan proses pelulusan produk (*lot release*). Setelah diberikan pelulusan produk, vaksin tersebut siap untuk digunakan dalam program vaksinasi," ujarnya.

Vaksin Astra Zeneca merupakan vaksin covid-19 yang ketiga mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan POM. Vaksin CoronaVac produksi Sinovac ialah vaksin pertama yang mendapatkan EUA pada 11 Januari 2021 disusul dengan vaksin covid-19 produksi PT Bio Farma pada 16 Februari 2021.

Vaksin Astra Zeneca dikembangkan oleh Oxford University bekerja sama dengan Astra Zeneca menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (ChAdOx 1).

"Vaksin Astra Zeneca didaftarkan ke Badan POM melalui 2 jalur, yaitu jalur bilateral oleh PT Astra Zeneca Indonesia dan jalur multilateral melalui mekanisme COVAX Facility yang didaftarkan oleh PT Bio Farma," kata Penny. (Fer/X-10)

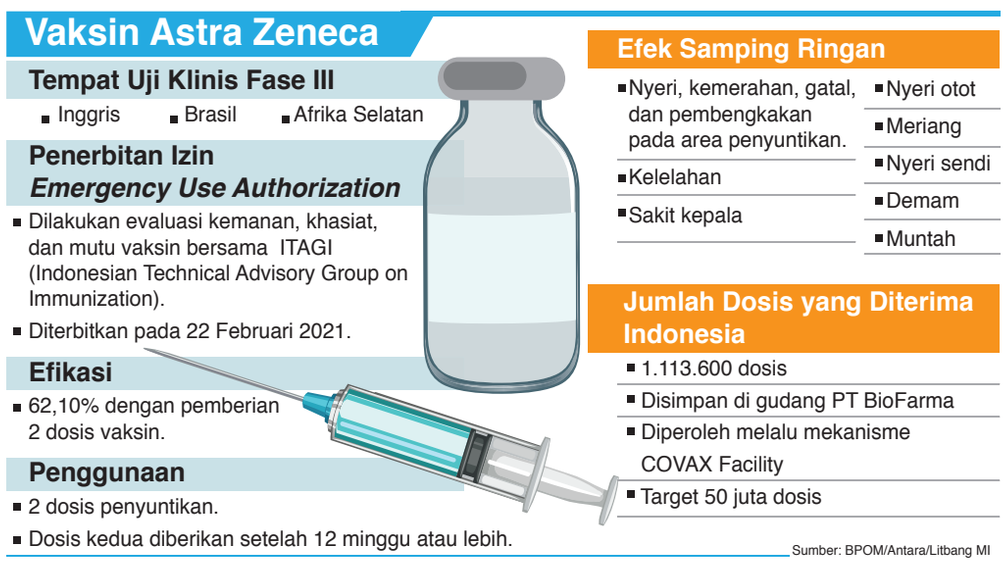

Rasa Aman Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

DARI sisi perekonomian, menghadirkan perasaan aman di masyarakat menjadi kunci penting menghadapi pandemi covid-19. Tanpa perasaan aman tersebut berbagai dukungan pemerintah akan berdampak minim.

"Selama setahun, semua kebijakan sudah digulirkan, tetapi pada akhirnya kunci utamanya bagaimana membangun rasa aman. Membangun rasa aman di masyarakat agar pelaku ekonomi mau beraktivitas," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Penandatanganan MoU Peta Okupasi Logistik dan *Supply Chain* di Jakarta, kemarin.

Menurut Susiwijono, pandemi mengajarkan banyak hal bagi pengambil kebijakan, terutama cara merespons situasi yang tidak terduga. Pandemi juga memaksa adanya perubahan pola kebiasaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

"Tanpa ada rasa aman itu, kita kasih insentif dalam bentuk apa pun akan sulit membangun perekonomian meski saat ini ada tren perbaikan," lanjut Susiwijono.

Hanya dengan cara itu pandemi dapat dikendalikan dan perekonomian tumbuh sesuai target. Pada triwulan I 2021, ekonomi nasional diharapkan tumbuh di zona positif dan secara menyeluruh pertumbuhan ditargetkan berkisar 4,5%-5,3%.

"Memang cukup ambisius, tetapi kita optimistis karena banyak indikator makro menggambarkan ada pemulihan ekonomi," tandas Susiwijono.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengemukakan banyak hal dapat dipelajari selama setahun pandemi melanda Indonesia. Hal itu kemudian direspons dengan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan situasi di Tanah Air.

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengungkapkan penyesuaian kebijakan selama pandemi untuk menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan ekonomi.

"Banyak hal dipelajari dan ini menyeimbangkan antara gas dan rem. Itu *ngerem* pandemi dan *ngegas* untuk ekonomi. Inilah yang dipelajari dan dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dinamika," ungkap Airlangga dalam Rakornas Penanganan Bencana 2021. (Mir/Van/X-3)

Prolegnas Tahun ini Minus RUU ITE

Tim pemerintah masih melakukan kajian tentang perlu atau tidaknya UU ITE direvisi dengan tenggat penyampaian hasil kajian 22 Mei 2021.

Putra Ananda
ananda@mediaindonesia.com

PEMERINTAH dan DPR RI menyepakati 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tengah dikaji pemerintah tidak akan dibahas parlemen tahun ini karena tidak masuk prolegnas.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkum & HAM) Yasonna Laoly di kompleks parlemen Senayan, kemarin.

"Dengan demikian, selesailah pandangan minifraksi dan saya rasa tidak perlu kita ambil pengambilan keputusan karena sudah mewakili, saya yakin apa pun yang menjadi kita setuju atau tidak, nanti akan ini kan baru tahap perencanaan," papar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menuturkan alasan mengapa DPR dan pemerintah belum memasukkan RUU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Menurut Willy, kajian revisi UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE belum selesai dilakukan pemerintah.

"UU ITE belum masuk, karena masih oleh pemerintah," kata Willy.

Menurut Willy, untuk sementara penanganan laporan-laporan kriminalisasi UU ITE akan mengacu kepada Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Listyo Sigit. SE tersebut dinilai cukup efektif sebagai acuan dalam penanganan laporan pelanggaran UU ITE yang masuk ke kepolisian.

"Tinggal bagaimana diskresi-diskresi yang ada di polisi itu benar-benar berjalan," ujarnya.

Willy berharap dengan mengacu pada SE Kapolri, kepolisian mampu mengedepankan unsur dialogis dalam penanganan fenomena saling lapor pelanggaran UU ITE. Dengan begitu diharapkan tren saling lapor antarmasyarakat dengan tameng UU ITE bisa cenderung menurun.

Himpun masukan

Tim kajian UU ITE terus mengumpulkan data dan masukan dari berbagai pihak. Jika minggu lalu tim menghadirkan narasumber yang pernah bersinggungan langsung dengan UU ITE, kemarin tim meminta masukan dari kalangan aktivis dan paraktisi media sosial.

Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo mengatakan mereka yang terkonfirmasi hadir melalui saluran virtual antara lain Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto, Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, dan sejumlah pegiat media sosial seperti Deddy Corbuzier dan Ferdinand Hutahean.

Sugeng mengatakan dari pertemuan dengan para terlapor dan pelapor sebelumnya ada banyak masukan. Salah satunya, menekankan pentingnya edukasi terhadap pengguna ruang digital.

"Mudah-mudahan nantinya setelah para pihak ini dimintai keterangan, kita sudah semakin jelas, sebenarnya tim kajian undang-undang ITE ini khususnya yang menjadi tugas dari sub dua itu perlu atau tidak dilakukan revisi," tegas Sugeng.

Sesuai dengan keputusan Menko Polhukam No 22 Tahun 2021 pada Februari lalu, Tim Kajian UU ITE bekerja selama dua bulan. Tim dijadwalkan akan menyerahkan seluruh laporan pada 22 Mei mendatang. (Cah/P-2)

MI/ADAM DWI

SAH SESUAI AD/ART: Salah satu inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Darmizal (kanan) bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat Razman Nasution saat memberikan konferensi pers di Jakarta, kemarin. Partai Demokrat versi KLB menyatakan bahwa KLB yang mereka adakan sah dan sesuai dengan AD/ART partai.

Pemerintah Profesional Sikapi Demokrat

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuding pemerintah terkait dengan persoalan internal partai tersebut.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya," kata Yasonna seusai menghadiri Rapat Kerja (Raker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, kemarin.

Yasonna menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pun telah menerima AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat yang datang menyerahkan dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) pada Senin (8/3).

Putra sulung Presiden ke-6 SBY itu juga menyampaikan surat keberatan dan menyatakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang adalah ilegal. "Dari sisi Kemenkum dan HAM, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat," tutur Yasonna.

Bila kelompok yang mengadakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang menyerahkan dokumen, pemerintah pun akan menerima. Menurut Yasonna, pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggagas KLB Demokrat Hengky Luntungan mengatakan pihaknya akan segera mendatangi Kemenkum dan HAM untuk mendaftarkan Partai Demokrat hasil keputusan KLB. Dalam KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didapuk menjadi ketua umum Demokrat.

"Tentu saja dan pasti kami datang ke sana untuk mendaftarkan dan bertarung habis-habisan karena dari hasil KLB itu sah," ujarnya Hengky saat dihubungi, kemarin.

Sementara itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution pihaknya memiliki tim yang telah mendaftar ke pemerintah. "Tadi informasinya sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya. (Ant/Sru/P-2)

Tekan Karhutla, Gubernur Sumsel Tetapkan Status Siaga Lebih Dini

KEBERHASILAN Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun lalu menjadi patokan di tahun ini. Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru bahkan sudah mengeluarkan surat keputusan untuk penetapan status siaga tanggap darurat bencana karhutla pada 1 Maret 2021.

Status ini dikeluarkan lebih dini agar semua pihak terlibat dapat mengantisipasi bencana karhutla tersebut. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua forum komunikasi pemimpin daerah (Forkopimda) di Sumsel, seperti TNI dan kepolisian untuk bekerja secara maksimal dalam menekan karhutla di tahun ini.

Segala upaya dilakukan dalam pencegahan karhutla secara permanen, utamanya di daerah yang dinilai rawan karhutla.

"Kita sudah tetapkan status siaga tanggap darurat karhutla, mulai berlaku 1 Maret hingga musim hujan tiba nantinya. Pencegahan karhutla jadi fokus bersama. Apalagi kita memiliki pengalaman untuk mengatasi terjadinya karhutla tersebut. Terbukti di tahun 2020 kemarin, Sumsel tercatat sebagai daerah relatif bebas asap meskipun ada beberapa titik hot spot saja," kata Gubernur usai Apel Kebakaran Hutan dan Lahan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 2021 di Kebun Raya Sriwijaya, Ogan Ilir, kemarin.

Upaya lainnya yang telah dilakukan di antaranya mengalokasikan dana khusus pencegahan karhutla, di mana pada 2020 lalu sebesar Rp45 miliar digelontorkan bagi 10 kabupaten yang rawan. Sedangkan di tahun ini, Pemprov Sumsel menganggarkan Rp30 miliar untuk pencegahan karhutla.

"Tahun ini kita anggaran Rp30 miliar. Dana tersebut diperuntukkan membuat sekat kanal, sumur bor, dan peralatan lainnya di daerah yang rawan karhutla," tuturnya.

Deru mengakui, selain upaya masif seperti sosialisasi serta penyebarluasan maklumat larangan membakar lahan, aktivasi posko pencegahan hingga patroli rutin, faktor cuaca juga menjadi penentu Sumsel bebas asap di tahun sebelumnya.

Upaya kesiapsiagaan ini sebagai upaya mencegah agar tidak timbul kebakaran meluas yang membuat sulitnya pemadaman di lapangan. Untuk itu, semua pihak terkait baik TNI, Polri, dan pemerintah daerah di wilayah yang rawan bencana karhutla harus bersatu padu dalam mengantisipasi timbulnya karhutla di Sumsel.

"Kita tidak ingin menyalahkan siapa pun, karhutla harus dicegah agar tidak timbul kerusakan lingkungan yang lebih besar," ucapnya.

Deru menjelaskan, dengan adanya apel kesiapsiagaan bencana karhutla ini maka dapat diharapkan personil dan peralatan sudah memadai. Apalagi dalam pencegahan karhutla ini harus ditekan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Selain itu juga perlu adanya peranan masyarakat Sumsel, dunia usaha, akademisi, dan media untuk melakukan gerakan pencegahan karhutla.

Nantinya, kata Deru, juga akan ada peluncuran aplikasi pencegahan karhutla bekerja sama dengan Forkopimda di wilayah Sumsel. "Karhutla ini seakan menjadi penyakit menahun, setiap tahun terjadi. Dan alhamdulillah kasus karhutla selalu menurun berkat kerja sama yang baik antarpihak, dan edukasi kepada pemilik lahan atau petani yang sudah berangsur menyadarinya. Pihak perusahaan juga sudah menjaga lahannya agar tidak terbakar," ungkapnya.

Embung konservasi

Bukan hanya itu, Pemprov Sumsel juga meresmikan embung konservasi yang berlokasi di Kebun Raya Sriwijaya. Embung ini dibangun oleh Pemprov Sumsel bekerja sama dengan Kementerian PU-Pera melalui BBWS wilayah Sumsel yang diperuntukkan dalam menangani karhutla.

"PU membangun embung yang tidak hanya untuk stok air untuk pembasahan lahan tapi dalam situasi darurat helikopter waterbombing dapat memanfaatkannya. Tapi dalam keseharian bisa untuk budidaya ikan dan destinasi wisata," jelasnya.

Diakuinya, dalam luasan tertentu, lahan gambut membutuhkan stok air karena permukaan air harus terjaga dan tidak boleh kering lebih dari 30 sentimeter sebab lahan gambut harus dalam posisi lembap agar jika terjadi karhutla tidak menjalar.

"Sumsel terkenal dengan kubah gambut yang kedalamannya bisa mencapai 28 meter, sehingga harus dijaga agar tidak terjadi kebakaran lahan. Untuk itulah perlu adanya upaya maksimal pencegahan dan penanganan cepat serta maksimal atas karhutla di Sumsel," pungkasnya. (DW/S2-25)

Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau personil dalam apel kebakaran hutan dan lahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tahun 2021 di Kebun Raya Sriwijaya, Ogan Ilir, Selasa (9/3).

Herman Deru menjadi pemimpin apel kebakaran hutan dan lahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tahun 2021 di Kebun Raya Sriwijaya, Ogan Ilir, Selasa (9/3).

Herman Deru memastikan peralatan yang akan digunakan dalam pemadaman karhutla milik perusahaan di wilayah Sumsel.

Gubernur Sumsel meresmikan embung konservasi di Kebun Raya Sriwijaya.

FOTO-FOTO: HUMAS SUMSEL

Herman Deru menebar benih ikan di embung konservasi Kebun Raya Sriwijaya.

Mahfud Tantang TP3 Buktikan Pelanggaran HAM

Hari ini kepolisian akan melakukan gelar perkara terkait dengan dugaan unlawful killing terhadap enam anggota FPI oleh polisi.

Andhika Prasetyo
andhika@mediaindonesia.com

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD tantang Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam anggota Front Pembela Islam (FPI) untuk menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan kasus di Km 50 Tol Cikampek ialah pelanggaran HAM berat.

"Temuan Komnas HAM, yang terjadi di Cikampek Km 50 adalah pelanggaran HAM biasa, tapi TP3 yakin enam laskar itu adalah korban pelanggaran HAM berat," ujar Mahfud saat menanggapi ketidakpercayaan tim bentukan Amien Rais itu atas hasil rekomendasi yang dirilis Komnas HAM, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menemui TP3 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Yang menjadi persoalan, lanjut dia, tim tersebut hanya berbekal keyakinan tanpa bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat.

"Kalau memang ada pelanggaran HAM berat, mana buktinya? Sampaikan sekarang. Kita minta bukti, bukan keyakinan. Kalau keyakinan, kita semua punya keyakinan masing-masing," jelas mantan Ketua MK itu.

Mahfud menjelaskan pelanggaran HAM bisa dikualifikasikan berat jika memenuhi tiga syarat, yakni terstruktur, sistematis, dan masif.

"Pelanggaran HAM berat itu dilakukan terstruktur, berjenjang. Taktiknya seperti ini, alat yang digunakan ini, kalau terjadi hal ini, langsung lari ke sini. Seperti itu. Kemudian sistematis. Artinya tahapannya jelas jelas. Yang terakhir masif, menimbulkan korban jiwa yang meluas. Kalau semua bukti itu ada, ya dibawa. Tunjukkan ke Komnas HAM. Kita adili secara terbuka," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah sejak awal sudah bersikap netral. Proses investigasi diserahkan sepenuhnya kepada Komnas HAM dan telah memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah.

"Presiden meminta Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya. Panggil siapa saja yang punya bukti. Pemerintah tidak pernah ikut campur. Semua proses itu dilakukan secara transparan, adil, dan bisa dinilai publik," tandasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menerima kedatangan tujuh anggota TP3 enam anggota FPI, yang dipimpin Amien Rais. Dalam pertemuan itu, ungkap Mahfud, anggota TP3 menyampaikan satu hal pokok tentang tewasnya enam laskar FPI yang diurai dalam dua hal.

"Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, ancamannya negara dihadap neraka jahanam," ujar Mahfud.

Gelar perkara

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan pihaknya akan gelar perkara terkait dengan dugaan *unlawful killing* (pembunuhan di luar hukum) dalam kasus penembakan terhadap enam anggota FPI oleh polisi.

"Rencananya pada Rabu, 10 Maret," ujar Argo saat dikonfirmasi, kemarin.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki bukti-bukti permulaan.

"Sudah dapat bukti permulaan. Tinggal menyusun, melengkapi. Minggu depan akan gelar untuk naik sidik (penyidikan)," ucap Andi, Jumat (5/3).

Seperti diketahui, apabila kasus itu telah naik sidik, diduga terjadi pelanggaran pidana dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Penyidik juga mendalami dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap empat anggota FPI di dalam mobil oleh tiga polisi dari Polda Metro Jaya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam peristiwa itu, diketahui empat anggota FPI masih hidup sebelum polisi membawa mereka ke mobil. Sebelumnya, dua laskar yang lain telah meninggal saat bentrok hingga baku tembak dengan polisi. (Ykb/Ant/P-5)

SETPRES/MUCHLIS JR

DIPROSES DENGAN ADIL: Presiden Joko Widodo saling memberi salam dengan Amien Rais (kanan) bersama rombongan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. TP3 yang dipimpin Abdullah Hehamahua meminta Presiden Jokowi agar kasus tersebut diproses dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum.

NasDem Perjuangkan Pengesahan 4 RUU

FRAKSI Partai NasDem berhasil memasukkan empat rancangan undang-undang (RUU) strategis ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Keempat RUU yang dapat diperjuangkan NasDem tersebut ialah RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), RUU Pendidikan Kedokteran, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"Ini tentu menjadi peraturan perundangan yang dibutuhkan rakyat yang marginal," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) Baleg dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, sebanyak 33 RUU diputuskan masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Jumlahnya masih sama dengan hasil rapat awal di Januari lalu, yakni 33 RUU," tutur Willy.

Dalam raker itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk menarik RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021. Pembahasan RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2021 diganti dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang sama-sama diusulkan pemerintah.

"RUU Pemilu ditarik, diganti dengan RUU KUP. Jadi, jumlah RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021 tetap 33," ungkapnya.

Sementara itu, desakan mengesahkan RUU PKS semakin kuat disuarakan setelah RUU itu masuk prolegnas. Kehadiran RUU itu, kata pakar hukum Universitas Gadjah Mada Sri Wiyanti Eddyono, penting. Pasalnya, perlindungan dan pelayanan korban diserahkan kepada kebaikan hati dan situasi politik pemerintah daerah.

Dalam diskusi daring bertajuk Bergerak Bersama Mewujudkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, kemarin, Sri merinci kekosongan perlindungan hukum terdiri dari masih terbatas atau belum diaturnya bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan.

Dia juga menambahkan, RUU PKS penting untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan diskriminatif, perempuan disabilitas, anak, perempuan hamil, dan sebagainya, selain memberi kerangka pencegahan terhadap penghapusan kekerasan seksual.

Anggota Komisi IV DPR Lulu Nurhamida menjelaskan RUU ialah produk politik yang bisa menjadi representasi kelompok tertentu.

"Mereka punya kepentingan yang mungkin saja merepresentasikan dari kelompok tertentu. Kalau RUU ini ditarik terlalu politis dan sifatnya pragmatis dan elektoral, mungkin ini tidak jadi," ujar Lulu. (Uta/Sru/P-5)

DOK PEMBERITAAN DPR

PRIORITAS: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kedua dari kiri) bersama Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan Ketua PPUU DPD Badikenita Br Sitepu (kanan), dengan disaksikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi NasDem Willy Aditya (kiri), menandatangani naskah seusai rapat pengambilan keputusan penyempurnaan Prolegnas Prioritas 2021, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

ASN Dilarang Keluar Kota saat Liburan Nasional

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-Rebiro) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran No 6/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Isra Mikraj Nabi Muhammad dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada surat yang ditandatangani Senin (8/3) itu, ASN dan keluarga diminta tidak bepergian ke luar kota selama 10-14 Maret 2021.

'Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19 yang berpotensi meningkat karena perjalanan orang selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, serta menindaklanjuti Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8-22/KA SATGAS/PD 01 02/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad', demikian bunyi surat edaran itu.

Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah, tulis surat edaran Menpan-Rebiro, dikecualikan bagi pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dengan terlebih dahulu memperoleh izin yang ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi atau kepala kantor satuan kerja. Selain itu, pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya.

> Apabila aturan larangan bepergian itu dilakukan dan dipatuhi, angka kenaikan kasus covid-19 dapat ditekan.

Senada, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta ASN tidak bepergian, apalagi pemerintah telah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPMK) mikro tahap 3 terhitung mulai Selasa (9/3) hingga Minggu (21/3).

"Kita harus akui, setiap libur panjang mulai Lebaran/Idul Fitri tahun lalu selalu diikuti dengan peningkatan kasus harian dan juga kasus aktif, termasuk pada akhir tahun yang lalu, yaitu libur Natal dan liburan Tahun Baru 2021," jelas Doni di Jakarta, kemarin.

Bagi swasta, Doni telah berkoordinasi dengan Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk turut serta mengikuti menjalani aturan itu. Doni optimistis, apabila aturan larangan bepergian itu dilakukan dan dipatuhi, angka kenaikan kasus covid-19 dapat ditekan.

"Kami berharap pada pimpinan instansi terutama TNI-Polri dan Kementerian Dalam Negeri serta BUMN bisa betul-betul mengawasi anggota dan karyawan masing-masing," tegas Doni. (Ind/Ata/P-5)

MI/ADAM DWI

PEMERIKSAAN HENGKY THIONO: Tersangka Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Hengky diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka dalam perkara kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, tahun anggaran 2020.

Keputusan Sengketa Sabu Raijua Diskresi MK

PARA pihak diminta menahan diri selama proses sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Peneliti untuk Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhamad Ichsan Maulana mengatakan saat ini pun persoalan dwikewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore dalam tahap penelitian di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, para pihak diminta menahan diri sampai adanya putusan yang dikeluarkan MK.

"MK harus ditempatkan sebagai lembaga yang dapat memutuskan problem pencalonan di Kabupaten Sabu Raijua. Lembaga terkait jangan dulu mengeluarkan keputusan yang dapat mengganggu proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK," ujar Ihsan di Jakarta, Senin (8/3) malam.

MK, imbuhnya, diharapkan juga meminta keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila perkara sengketa berlanjut hingga ke sidang pemeriksaan. Keterangan dari pihak terkait, terang Ihsan, akan menjadi dasar bagi MK memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan Kabupaten Sabu Raijua.

"Jangan sampai ada proses yang ganda untuk kepastian hukum dan keadilan pemilu yang lebih baik," ucapnya.

Perkara hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua teregistrasi dengan nomor 133-134/PHP.BUP-XIX/2021. Sidang pendahuluan telah digelar Senin (8/3).

> "Jangan sampai ada proses yang ganda untuk kepastian hukum dan keadilan pemilu yang lebih baik."
>
> **Muhamad Ichsan Maulana**
> Peneliti untuk Kode Inisiatif

Terdapat dua perkara yang diajukan ke MK, yakni perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Sabu Raijua dan perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua atau pemantau pemilihan.

Dalam sidang pendahuluan, kuasa hukum paslon nomor urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nikodemus N Rihi Heke-Yohanes Uly Kale, Adhitya Anugrah Nasutio, memohon MK membatalkan putusan KPU setempat tentang hasil Pilkada 2020. Dalam putusan itu, KPU memenangkan Orient Riwu Kore dan Tobias Uly sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua.

Kuasa hukum menyebut Orient yang juga terdaftar sebagai warga negara Amerika Serikat tidak memenuhi memenuhi syarat sebagai calon bupati. Pihak paslon nomor urut 1 selaku pemohon juga meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang. (Ind/P-2)

Cuaca Jakarta dan Sekitarnya

PAGI (00.05 - 12.00) SIANG (12.05 - 18.00) MALAM (18.05 - 24.00)

Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Kepulauan Seribu	Bogor	Tangerang	Bekasi	Depok
Hujan ringan	Hujan ringan	Hujan ringan	Hujan ringan	Hujan ringan	Berawan	Cerah berawn	Berawan	Cerah berawn	Cerah berawn
Cerah berawan	Cerah berawan	Berawan	Berawan	Cerah berawan	Berawan	Hujan ringan	Berawan	Hujan ringan	Hujan ringan
Berawan	Berawan	Berawan	Berawan	Berawan	Hujan ringan	Berawan	Berawan	Berawan	Berawan

LINTAS BERITA

Wali Kota Bekasi Diperiksa Terkait Sengketa Kantor DPD Golkar

DIREKTUR Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat membenarkan pihaknya telah memeriksa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Rahmat diperiksa sebagai saksi dan kedatangannya untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kasus sengketa tanah di Bekasi.

Meski demikian, Tubagus tak memerinci terkait dengan kasus sengketa tanah yang menyeret nama Rahmat Effendi. Tubagus mengatakan masih memeriksa guna memastikan status kasus tersebut. "Dia sebagai saksi. Kita baru klarifikasi saja," katanya, kemarin.

Tubagus menambahkan Rahmat diperiksa pada Senin (8/3) sore hingga malam. Mantan Ketua DPRD Kota Bekasi itu sedianya dipanggil pada Jumat (5/3), tetapi ia beralasan tidak bisa hadir karena ada kesibukan.

Kabar menyebut Rahmat akan diperiksa terkait dengan sengketa lahan DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Lahan itu sempat diiklankan di situs jual-beli daring untuk dijual atau disewakan. Selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat menjelaskan kantor itu sudah dibeli Andi Salim, setelah adanya pemekaran kepengurusan DPD Golkar Bekasi. (Faj/J-2)

Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ditarget Rampung 2 Tahun

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memastikan akan membebaskan lahan secepatnya agar program normalisasi sungai bisa berjalan lancar. Ditargetkan pembebasan lahan itu akan selesai dalam waktu dua tahun.

"Nanti kita akan teruskan pembangunan normalisasi di Jakarta, insya Allah kita kebut dalam dua tahun ke depan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemarin.

Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang mengerjakan konstruksi dari program normalisasi sungai. Dengan bantuan Kementerian PU-Pera, program normalisasi diharapkan segera terealisasi.

Dalam program normalisasi kali untuk pengendalian banjir, Pemprov DKI bertugas untuk membebaskan lahan milik warga ataupun menertibkan bangunan liar di bantaran kali serta merelokasi warga ke rumah susun.

Pembebasan lahan akan dilakukan melalui Dinas Sumber Daya Air dan relokasi dilakukan pemerintah kota setempat. Sementara itu, untuk pengerjaan fisiknya dilakukan Kementerian PU-Pera melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). (Put/Ssr/J-2)

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

PENGUNGKAPAN 144,5 TON GANJA: Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menunjukkan barang bukti ganja saat rilis pengungkapan kasus ganja di Kantor Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta, kemarin. Polisi mengungkap jaringan narkotika jenis ganja dengan mengamankan 144,5 ton yang terdiri atas 500 kilogram ganja siap edar dan 144 ton tanaman ganja dari ladang seluas 12 hektare di Mandailing Natal, Sumatra Utara, dan menetapkan sembilan tersangka.

DKI JAKARTA

Tersandung Korupsi, Program Jalan Terus

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan program pembangunan perumahan untuk rakyat yang dijanjikan Gubernur Anies Baswedan tetap jalan. Proyek rumah DP Rp0 itu dipastikan tidak terganggu dengan penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Riza mengatakan Yoory yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Direktur Pengembangan PD Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono kemudian ditunjuk sebagai plt dirut. "Insya Allah program dan lain-lain di BUMD tidak terganggu," kata Riza, kemarin.

Selain membangun rumah DP Rp0, PD Pembangunan Sarana Jaya juga diberi tugas membangun fasilitas pengolahan sampah terpadu atau *intermediate treatment facility* (ITF). Menurut Riza, di tubuh BUMD itu masih ada jajaran direksi lain yang siap menyambung tugas Yoory.

Pemprov DKI pun tetap memberikan kesempatan kepada KPK untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Mari kita hormati proses semua ini, penegakan hukum, siapa pun nanti kita akan lihat hasilnya," ujar dia.

Terkait dengan kasus tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan pihaknya akan memanggil jajaran direksi Sarana Jaya. Tujuan pertemuan yang direncanakan pekan depan itu untuk menggali informasi lebih banyak terkait dengan program DP Rp0 dan kasus korupsinya. "Karena kejadian ini terjadi pada masa dewan periode lalu," kata Abdul.

Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari mengatakan, dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya. Menurut dia, anggaran pengadaan tanah memang agak rawan karena nilainya sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tapi proses pengadaannya tidak terbuka dan transparan.

Geledah

Kemarin, KPK menggeledah tiga tempat terkait dengan penyidikan kasus pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta. Penggeledahan dilakukan di Kantor PT Adonara Propertindo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya di Jakarta Pusat, dan rumah pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu.

"Dari beberapa lokasi, ditemukan dan diamankan bukti, di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini. Selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk segera dilakukan penyitaan untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK juga menyatakan terus mengumpulkan bukti terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh BUMD DKI di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya Yoory. Namun, nama-nama tersangka belum diumumkan secara resmi. (Put/Hld/Dhk/J-2)

Promo bjb Bagi-Bagi Tanda Mata Meriahkan Hari Jadi Kota Bekasi

KOTA Bekasi akan merayakan hari jadinya yang ke-24 pada 10 Maret 2021 mendatang. Hari jadi Kota Patriot ini diperingati dengan mengangkat tema 'Kesejahteraan Masyarakat Dapat Diwujudkan Sejalan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif'.

Bank bjb sebagai mitra setia Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi turut serta memeriahkan peringatan hari jadi Kota Bekasi ini dengan memberikan diskon pembelian sejumlah produk melalui program Promo bjb Bagi-Bagi Tanda Mata.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Wdi Hartoto mengatakan Promo bjb Bagi-Bagi Tanda Mata ini merupakan salah satu bentuk persembahan istimewa bank bjb kepada pemerintah daerah sekaligus masyarakat Kota Bekasi sebagai mitra bank bjb dalam membangun Kota Bekasi.

"bank bjb menggelar program promo bjb Bagi-Bagi Tanda Mata untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Bekasi sebagai bentuk persembahan dan apresiasi kepada segenap warga masyarakat Kota Bekasi yang telah menjadi mitra partisipasi dalam membangun Kota Bekasi. Program ini dapat dinikmati oleh seluruh warga Bekasi yang menjadi nasabah setia bank bjb," kata Widi dalam rilisnya, Senin (8/3).

Promo bank bjb dilakukan dengan memberikan diskon kepada para pengguna bjb DIGI dan bjb DigCash. Caranya, pengguna bjb DIGI dan bjb DigCash dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan QR Payment pada bjb DIGI atau pembayaran via scan QRIS pada bjb DigiCash.

Bentuk promo yang ditawarkan berupa potongan harga 60% (maksimal diskon Rp60 ribu) di sejumlah gerai produk-produk lokal. Diskon ini dapat dinikmati di gerai Roti Ana, Mang Engking, Linda Accessories, The Marwah dan Texstylez. Periode promo berlaku pada 10–16 Maret 2021. Potongan harga dari bank bjb ini berlaku untuk 16 orang pertama per hari. Setiap pengguna bjb DIGI dan bjb DigCash dapat melakukan 1x transaksi per hari.

"Diskon Tanda Mata ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM lokal yang ada di Kota Bekasi. Dengan kerja sama yang terjalin bersama bank bjb, diharapkan *merchant-merchant* lokal yang bergabung dalam program Promo bjb Bagi-Bagi Tanda Mata dapat turut mendongkrak usaha UMKM khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi covid-19," ujar Widi. (RO/S2-25)

Petaka Demokrasi di Demokrat

Zainal Arifin Mochtar
Ketua Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

PARTAI selalu punya logika sendiri. Namun, demokrasi pun sering kali punya logikanya, yang bahkan bukan tidak mungkin berakhir menyedihkan, baik buat demokrasi maupun buat partai itu sendiri. Partai punya logika dalam membangun sistem partai internal, yang bisa jadi berbeda dari bagaimana *textbook* bicara tentang sebaiknya partai dikelola.

Pada saat yang sama, partai bisa jadi dibangun dengan semua praktiknya secara internal yang dipengaruhi aktor-aktor di internal. Begitu pun logika demokrasi. Aspek prosedural ataupun aspek substansial menjadi penting. Aspek formal dan moral juga sesuatu yang sebenarnya haram untuk ditinggalkan. Makanya, apa yang terjadi di Partai Demokrat saat ini sebenarnya bisa dianggap mewakili tesis pernyataan di awal tersebut.

Sederhananya, Partai Demokrat sedang menghadapi serangan atas betapa tidak demokratisnya secara formal dan moral pengurus di internal. Ada pengurus yang mengatasnamakan demokrasi prosedural dan substansial, lalu melakukan pengambilalihan dengan cara yang sebenarnya juga masih ada pertanyaan secara formal dan substansial.

Bisa dibayangkan, akan ada saling klaim soal mana yang lebih benar secara formal dan moral. Tulisan ini tidak berhasrat untuk membenarkan mana yang terlihat lebih formal dan mana yang bisa mengemas ajaran moral dengan baik. Walaupun sederhananya, mudah untuk melihat konteks-konteks kuncinya.

Petaka demokrasi

Demokrasi, yang seharusnya baik buat partai malah berujung ke petaka. Saling klaim paling demokratis itulah yang menyisakan pertanyaan soal petaka demokrasi yang terjadi di Partai Demokrat dan bagaimana keluar dari impitan tersebut.

Saling klaim, yang sebenarnya bisa diselesaikan andai dilakukan langkah-langkah sederhana, yang juga dilakukan berbagai pihak.

Pertama, pihak partai tetap harus mencoba menyelesaikan ini dengan mekanisme yang ada di dalam UU Partai Politik.

Logika UU Parpol sebenarnya ialah dorongan untuk menyelesaikan sengketa yang ada melalui internal partai politik. Itu sebabnya di dalam UU Partai Politik jelas dicantumkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan secara internal dengan mengacu pada ketentuan AD dan ART.

Itulah logika yang melahirkan Mahkamah Partai atau lembaga yang sejenis dengan itu, dengan logika penyelesaian secepatnya dan disampaikan kepada kementerian. Bahkan, untuk perselisihan kepengurusan, putusannya bersifat final dan *binding* secara internal.

Masalahnya, memang tidak semua aktor politik mau taat pada hal ini. Apalagi, jika memang ada dorongan hasrat dan tekanan pihak tertentu, termasuk jika ada jaminan bisa memenangi proses peradilan atas hal itu. Itulah yang membuat nyaris tidak pernah ada perselisihan internal partai yang berakhir di Mahkamah Partai atau badan sejenis ini. Hampir selalu semuanya berujung ke pengadilan yang untuk hal ini juga, sudah diatur limitatif penyelesaiannya. Bahkan, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang hal ini.

Pada titik ini, sebenarnya ini ujian untuk internal Partai Demokrat. Pada saat yang sama akan memperlihatkan bahwa apakah memang ini hanya perdebatan tentang demokratisasi di tubuh internal partai atau ada iktikad lain yang membonceng.

Partai Demokrat harusnya berani untuk duduk dengan legawa. Oleh karena itu, dalam sejarah sebenarnya ada dua hal yang sering kali merancukan proses ini, yakni selain pengadilan itu sendiri, juga pihak pemerintah yang kemudian melakukan pengesahan. Jika tidak menyelesaikan secara internal, tetap saja yang tergerus ialah Partai Demokrat itu sendiri.

Jika yang menang akhirnya ialah pihak 'diambil alih', tetap saja sudah ada gambaran dan cerita-cerita tidak demokratisnya di tubuh internal. Begitu pun jika yang menang ialah pihak 'pengambil alih', tetap akan ada banyak catatan atas proses yang terkesan juga tidak demokratis. Menang jadi arang dan kalah jadi abu bagi Partai Demokrat. Beda jika kemudian bisa diselesaikan internal dan di ujungnya ada islah. Sedikit banyak, bisa menjaga proses kebakaran di Partai Demokrat sehingga tak perlu menjadi arang atau abu.

Jika ini gagal, pengadilan biasanya menjadi jalan yang tak terelakkan. Menariknya, jika dilihat, pengadilan lebih banyak membenarkan 'pihak lama yang diambil alih'. Paling tidak, ini terlihat di tiga kasus belakangan, yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Berkarya. Makanya, pihak kedua, yakni pengadilan, harusnya tetap pada logika hukum dan tidak mencoba menyeberang ke arah yang mengikuti tabuhan genderang politik.

Namun, ada faktor lain, yakni pemerintah yang sering kali berlawanan logika dengan itu, misalnya, dengan menerima atau membenarkan SK kepengurusan oleh pihak-pihak yang melaksanakan 'pegambilalihan'. Artinya, ini yang harus jadi catatan yang ketiga, yakni terhadap pihak pemerintah. Tentu saja ada beban berat di tubuh pemerintah. Oleh karena itu, di Kementerian Hukum dan HAM akan dihadapkan sesuatu saling klaim.

Harusnya, pemerintah tidak sekadar melihat aspek prosedural soal siapa yang sah, tapi juga melihat aspek substansial demokratis. Salah satunya ialah harusnya ada tindakan jelas dari pemerintah untuk membersihkan tuduhan bahwa pemerintah ada di belakang pengambilalihan.

Dukungan pengambilalihan oleh pemerintah, nyaris tidak pernah surut. Apalagi, jika dibandingkan dengan Peristiwa Kudatuli, Soerjadi yang bertemu Presiden Soeharto di kitaran kasus itu sudah menjadi kesimpulan umum, bahwa pengambilalihan itu didukung Pemerintah Orde Baru. Padahal, Soerjadi juga seorang tokoh internal dan 'darah biru' dalam seragam merah di PDI kala itu.

Bayangkan, sekarang ada tokoh yang nonpartai tiba-tiba didapuk menjadi ketua partai, padahal selain bukan darah biru partai, juga sama sekali tidak ada sejarah biru dengan partai. Pada saat yang sama, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), yang sebenarnya tupoksinya ialah membantu presiden dengan menyediakan pemikiran dan aksi-aksi untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Maka, mustahil bisa dihilangkan kesan bahwa tindakan pengambilalihan ialah hal yang berbeda dengan bantuan atas presiden. Belum lagi, jika disambungkan dengan isu bahwa memang ada agregasi upaya menuju ke arah amendemen kelima, lengkap dengan kemungkinan perubahan masa jabatan presiden, kesan bahwa ada upaya campur tangan pemerintah akan menjadi besar.

Kembali, pemerintah harusnya mau lebih berhati-hati. Konsep formal dan moral tetap harus ditegakkan secara bersamaan. Makanya, pilihan buat pemerintah melalui presiden seharusnya ialah segera menyingkirkan kecurigaan yang sulit dibantah itu, dengan memberhentikan Moeldoko selaku Kepala KSP. Bukan karena hukuman, melainkan sebagai upaya menjaminkan kepada publik bahwa ini bukan atas campur tangan pemerintah.

Pemerintahan yang disokong selalu punya unsur penting yang salah satunya ialah kepercayaan. Atas dasar itulah, pemerintah harusnya bertindak. Jika tidak dilakukan, pertanyaan besar tentang semakin ramainya partai politik yang 'diambil alih' di 6 tahun masa kepemimpinan Jokowi bisa menjadi hal yang buruk. Bahkan, cepat atau lambat, Presiden Jokowi dapat menanggung risiko politik yang menodai kredibilitas demokrasi yang diusung Jokowi, bahkan warisan politiknya.

Diskursus Vaksin Covid-19 Masyarakat Urban dan Lokal

Agustinus GR Dasion
Pemerhati Masyarakat Lokal, Doktor Sosiologi UGM

HINGGA sekarang, vaksin covid-19 sudah disebarkan di seluruh pelosok Nusantara. Tujuan negara menghabiskan dana triliunan rupiah ialah demi menekan jumlah orang yang terpapar covid-19. Namun, program ini tidak muncul tanpa catatan.

Berbagai diskursus muncul terkait dengan program vaksinasi ini. Diskursus awalnya, berpangkal pada tiga hal dasar, yakni terkait dengan keampuhan, keamanan, dan kehalalan vaksin yang digunakan. Diskursus awal tersebut pada akhirnya berkembang semakin cair dan luas. Diskursus vaksin covid-19 semakin berkembang dan 'dibumbui' dengan berbagai opini yang muncul dari para pejabat negara hingga politisi.

Di pihak para pejabat negara dan politisi, beberapa opini yang dikeluarkan bahkan semakin memperkeruh diskursus tentang tujuan vaksin covid-19 yang dijalankan negara.

Tulisan ini sebenarnya berusaha menganalisis berbagai pluralitas artikulasi diskursus vaksin covid-19, antara masyarakat urban dan masyarakat lokal. Masyarakat urban, pada tulisan ini merujuk pada mereka yang hidup di kota dan memiliki jenis pekerjaan, seperti pegawai di kantor dan perusahaan. Di sisi lain, masyarakat lokal merujuk pada masyarakat perdesaan, yang kehidupan ekonominya bergantung pada sistem ekonomi subsisten, seperti bertani dan nelayan.

Yang menarik dari tulisan ini ialah faktum perbedaan yang cukup substantif antara masyarakat urban dan masyarakat lokal dalam mengartikulasi diskursus vaksin covid-19. Walaupun berbeda, ada kesamaan artikulasi antarkeduanya. Khususnya, harapan mereka agar vaksin covid-19 menjadi obat, yang dapat membantu mereka untuk segera kembali beraktivitas secara normal.

Vaksin

Kehadiran vaksin covid-19 pastinya menjadi berita yang paling ditunggu masyarakat urban. Setidaknya, ada tiga diskursus yang sering menjadi perbincangan di ruang publik masyarakat urban.

Pertama, vaksin covid-19 akan menjadi obat ampuh dalam menurunkan angka masyarakat yang terinfeksi. Mobilitas masyarakat urban yang penuh dengan kesibukan tentunya sangat terganggu dengan realitas pandemi ini. Beberapa media sosial, bahkan dipenuhi dengan tagar 'saya siap divaksin'. Artikulasi ini menggambarkan kesediaan masyarakat untuk segera keluar dari cara hidup 'kenormalan baru' dan kembali hidup seperti sediakala.

Kedua, selain terkait dengan fungsi dan efek vaksin, diskursus vaksin covid-19 juga melebar pada siapa yang berhak menerima vaksin. Polemik terjadi ketika setiap orang atau instansi mengklaim dirinya menjadi yang paling pertama dalam menerima vaksin. Polemik ini dijawab negara dengan memberikan vaksin terlebih dahulu kepada mereka yang bertugas untuk mengurus pelayanan publik. Namun, diskursus ini tetap saja 'terbuka' (cair) terhadap berbagai interpretasi tentang siapa yang disebut sebagai pelayan publik dan siapa yang paling berhak di antara mereka.

Ketiga, kehadiran vaksin covid-19 membuka ruang diskursus tentang kemanjuran (termasuk 'kehalalan') dari vaksin tersebut. Diskursus ini muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan medis yang cukup baik. Diskursus tersebut semakin berkembang dengan diskursus tentang vaksin mana yang paling ampuh dari antara berbagai alternatif vaksin yang telah diproduksi.

Masyarakat lokal

Kehadiran vaksin covid-19 juga ditunggu-tunggu masyarakat lokal. Setidaknya ada tiga diskursus inti tentang vaksin covid-19. Pertama, vaksin tersebut akan mengembalikan sistem sosial-ekonomi masyarakat yang sudah dibatasi berbagai protokol kesehatan. Yang didiskusikan pertama-tama ialah bagaimana mereka kembali untuk bisa bekerja bersama-sama sebagai satu komunitas, tanpa ada berbagai aturan kesehatan yang sangat mengganggu arti kebersamaan, sebagai satu komunitas lokal. Selain itu, kehadiran vaksin covid-19 menjadi berita baik untuk kembali memperbaiki kehidupan ekonomi yang sempat terganggu.

Kedua, diskursus keamanan dan halal tidaknya vaksin yang digunakan, tidak terlalu dipikirkan masyarakat lokal. Itu karena mereka lebih fokus pada upaya untuk segera membangun kehidupan sosial-ekonomi yang terpuruk akibat pandemi covid-19. Masyarakat lokal percaya bahwa negara memiliki *political will* yang baik dalam menjaga kehidupan warganya.

Dengan demikian, berbagai perdebatan di media, tidak memiliki efek yang besar terhadap keinginan masyarakat lokal untuk segera mendapatkan vaksin. Walaupun demikian, diskursus ini tetap cair dan terbuka dengan kehadiran beberapa artikulasi masyarakat lokal yang terpengaruh berbagai berita media sehingga menjadi takut terhadap vaksin covid-19.

Ketiga, terkait dengan diskursus tentang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan vaksin, masyarakat lokal tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan negara. Masyarakat lokal bersedia menunggu gilirannya untuk segera mendapatkan vaksin yang sudah dipersiapkan secara gratis oleh negara. Yang diharapkan masyarakat lokal ialah vaksin covid-19 tidak dipolitisasi sehingga niat tulus untuk membantu masyarakat lokal keluar dari pandemi ini dapat terealisasi dengan cepat.

> Setiap kebijakan tidak hanya berhenti pada penilaian moral tentang baik dan buruk. Butuh upaya lanjutan untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut agar dapat dirasakan seluruh warga negara, termasuk masyarakat lokal.

Kebijakan yang adil

Pluralitas diskursus vaksin covid-19 pada akhirnya menuntut sebuah kebijakan politik yang *fair* sekaligus *just*. Diksi *fair* merujuk pada praktik kebijakan politik yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sedangkan *just* merujuk pada sebuah upaya keadilan substansial. Yang ditekankan dalam catatan ini ialah bagaimana membangun sebuah kebijakan yang adil secara substantif. Artinya, bahwa semua kebijakan yang diambil tidak boleh hanya berdasar pada prinsip prosedur, aturan, dan generalisasi.

Berbagai artikulasi diskursus vaksin covid-19, khususnya berasal dari masyarakat lokal, patut menjadi perhatian agar kebijakan negara tidak menomorduakan masyarakat lokal, yang juga berkeinginan untuk segera keluar dari pandemi yang mendera.

Kebijakan negara dalam menyediakan dan mendistribusikan vaksin ke seluruh pelosok daerah ialah kebijakan yang baik. Namun, setiap kebijakan tidak hanya berhenti pada penilaian moral tentang baik dan buruk. Butuh upaya lanjutan untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut agar dapat dirasakan seluruh warga negara, termasuk masyarakat lokal. Semoga!

PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: **opini@mediaindonesia.com** atau **opinimi@yahoo.com** atau fax: **(021) 5812105**, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, foto diri, dan NPWP).
Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MEDIA INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Firdaus Dayat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi
Deputi Direktur Pemberitaan: Ade Alawi

Dewan Redaksi Media Group:
Ketua: Usman Kansong (merangkap anggota)
Wakil Ketua: Abdul Kohar (merangkap anggota)
Sekretaris: Nunung Setiyani (merangkap anggota)
Anggota: Elman Saragih, Bambang Eka Wijaya, Suryopratomo, Don Bosco Selamun, Arief Suditomo, Budiyanto, Gaudensius Suhardi, Kania Sutisnawinata, Iskandar Zulkarnain
Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, Adrianto Machribie

Redaktur Senior: Elman Saragih
Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Henri Salomo, Jaka Budi Santosa, Mochamad Anwar Surahman, Rosmery C. Sihombing, Sadyo Kristiarto (Nonaktif), Victor J.P. Nababan
Kepala Sekretariat Redaksi: Ida Farida

Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Baharman, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Dwi Tupani Gunarwati, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Heryadi, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Emir Chairullah, Fetry Wuryasti, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Indrastuti, Indriyani Astuti, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Putra Ananda, Putri Anisa Yulianti, Putri Rosmalia Octaviyani, Ramdani, Retno Hemawati, Rizki Noor Alam, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sri Utami, Sugeng Sumariyadi, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, Zubaedah Hanum

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Asisten Kepala Divisi: Iis Zatnika
Redaktur: Eni Kartinah
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo, Ridha Kusuma Perdana,
Bahasa:
Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho, Suprianto
Staf: Farhatun Nurfitriani, Meirisa Isnaeni, Riko Alfonso

ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki
Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Bayu Wicaksono, Dedy, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tutik Sunarsih
Olah Foto: Ade Rian H, Andi Nursandi

PENGEMBANGAN BISNIS
Deputi Direktur Pengembangan Bisnis: Fitriana Saiful Bachri
Deputi Direktur Sales & Marketing: Gustaf Bernhard R
Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500;
Surabaya: (031) 5667359;
Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN
Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang)
Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), Eriez M. Rizal, Bayu Anggoro (Bandung), Kisar Rajagukguk (Depok), Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Depi Gunawan (Cimahi), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya)
Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Widjajadi, Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes)
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan
Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura)
Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh)
Sumatra Utara: Yoseph Pencawan, Puji Santoso (Medan), Januari Hutabarat (Taput)
Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang)
Riau: Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru)
Kepri: Hendry Kremer (Batam)
Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang)
Bengkulu: Marliansyah
Jambi: Solmi
Lampung: Eva Pardiana (Bandarlampung)
Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya)
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin)
Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado)
Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari)
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar)
NTB: Yusuf Riaman (Mataram)
Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta)
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang)
Maluku: Hamdi Jempot (Ambon)
Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura)
Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303
Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110
Fax Customer Service: (021) 5820476,

Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, **Percetakan:** Media Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935,
Website: www.mediaindonesia.com

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

MEDIA GROUP

Satu Tahun Pandemi Covid-19

Suryopratomo
Duta Besar Indonesia untuk Singapura

SATU tahun sudah pandemi covid-19 ditetapkan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status pandemi pada 11 Maret 2020 setelah kasus yang pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok, menyebar ke 110 negara. Inilah status pandemi kedua yang terjadi setelah lebih satu abad sebelumnya dunia dilanda flu spanyol.

Bukan hanya Indonesia yang dilanda ketidakpahaman bagaimana cara menangani virus yang menular begitu cepat saat kasus pertama muncul pada 2 Maret. Semua negara di dunia dihadapkan kepada kebingungan dan ketidaktahuan menghadapi covid-19. Presiden Joko Widodo merespons kegentingan itu dengan membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020.

Sampai sekarang penyebab munculnya virus korona masih misteri. WHO Februari lalu mengirimkan tim khusus untuk melakukan penelitian tentang virus yang telah menyebabkan sekitar 2,5 juta penduduk dunia meninggal dunia. Selama empat pekan tim yang dipimpin Peter Ben Embarek berada di Wuhan untuk melacak asal muasal penyakit yang menyebabkan pandemi ini. Hasil investigasi WHO tidak bisa menentukan secara pasti dari mana virus itu berasal. Mereka hanya memastikan tuduhan AS bahwa covid-19 berasal dari kebocoran yang terjadi pada sebuah laboratorium di Wuhan tidak benar. Dugaannya, virus dibawa kelelawar yang menjadi *carrier*.

Masih teringat ketika 17 Maret 2020 saya diminta Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk membantu penanganan komunikasi publik. Di tengah ketidakjelasan tentang karakteristik virus korona yang mulai berjangkit di Indonesia, Gugus Tugas harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Langkah pertama yang diambil ketika itu ialah meminta Doni Monardo tampil di depan publik guna menjelaskan tantangan yang sedang kita hadapi dan peran serta yang harus dilakukan masyarakat. Dari hasil diskusi, disepakati lima hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat; pertama, jaga jarak ketika bertemu; kedua, hindari kerumunan; ketiga, di rumah saja; keempat, cuci tangan dengan sabun; dan kelima, pakai masker.

Ketika rekaman sedang berlangsung di lobi Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seorang pejabat dari Unicef yang sedang berada di BNPB dan menyaksikan rekaman tersebut tiba-tiba meminta agar ajakan kelima tidak disampaikan. Alasannya, masker hanya untuk mereka yang sakit.

Kalau melihat kembali rekaman pernyataan para pejabat di Singapura pun pada Februari 2020, masker memang tidak disarankan untuk dipergunakan. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pun dalam wawancara dengan wartawan menyampaikan masyarakat tidak perlu menggunakan masker. Atas dasar itulah Ketua Gugus Tugas terpaksa mengulang lagi rekamannya. Poin nomor lima dari iklan layanan masyarakat yang dibuat tidak menyebutkan keharusan untuk menggunakan masker.

Baru beberapa bulan kemudian disadari, masker justru merupakan salah satu yang wajib digunakan untuk mencegah penularan. Ternyata penularan covid-19 yang berlangsung begitu cepat disebabkan aerosol yang keluar dari mulut dari mereka yang terinfeksi. Celakanya, banyak yang terinfeksi covid-19 tidak menunjukkan gejala apa-apa atau asimptomatik. Gugus Tugas harus mengampanyekan agar masyarakat selalu menggunakan masker.

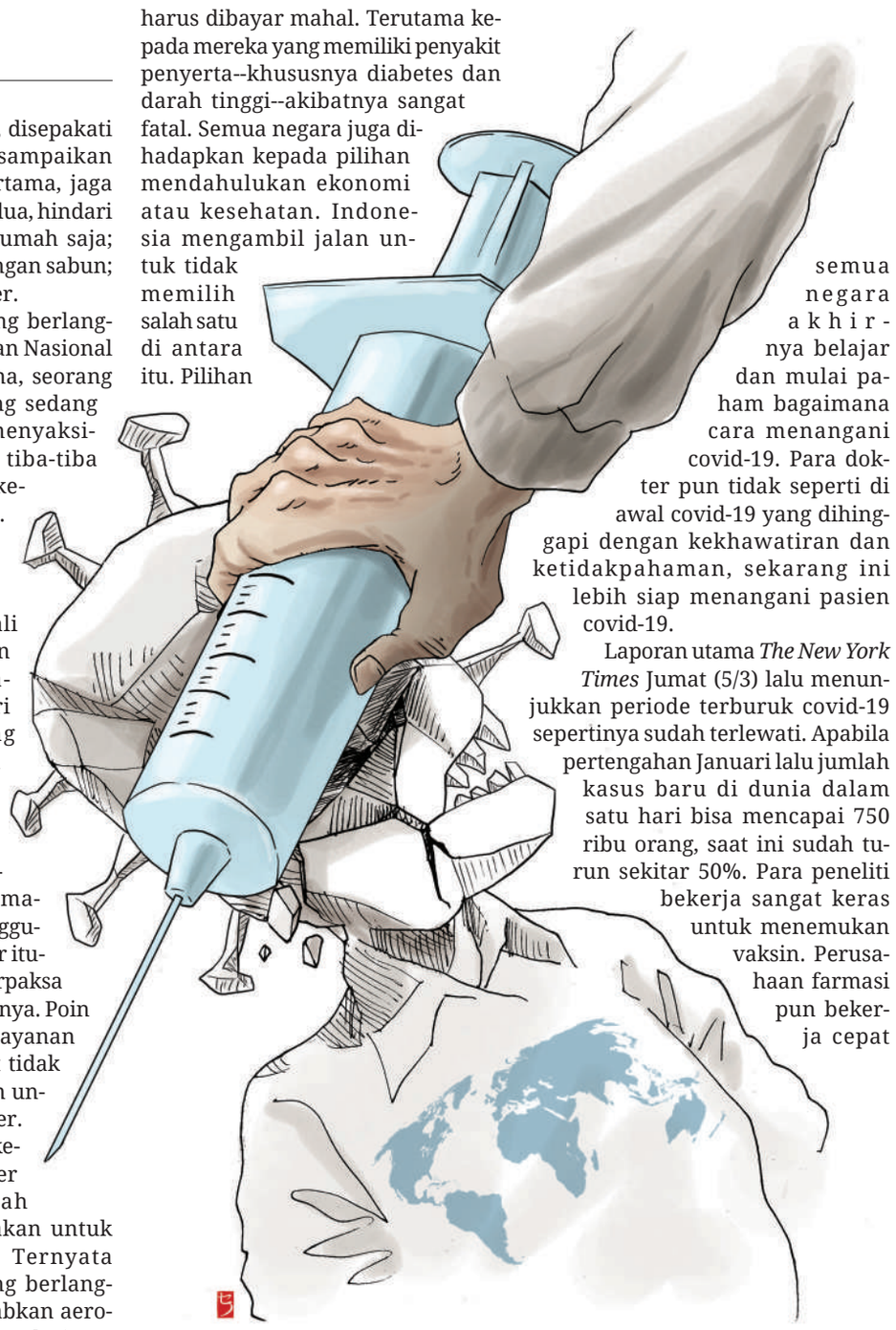

Kesehatan atau ekonomi

Selama satu tahun semua negara lebih banyak melakukan *trial and error*. Sayangnya, *error* yang terjadi harus dibayar mahal. Terutama kepada mereka yang memiliki penyakit penyerta--khususnya diabetes dan darah tinggi--akibatnya sangat fatal. Semua negara juga dihadapkan kepada pilihan mendahulukan ekonomi atau kesehatan. Indonesia mengambil jalan untuk tidak memilih salah satu di antara itu. Pilihan Indonesia menjaga masyarakat agar tidak terpapar oleh covid-19, tetapi secara bersamaan jangan sampai terkapar oleh tekanan ekonomi.

Pilihan itu menyelamatkan Indonesia tidak sampai menimbulkan rasa frustrasi di tengah masyarakat. Banyak negara yang memilih salah satu di antaranya akhirnya harus menghadapi kondisi yang *chaotic*. Satu yang membangunkan harapan, semua negara akhirnya belajar dan mulai paham bagaimana cara menangani covid-19. Para dokter pun tidak seperti di awal covid-19 yang dihinggapi dengan kekhawatiran dan ketidakpahaman, sekarang ini lebih siap menangani pasien covid-19.

Laporan utama *The New York Times* Jumat (5/3) lalu menunjukkan periode terburuk covid-19 sepertinya sudah terlewati. Apabila pertengahan Januari lalu jumlah kasus baru di dunia dalam satu hari bisa mencapai 750 ribu orang, saat ini sudah turun sekitar 50%. Para peneliti bekerja sangat keras untuk menemukan vaksin. Perusahaan farmasi pun bekerja cepat untuk melakukan produksi massal guna memenuhi kebutuhan lebih dari 7 miliar penduduk dunia. Para pemimpin negara pun lebih tegas mengambil keputusan.

Semua negara mulai mempercepat upaya vaksinasi agar fatalitas bisa ditekan serendah mungkin. Memang vaksinasi disadari tidak akan mengeradikasi covid-19. Yang sudah mendapatkan vaksinasi bukan berarti tak bisa tertular atau menulari orang lain. Namun, vaksinasi diyakini menjadi *game changer* yang bisa membuat dunia mengakhiri masa hibernasi setelah satu tahun semua kegiatan nyaris terhenti. Protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan yang dijalani setiap orang. Di masa yang baru ini, orang harus peduli kepada sesama. Kita harus menggunakan masker dan tidak menciptakan kerumunan besar agar bisa melindungi sesama.

Penyakit masa depan

Semua bangsa di dunia kini mencoba memetik pelajaran dari pengalaman pandemi covid-19. Bagaimana dunia bekerja sama ketika satu saat nanti pandemi kembali terjadi. Apabila dari pandemi flu spanyol ke covid-19 dibutuhkan waktu satu abad, ke depan diyakini pandemi akan datang lebih cepat.

Disease of tomorrow merupakan sebuah keniscayaan. Fareed Zakaria dalam buku terbarunya, *Ten Lessons for a Post-Pandemic World*, menuliskan ketidakseimbangan alam dan pemanasan global merupakan faktor-faktor yang bisa memicu munculnya penyakit-penyakit baru. Ketidaksiapan dunia untuk mengantisipasi penyakit yang akan datang bisa menimbulkan kepanikan seperti kita alami setahun terakhir ini.

Temasek Foundation pada Januari lalu secara khusus membahas masalah ini. Sebagai salah satu panelis, saya berpandangan perlunya negara-negara ASEAN memikirkan bagaimana respons bersama yang harus diambil apabila terjadi situasi kedaruratan. Pengalaman covid-19 mengajarkan, ketika pandemi terjadi, semua negara dihadapkan kepada keterbatasan. Mulai masker hingga pakaian pelindung diri bagi tenaga kesehatan pun tidak mencukupi jumlahnya. Sekarang pun ketika semua negara membutuhkan vaksin, setiap negara harus berjuang sendiri-sendiri.

Ketika pandemi dihadapi dengan kepanikan, setiap negara cenderung menyelamatkan diri sendiri. Inggris dan Uni Eropa sampai harus berseteru ketika pasokan vaksin dianggap tidak adil dan lebih berorientasi kepada kepentingan bisnis semata. Pembentukan lembaga riset bersama menjadi sebuah kebutuhan. Dengan kehadiran lembaga itu, dunia tidak hanya bisa berbagi informasi, tetapi juga bisa melakukan antisipasi. Bahkan bisa dirumuskan langkah bersama untuk menyelamatkan kehidupan semua orang yang tinggal di kawasan ASEAN.

Para pemimpin negara ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi November 2020 menyepakati dibentuknya ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED). Indonesia, Thailand, dan Vietnam mengajukan diri sebagai tuan rumah. Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan usul kepada seluruh pemimpin ASEAN mengenai kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ACPHEED. Bahkan lokasi untuk lembaga riset yang akan menjadi andalan bangsa-bangsa ASEAN kelak dibangun di Tangerang, serta pendanaan untuk lima tahun pertama ditanggung Indonesia.

Dalam penanganan covid-19, Indonesia dinilai mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang sejak Juli aktif menggalang kerja sama internasional bagi pengembangan vaksin covid-19. Indonesia menjadi bagian dari uji coba vaksin Sinovac sehingga tidak mengherankan mendapat pasokan lebih awal dari Tiongkok dan sekarang sudah secara massal menjalankan vaksinasi.

Memang dengan jumlah penduduk lebih dari 180 juta yang harus divaksinasi, Indonesia harus bergerak cepat. Bahkan pemerintah kini sudah menetapkan digunakannya vaksin gotong royong agar lebih cepat terbentuk *herd immunity* di tengah masyarakat. Apabila kita juga bisa lebih cepat menerapkan *digital tracing* untuk mengendalikan penularan, Indonesia akan lebih baik mengendalikan wabah covid-19. Jangan sampai vaksinasi yang sekarang gencar dilakukan kalah cepat dengan penularan yang terjadi. Upaya untuk terus menekan *positivity rate* penularan kasus di bawah 5% harus juga menjadi target.

SUARA ANDA

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: **forum@mediaindonesia.com**

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Jangan Cuma Teriak Anti Korupsi Tapi Akhirnya Jadi Pelaku** (3-10 Maret 2021) opini publik ke e-mail: **forum@mediaindonesia.com**

Tumbuhkan Budaya Malu dalam Diri

MIRIS, sungguh membuat miris hingga ke tulang sumsum ketika melihat kasus korupsi di negeri ini tak kunjung berada dalam titik penyelesaian. Dari hari ke hari semakin banyak pejabat yang tersandung oleh kasus anyir ini. Ironisnya, meski banyak yang tertangkap, korupsi malah semakin menjadi.

Seperti itulah yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (26/2) malam.

Ia menjadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK pada 2021 dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Untuk melakukan pencegahan korupsi sejak dini, cara yang dapat ditempuh salah satunya menumbuhkan budaya malu dalam diri sendiri. Terlebih, bagi kepala daerah yang diberi amanah untuk mengurus rakyat, korupsi seharusnya menjadi hal yang tabu dilakukan.

Budaya malu harus ditanamkan sejak awal dari individu. Milikilah rasa malu kepada Allah SWT Yang Maha Pencipta dan pengatur hidup manusia. Yakinilah setiap perbuatan kita tak luput dari catatan-Nya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Memiliki rasa malu akan menghindarkan kita dari sifat tamak, tak takut dosa dan mengkhianati amanah.

> Penting menerapkan budaya malu dari individu. Jangan sampai korupsi semakin menjadi kebiasaan buruk yang terus berkembang di negeri ini.

Ingatlah bahwa korupsi salah satu tindakan mengkhianati amanah dan bisa disebut sebagai tanda kemunafikan. Dalam kitab *Ash-Shahihain*, Rasulullah bersabda, "Tanda-tanda munafik ada tiga; jika berbicara, dusta; jika berjanji, mengingkari; dan jika diberi amanah, ia berkhianat." (HR Bukhari 33 *Kitab Iman* dan Muslim 59 *Kitab Al-Iman*).

Rasa malu yang kedua ialah kepada rakyat atau orang yang memberi amanah. Karena itu, penting menerapkan budaya malu dari individu. Jangan sampai korupsi semakin menjadi kebiasaan buruk yang terus berkembang di negeri ini.

Ismawati
Palembang, Sumatra Selatan

Para Koruptor Harus Diberi Stigma

KORUPSI bagaikan lingkaran setan yang seakan tidak bisa lepas dari negeri ini. Hampir seluruh elemen masyarakat telah melakukan hal tersebut. Bahkan, walaupun telah didirikan sebuah badan untuk menangulangi korupsi, nyatanya tindak lancung itu masih terus terjadi.

Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International, merilis laporan bertajuk *Global Corruption Barometer-Asia* dan Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India, diikuti Kamboja. Hal ini semakin menunjukkan negeri ini sedang darurat korupsi.

Seyogianya, mengguritanya korupsi di negeri ini akibat beberapa faktor; pertama, lemahnya ketakwaan individu kepada Sang Pencipta sehingga membuat diri mereka seakan tidak takut terhadap siksaan/dosa dari perbuatan buruk/keji yang dilakukan. Kedua, gaya hidup hedonis yang membuat terlena akan kekayaan/materi hingga mereka ingin melakukan apa pun yang diinginkan, termasuk mengunakan cara-cara haram mengapainya.

Ketiga, lemahnya sanksi hukum yang dijatuhkan kepada para koruptor. Sistem hukum yang memungkinkan pemberian grasi dan pengurangan tahanan membuat para pelaku kejahatan, termaksud para koruptor, bisa kembali melakukan praktik haram tersebut.

Negara hendaknya memperbaiki segala aturan tersebut. Mulai mendorong ketakwaan individu kepada Sang Pencipta hingga menerapkan sanksi tegas dan menjerakan bagi para pelaku kejahatan agar korupsi dapat dituntaskan hingga ke akarnya. Islam memiliki sistem sanksi tegas tanpa pandang bulu. Korupsi tidak sama dengan mencuri sehingga menurut syariat tidak termasuk kategori hudud, tetapi termasuk *ta'zir* (takzir).

Sanksi *ta'zir* diserahkan kepada ijtihad hakim, bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Jadi, dengan ketegasan dari sistem hukum, para pejabat dan rakyatnya terhindar dari praktik yang membahayakan.

Siti Komariah
Konda, Sulawesi Tenggara

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT. PERENNEBELL GLOBAL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Gedung Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt 1 Unit 0103, Jl. Boulevard Kelapa Gading LA 3 No. 1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham yang akan dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan, perubahan susunan pemegang saham Perseroan, dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Para kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini.

Jakarta, 10 Maret 2021
PT. PERENNEBELL GLOBAL INDONESIA
Direktur
BYUN HYUNG SUK

PT. A2Z MEDICAL MANAGEMENT ("Company/*Perseroan*")
Invitation to the Extraordinary General Meeting Of Shareholders
Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Commissioners of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") held on :
Komisaris Perseroan dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Day/Date (*Hari/Tgl.*) : Thursday, 25 March 2021/ *Kamis, 25 Maret 2021*
Time (*Pukul*) : 2.00 pm (14.00 *WIB*)
Venue (*Bertempat di*) : Company's Office / *Kantor Perseroan*
Jalan Semolowaru No. 162 Perum Central Park Kav. 65, Surabaya, Jawa Timur

Agenda Rapat (*Meeting Agenda*):
1. To approve the changes of members of the Company's Board of Directors; (*Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan*);
2. Other agendas (if deem necessary). (*Agenda lainnya (jika dianggap perlu)*).

Notes (*Catatan*) :
1. This invitation is deemed as official invitation of the Meeting (*Undangan Rapat ini berlaku sebagai panggilan Rapat yang sah*);
2. Only shareholders whose names recorded in the Company's Register of Shareholders shall be entitled to attend or be represented at the Meeting by proxy (*Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri atau diwakili oleh kuasa dalam Rapat*);
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting in person can be represented by his/her proxy by submitting the power of attorney (*Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan melampirkan surat kuasa*);
4. The materials to be discussed in the Meeting are available and may be obtained at the Company's office from the date of this Meeting invitation (*Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini*).

Jakarta, 10 Maret 2021
Commissioners (*Komisaris*) PT. A2Z MEDICAL MANAGEMENT

Ayo Gunakan Masker agar Terhindar dari Virus Covid-19

Fungsi

- Mencegah masuknya virus dari udara
- Mengurangi penyebaran virus covid-19
- Melindungi orang lain di sekitar kita
- Membatasi kontak fisik tangan ke muka

Jenis Masker yang Disarankan

- Masker bedah/medis

- Masker N95

- Masker kain

Aturan Menggunakan Masker dari WHO

- Sesuaikan ukuran masker dengan wajah
- Cuci tangan sebelum menyentuh masker
- Tempelkan masker ke wajah
- Panjangkan lipatan masker menutup hidung, mulut, dan dagu
- Hindari penggunaan berkali-kali
- Jangan membuang di sembarang tempat
- Jangan digunakan bergantian

Upaya Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

- Larangan/pembatasan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang.
- Memperketat aturan bekerja dari rumah (WFH) khusus wilayah yang masih zona tinggi kasus covid-19.
- Optimalisasi isolasi terpusat, operasi yustisi, dan pengetatatan protokol kesehatan, khususnya di zona tinggi covid-19.
- Memperketat protokol kesehatan di *rest area*, hotel, dan tempat wisata.
- Memperketat pembatasan sosial skala mikro.
- Membatasi jam operasi tempat makan, tempat hiburan, dan mal.

Kebutuhan Masker Nasional

(data Kementerian Perindustrian per Maret 2020)

- **Kebutuhan Nasional** : 162 juta pcs/bulan (saat kondisi normal).
- **Kapasitas Terpasang Nasional**: 150 juta pcs/bulan. ditambah 31 juta pcs/bulan (dari produsen tekstil)
- **TOTAL kapasitas terpasang nasional adalah 181 juta pcs/bln.**
- **Rata-Rata Produksi Nasional**: 100 juta pcs/bulan ditambah 31 juta pcs/bulan (asumsi dari produsen tekstil melakukan 100% produksi)
- **Penjualan ke Dalam Negeri**: 40 juta-50 juta pcs/bulan (40%-50% produksi)
- **Penjualan Ekspor**: 50 juta-60 juta pcs/bulan (50%-60% produksi)

Sumber: Kementerian Perindustrian/Satgas Penanganan Covid-19/Kemenkes/Litbang MI

Daerah masih Butuh Masker Medis

KALIMANTAN Selatan masih harus bekerja keras menekan angka infeksi baru di wilayahnya. Lonjakan kasus baru di wilayah ini sempat terjadi, setelah kepungan banjir yang berlangsung lebih dari dua minggu.

Perhatian pun datang dari Kantor Staf Presiden. Bekerja sama dengan Gerakan Pemuda Ansor dan Aice Group, mereka menyumbangkan masker medis.

"Untuk Kalimantan Selatan dibantu 150 ribu masker medis berkualitas. Kami akan segera membagikannya untuk warga dengan kerentanan penularan tinggi," janji Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, di Banjarmasin, kemarin.

Ia mengungkapkan, gerakan gotong royong Kantor Staf Presiden, GP Ansor, dan Aice Group menyediakan 5 juta masker untuk 20 provinsi di Indonesia. Kalsel menjadi salah satu daerah yang ikut dibantu.

Safrizal mengakui bantuan masker masih dibutuhkan masyarakat. "Kombinasi dari kedisplinan warga menggunakan masker, menjalankan protokol kesehatan dan 3 T (*tracing, testing, treatment*) menjadi kunci menekan penularan covid-19."

Sampai saat ini, pandemi covid-19 di Kalsel tidak kunjung mereda. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona mencatat jumlah warga terinfeksi mencapai 23.300 orang. Sebanyak 754 orang meninggal dunia.

"Saat ini tercatat ada 2.075 penderita aktif yang masih menjalani perawatan. Dalam satu hari ini ada penambahan 160 kasus positif," kata juru bicara Tim Gugus Tugas, Muslim.

Bantuan masker juga dipilih sejumlah jurnalis asal Maluku Utara untuk masyarakat di Halmahera Selatan. Warga di daerah ini terdampak bencana gempa bumi.

Selain masker, mereka juga menyumbangkan sembako. "Sumbangan ini kami pilih supaya korban bencana juga bisa terhindar dari paparan covid-19," kata Koordinator Jurnalis Televisi Maluku Utara, Ifan Gusti. (DY/HI/N-2)

Mobilitas selama Libur Nasional Dibatasi

Langkah pembatasan dilakukan untuk menekan angka kasus covid-19 setelah libur panjang.

Atalya Puspa
atalya@mediaindonesia.com

APARATUR Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, dan anggota TNI/Polri diminta agar tidak bepergian pada masa libur nasional, yakni Hari Raya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada Kamis (11/3) dan Hari Raya Nyepi pada Minggu (14/3). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) Mikro tahap 3 terhitung mulai Selasa (9/3) hingga Minggu (21/3).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan hal itu dengan maksud untuk menekan kenaikan angka kasus penularan covid-19 pada momentum libur panjang, seperti pada libur hari raya tahun lalu.

"Kita harus akui, setiap libur panjang mulai Lebaran Idul Fitri tahun lalu selalu diikuti dengan peningkatan kasus harian dan juga kasus aktif, termasuk pada akhir tahun yang lalu, yaitu libur Natal dan liburan Tahun Baru 2021," jelas Doni di Jakarta, Senin (8/3).

Guna mengimplementasikan upaya tersebut, Doni meminta agar pimpinan di setiap lembaga dan instansi terkait dapat melakukan pengawasan ketat bagi seluruh jajarannya.

Adapun bagi swasta, Doni berkoordinasi dengan Kepala Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk membantu meneruskan pesan bagi pihak swasta, agar dapat mengikuti menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka memutus rantai penularan virus korona.

"Agar Kadin pun bisa membantu menyampaikan pesan kepada seluruh pimpinan perusahaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Doni menjelaskan bahwa berdasarkan data Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Satgas Penanganan Covid-19 Maret 2020-Februari 2021, angka kenaikan kasus aktif dan angka kematian pada periode Januari akhir menduduki puncak hingga mencapai rata-rata 170 ribu kasus per hari. Jumlah kematian juga naik secara signifikan yang dipicu pergerakan masyarakat selama libur nasional ditambah lemahnya penerapan protokol kesehatan. "Artinya setelah libur panjang diikuti dengan kasus aktif yang tinggi, kemudian angka kematian yang juga sangat tinggi," jelas Doni.

Efektif

LAJU pergerakan kasus covid-19 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terpantau terus melandai bahkan cenderung turun. Kondisi tersebut tak terlepas dari gencarnya operasi yustisi protokol kesehatan covid-19 serta penerapan PPKM skala mikro. Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan tren penurunan kasus aktif covid-19 di daerahnya tak terlepas dari peran aktif semua pihak.

Penerapan PPKM skala mikro termasuk gencarnya operasi yustisi hingga ke tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga RT dan RW dinilai cukup efektif menekan angka kasus covid-19. Saat ini pun risiko penyebaran covid-19 berada pada zona kuning.

"Kami sangat berharap terus meningkatkan pendisiplinan masyarakat dalam menerapkan prokotol kesehatan, agar Kabupaten Cianjur bisa segera terbebas dari zona kuning dan menjadi zona hijau," tuturnya.

Grafik data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, pada periode 22-28 Februari 2021, wilayah di Kabupaten Cianjur sudah tidak ada lagi yang zona merah, dan hanya terdapat 2 RT/RW yang masih zona oranye.

Herman optimistis Kabupaten Cianjur akan segera menuju zona hijau. (BB/BK/H-3)

Korban Meninggal Dunia masih Bertambah

KEGANASAN covid-19 belum luntur. Meski jumlah pasien sembuh cukup besar, hampir di semua daerah tetap melaporkan ada warga yang meninggal dunia akibat virus itu.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, dalam satu hari, kemarin, ada 6 warga yang meningal dunia. Usia para korban bervariasi, dalam rentang 35-78 tahun.

Provinsi dengan lima kabupaten dan kota ini mencatat penambahan jumlah pasien baru sebanyak 167 kasus. "Kerja keras tim kesehatan berbuah kesembuhan bagi 161 warga. Penambahan kasus baru tertinggi masih di wilayah Kabupaten Sleman dengan total 59 kasus," kata juru bicara Pemprov DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Pengabaian warga terhadap protokol kesehatan masih menjadi penyebab utamanya tingginya angka penjangkitan baru. Warga diimbau kembali menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.

Memiliki kawasan yang lebih luas dan jumlah kabupaten serta kota yang lebih banyak, Riau mencatat angka kematian 2 orang. Jumlah kasus baru juga lebih sedikit, yakni 65 warga.

"Jumlah warga yang sembuh lebih tinggi daripada angka infeksi baru. Hari ini, kami mengizinkan 71 pasien meninggalkan bangsal isolasi," papar Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yuliani Nazir, kemarin.

Ia menambahkan sampai saat ini total terkonfirmasi 32.102 kasus dengan isolasi mandiri 669 orang, dan dirawat di rumah sakit sebanyak 298 orang. Riau mencatatkan total kematian sebanyak 783 kasus dan total pasien sembuh 30.352 orang.

> "Kerja keras tim kesehatan berbuah kesembuhan bagi 161 warga. Penambahan kasus baru tertinggi masih di wilayah Kabupaten Sleman dengan total 59 kasus."
>
> **Berty Murtiningsih**
> Juru bicara Pemprov DIY untuk Penanganan Covid-19

"Kami masih harus bekerja keras menurunkan angka infeksi baru. Masyarakat tetap diminta menaati protokol kesehatan," tandasnya.

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, juga masih membukukan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 2 orang. "Dalam sehari, kasus terkonfirmasi bertambah 10 orang. Namun, 27 pasien diperbolehkan pulang," papar Cahyono Widodo, Koordinator Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19. (AU/RK/JS/N-3)

Kematian Harian di AS di Bawah 1.000

UNTUK pertama kalinya dalam hampir tiga setengah bulan, Amerika Serikat mencatat kurang dari 1.000 kematian dalam sehari akibat covid-19 pada Senin, menurut Johns Hopkins University.

Dalam 24 jam, 749 orang meninggal akibat virus korona, jauh di bawah puncaknya dengan 4.473 kematian yang tercatat pada 12 Januari.

Jumlah kematian harian AS belum di bawah angka seribu sejak 29 November, ketika 822 orang meninggal dalam periode 24 jam.

Perlambatan tersebut merupakan kabar baik bagi Presiden AS Joe Biden yang akan meningkatkan strategi vaksinasi berskala besar.

Kampanye vaksin AS yang diluncurkan pada Desember sekarang berjalan lancar, dengan hampir 10% dari populasi Amerika--sekitar 31,5 juta orang--telah menerima baik dua suntikan yang diperlukan untuk vaksin Pfizer atau Moderna maupun satu suntikan untuk vaksin Johnson & Johnson.

Kematian di Amerika Latin

Lebih dari 700.000 nyawa telah hilang karena covid-19 di Amerika Latin dan Karibia sejak pandemi dimulai, menurut penghitungan *AFP* pada Senin malam dari sumber resmi.

Wilayah itu, yang mencakup 34 negara dan wilayah di Amerika Selatan dan Tengah serta Karibia ditambah Meksiko, mencatat 700.022 kematian. Itu merupakan jumlah kematian akibat virus korona tertinggi kedua setelah Eropa.

Brasil dan Meksiko menyumbang dua pertiga dari kematian akibat virus korona di kawasan itu, yang mencapai angka suram lebih dari 500.000 pada akhir Desember dan terus meningkat sejak itu, mencapai 600.000 pada 2 Februari.

Di sisi lain, hasil studi laboratorium yang diterbitkan dalam *New England Journal of Medicine* pada Senin (8/3) menunjukkan bahwa vaksin covid-19 Pfizer dan BioNTech mampu menetralkan varian baru virus korona yang menyebar dengan cepat di Brasil.

Para ilmuwan mengatakan kemampuan menetralkan secara kasar setara dengan efek vaksin pada versi virus yang kurang menular sebelumnya dari tahun lalu. (AFP/Nur/I-1)

MI/USMAN ISKANDAR

SEJUTA VAKSIN PER HARI: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi G Sadikin (kedua kiri) didampingi Chief Executive Officer PT Lippo Karawaci Tbk, John Riady (kiri), Perwakilan Lippo Malls Indonesia, Henry Riady (ketiga kiri), dan Deputy President Director Siloam Hospitals Group, Caroline Riady (keempat kiri) meninjau pemberian vaksin untuk lansia di Lippo Mall Puri , Jakarta Barat, kemarin. Lippo Malls dan Siloam Hospitals Group bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan merealisasikan target nasional 1 juta vaksinasi per hari.

Vaksinasi Lansia di Depok belum Dipastikan

KEPALA Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita mengatakan pihaknya belum bisa memastikan secara pasti jadwal pemberian vaksinasi covid-19 kepada warga kategori lanjut usia (lansia). "Belum ada jadwal apakah lusa atau pekan depan," kata Nova, kemarin.

Meski demikian, sambung Nova, Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan vaksin bagi lansia. Namun, berapa yang bakal mendapatkan vaksin covid-19 belum bisa dijelaskan secara pasti termasuk lokasinya. Ia menjelaskan dinas terkait masih mendata jumlah lansia yang akan divaksinasi. "Dalam pemberian vaksin, kelurahan zona merah diprioritaskan dengan jumlah pasien dan tingkat penyebaran covid-19 tertinggi."

> Dinas terkait masih mendata jumlah lansia yang akan divaksinasi.

Lebih jauh, terang dia, mulanya lansia di Kota Depok bukan merupakan prioritas penerima vaksinasi covid-19. Saat itu, pemda setempat hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), pedagang pasar, petugas keamanan, guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, serta pekerja pers.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menuturkan sebanyak 1.200 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta Timur akan mendapatkan vaksinasi covid-19. Vaksinasi itu dilakukan secara bertahap sejak kemarin.

Diharapkan, pemberian vaksin dapat berkontribusi sekitar 60% pada upaya memutus penyebaran covid-19. Meski sudah divaksin, sambung dia, bukan berarti orang tidak bisa terkena virus korona. Ia pun meminta para ASN tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Di Kota Semarang, jumlah warga yang divaksin tahap kedua dengan sasaran pelayan publik, lansia, dan penerima yang mendapat prioritas mencapai 73.446 orang atau melebihi target 62.000 orang. Vaksinasi pun terus dikebut. Bahkan, jumlah pasien di berbagai rumah sakit rujukan maupun isolasi juga terus menurun karena tingkat kesembuhan yang cukup tinggi.

Kondisi serupa terlihat di Kabupaten Sikka, NTT. Sebanyak 480 tenaga kesehatan dan 320 orang pelayan publik yang terdiri dari TNI Polri, ASN, anggota DPRD Sikka dan lainnya menerima vaksinasi tahap kedua. (Put/KG/AS/GL/J-2)

PULAU KE PULAU

Munafri Pimpin Golkar Makassar

MUNAFRI Arifuddin bukan nama baru bagi warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dua kali maju sebagai calon wali kota, tetapi selalu kurang beruntung.

Appi, panggilan akrabnya, kalah ketika melawan kotak kosong pada 2019 lalu. Maju lagi setahun kemudian, calon yang didukung keluarga besar Jusuf Kalla itu kalah dari Danny Pomanto. Namun, ia tetap menggeluti dunia politik. Kemarin, Appi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar periode 2021-2026.

Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah X. Appi bisa melenggang dalam pencalonannya kali ini karena telah mendapat diskresi dari DPP Partai Golkar.

Dalam pemilihan, seharusnya Appi bersaing dengan satu-satunya pesaing, yakni Juniar Arge. Namun, Juniar memilih mengundurkan diri dan menyerahkannya kepada Appi. "Mari kita kembalikan kejayaan Golkar. Mari menjadi sahabat pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," tuturnya. (LN/N-3)

Bea Cukai Sita Benih Lobster Senilai Rp2,9 Miliar

PENYELUNDUP benih lobster terus beraksi. Pekan ini mereka berupaya mengirim benih lobster ke Vietnam setelah lebih dulu transit di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kewaspadaan petugas di Kantor Bea dan Cukai Juanda, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil menggagalkan upaya itu. Sebanyak 29.250 benih senilai lebih dari Rp2,9 miliar disita.

"Penyelundup mengirim *baby lobster* lewat kargo pesawat Lion Air dari Surabaya tujuan Batam. Namun, petugas yang melakukan pemeriksaan kargo mencurigai sejumlah kantong plastik, yang ketika diperiksa berisi *baby lobster*," kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Juanda, Budi Harjanto, kemarin.

Benih lobster dimasukkan ke 29 kantong plastik. Selain jenis pasir, ditemukan juga jenis mutiara. "Kami berusaha menangkap pemilik barang, tetapi yang bersangkutan tidak muncul," tambah Budi.

Harga benih lobster di dalam negeri masih tinggi mencapai Rp700 ribu per kilogram untuk pasir dan Rp1,5 juta jenis mutiara. (HS/N-3)

Libur Panjang, PT KAI Terapkan Prokes Ketat

LIBUR panjang akhir pekan ini diperkirakan masih akan dimanfaatkan warga untuk berlibur. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, sekaligus membantu pemerintah mengendalikan penjangkitan covid-19, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta akan menjalankan kereta api favorit dengan protokol kesehatna ketat.

Seperti diungkapkan Manajer Humas PT KAI Yogyakarta, Supriyanto, KA yag akan dijalankan antara lain KA Taksaka (Yogyakarta-Gambir), KA Argo Lawu Fakultatif (Solobalapan - Gambir), KA Senja Utama Yogyakarta (Yogyakarta-Pasarsenen), dan KA Senja Utama Solo (Solobalapan-Pasarsenen). Kereta lainnya ialah KA Progo (Lempuyangan-Pasarsenen), KA Sancaka (Yogyakarta-Surabaya Gubeng), dan KA Mutiara Timur (Yogyakarta-Ketapang).

"KA-KA tersebut selama ini hanya beroperasi pada tanggal-tanggal tertentu sambil dilakukan evaluasi mengikuti perkembangan," paparnya.

Ia memastikan pengoperasian kembali sejumlah KA itu akan tetap diikuti dengan protokol pencegahan covid-19 yang ketat. (AU/WJ/AT/N-3)

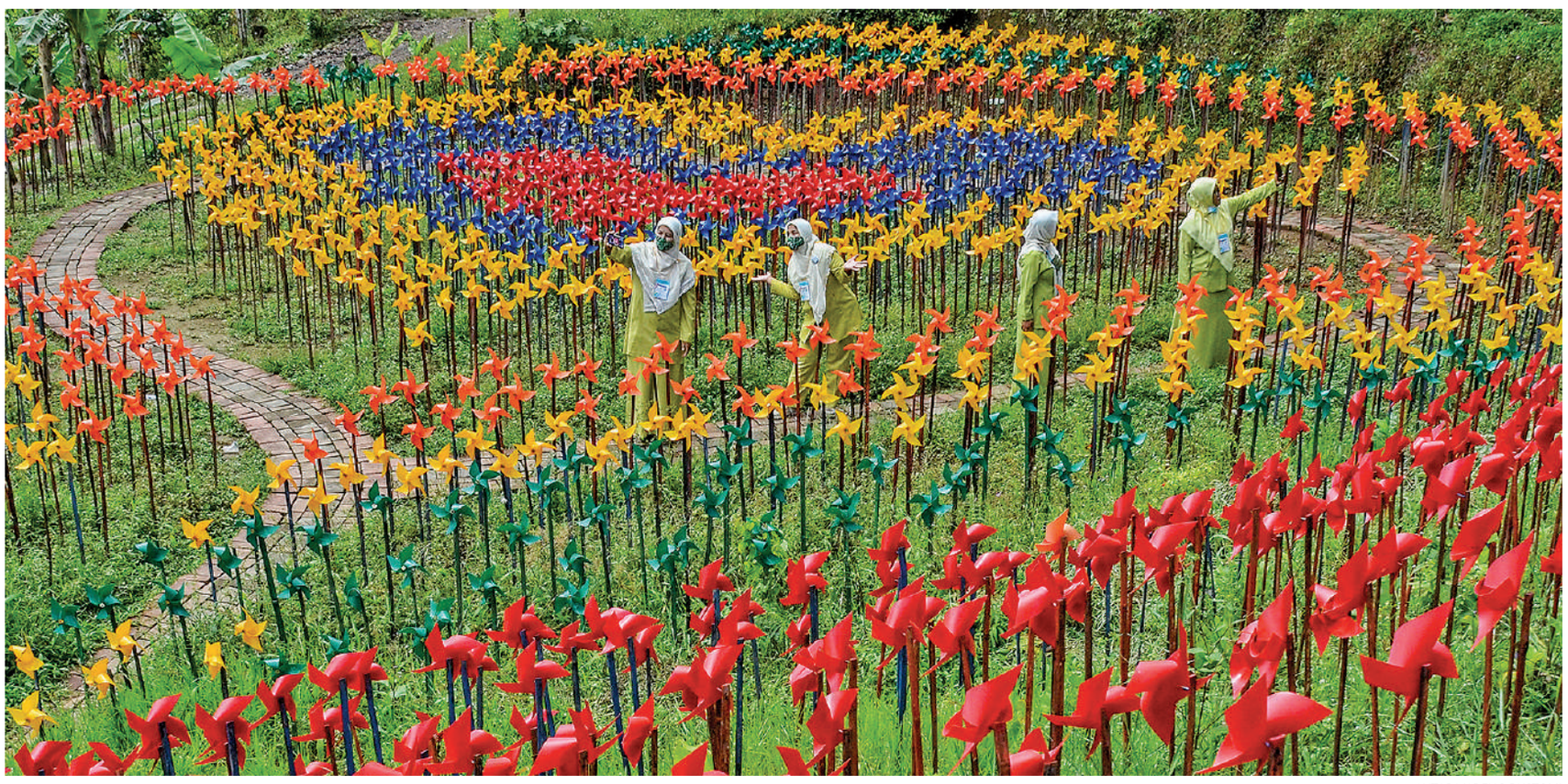

ANTARA/ADENG BUSTOMI

WISATA ALAM TAMAN KINCIR: Pengunjung swafoto di Taman Kincir Jabal Nur, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin. Wisata alam taman kincir warna-warni yang berada di kaki Gunung Talaga Bodas menyajikan 15.000 kincir angin berikut dengan wahana kolam renang, *resto cafe*, penginapan, serta *camping ground*.

Aparat tidak Bekerja Sendiri

Dunia usaha cawe-cawe atasi karhutla. Mereka bergerak mulai pencegahan hingga pemadaman.

Dwi Apriani
dwi.apriani@mediaindonesia.com

LEBIH baik mencegah daripada memadamkan api yang sudah berkobar. Cara itulah yang dipilih Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas untuk membantu aparatur pemerintah bekerja di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Di wilayah kerjanya, di Sumatra Selatan, perusahaan itu mengoptimalkan

program kemitraan dengan masyarakat. Mereka tidak sendiri karena juga melibatkan mitra pemasok.

"Kami mengefektifkan program Desa Makmur Peduli Api (DPMA) untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sudah ada 36 desa di Ogan Komering Ilir dan 31 desa di Musi Banyuasin yang bergabung," papar Head Social & Security APP Sinar Mas, Agung Wiyono, di Palembang, kemarin.

Di kedua kabupaten itu total warga terlibat atau penerima manfaat mencapai 3.300 kepala keluarga. "Program DMPA bertujuan untuk mengajak dan membina masyarakat untuk mengelola lahan secara agroforestri. Mereka tidak membakar lahan dan hutan."

Selain mencegah, perusahaan ini juga tidak berpangku tangan saat api sudah berkobar. "Kami dan mitra mengoptimalkan seluruh sumber daya di darat, air, dan udara untuk mendukung pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan," tambah GM Fire Management Sujica Lusaka.

APP Sinar Mas dan mitra pemasoknya menyiagakan lebih dari 700 personel

pemadam kebakaran, 42 anggota Tim Reaksi Cepat, serta 583 Masyarakat

Peduli Api. Mereka dilengkapi sarana berupa 63 mobil dan 162 sepeda motor patroli, 83 *speed boat*, 4 air *boat* dan 600 pompa pemadam, serta 6 helikopter *water bombing*.

Jet tempur

Di tengah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, Komandan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Marsekal Pertama Andi Kustoro juga mengerahkan dua pesawat tempur. Selain melakukan latihan rutin, para pilot di dalamnya juga ditugaskan melakukan patroli udara.

"Mereka wajib melaporkan titik-titik lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kami berkomitmen membantu upaya pemerintah melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau," tambahnya.

Dalam penerbangan pertama, kemarin, kedua pilot melaporkan adanya kebakaran di Desa Dasar, perbatasan Kabupaten Siak dan Bengkalis. Dari laporan itu, tim penanganan di darat meluncur ke lokasi.

Kemarin, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga darurat kebencanaan kebakaran hutan dan lahan. Status itu berlaku hingga Oktober.

"Penaikan status di tingkat provinsi diambil setelah tiga kabupaten menetapkan status serupa. Kebakaran lahan sudah menyebar di lahan gambut di Kabupaten Muarojambi, Tanjungjabung Timur, dan Tanjungjabung

Barat," papar Sekretaris Daerah Jambi Sudirman.

Penetapan status, lanjutnya, merupakan langkah untuk memudahkan pencegahan, pengendalian, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Kapolda Jambi Irjen A Rachmat Wibowo juga mengaku sudah menggerakkan seluruh polres untuk menghalau potensi kebakaran hutan dan lahan. "Kami juga merangkul masyarakat."

Di Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi terus memperkuat kesiapan. "Gubernur sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran, para bupati dan wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan. Personel sebanyak 8.312 orang sudah siap bergerak," kata Sekda Fahrizal Fitri. (RK/SL/SS/RF/Ant/N-3)

Gotong Royong di Rumah Baru Korban Gempa

SYARIFUDDIN sudah bisa tersenyum lagi. Warga Kelurahan Rimuku, Kecamatan/Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, itu, ialah salah satu penerima bantuan bahan bangunan dari Media Group Peduli.

Rumah pria itu rusak parah akibat gempa bumi yang terjadi pada 15 Januari lalu. "Kami sangat senang, bersyukur ada bantuan ini. Sekarang kami dan keluarga sudah memiliki rumah yang layak huni. Ini bukan hunian sementara, kami bisa menempatinya sebagai hunian tetap," aku Syarifuddin, kemarin.

Di Mamuju dan Majene, Media Group Peduli menyalurkan donasi yang diberikan masyarakat lewat *BenihBaik.com* dan sumbangan dari perusahaan jamu terkemuka, Sido Muncul. Bantuan diarahkan untuk perbaikan rumah.

Seperti Syarifuddin, sejumlah korban memanfaatkan bantuan material bangunan bukan untuk sekadar membangun hunian sementara. Di atas lahan mereka yang lama, warga bisa mendirikan hunian tetap.

Dari Mamuju, tim Tanggap Bencana Media Group Peduli juga bergerak ke Majene. Mereka menyisir warga di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda. Selain menyalurkan bantuan material, tim juga membantu warga membangun rumah baru.

"Kami hanya membantu sebagian kecil korban bencana. Kami berharap para korban bisa menata kembali kehidupan mereka setelah memiliki rumah lagi," kata Ketua Yayasan Media Group, Ali Sadikin.

Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat memilih mengalirkan bantuan untuk korban banjir bandang. Bentuknya beras untuk 46 kepala keluarga di Desa Done, Kecamatan Magepanda.

"Ini ialah kepedulian seorang kader NasDem terhadap warga yang tengah dirundung kemalangan," kata Ketua NasDem Sikka Romanus Woga, yang mewakili Julie menyerahkan bantuan kepada korban.

Korban bencana juga terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahun ini pemprov menyediakan anggaran perbaikan rumah bagi warga yang terkena bencana.

"Bantuan diberikan pascabencana setelah evakuasi selesai. Tahun ini, sebanyak 150 rumah yang rusak akibat bencana akan diperbaiki dengan dana APBD," kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Boy Iman Nugraha. (MT/GL/BY/AS/N-2)

MI/DEPI GUNAWAN

KADIN TEMUI RIDWAN KAMIL: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) berjalan bersama Wakil Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie seusai menggelar pertemuan di kediaman resmi gubernur, di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Ridwan Kamil berharap pemberdayaan ekonomi Jawa Barat bisa diakselerasikan melalui Kadin.

Setoran Bandar Narkoba Mengalir ke Anggota Polri

SAAT kebanyakan anggota Polri bekerja keras menangkal peredaran narkoba, sejumlah polisi di Surabaya, Jawa Timur, memilih berada di sisi bandar. Mereka diduga menerima setoran dari bandar narkoba.

"Jumlahnya lebih dari tiga orang. Ada beberapa orang," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Gatot Repli Handoko, kemarin.

Para polisi itu bertugas di jajaran Polrestabes Surabaya. Mereka tercatat sebagai anggota di Polsek Bubutan dan Polsek Simokerto.

"Penyelidikan dan penyidikan sedang dilakukan Propam Polda Jawa Timur," tambah Gatot.

Saat dihubungi, Wakil Kepala Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Hartoyo membenarkan sejumlah anggotanya terlibat dalam permainan tercela bersama bandar narkoba. "Mereka dalam proses pemeriksaan."

Ia menuturkan keterlibatan para anggota itu terungkap saat Tim Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya menelisik jaringan narkoba Kelompok Madura dan Surabaya. Setelah melakukan penangkapan, dalam pemeriksaan di Kelompok Madura terungkap adanya beberapa anggota polisi yang menerima setoran dari mereka. Setoran diterima dalam kurun tertentu secara rutin.

"Kami akan memproses mereka secara tegas. Polisi yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba, sanksinya pemecatan dengan tidak hormat. Tidak peduli dia perwira atau brigadir," tegas Hartoyo.

Meski diguncang kabar tidak sedap, anggota Polri di jajaran Polda Jawa Timur tetap bekerja keras menangkal peredaran narkoba. Salah satu dilakukan Polres Tulungagung.

Dalam dua bulan terakhir, mereka telah menangkap 45 pengedar narkoba. Omzet para pengedar mencapai ratusan juta rupiah.

"Para pelaku ini ditangkap pada waktu dan dengan kasus berbeda.

Sembilan di antaranya merupakan residivis yang sudah beberapa kali keluar-masuk penjara," tutur Kapolres AKB Handono Subiakto. (FL/Ant/N-2)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI TIM PENGADAAN TANAH PELEBARAN JALAN TOL TANGERANG-MERAK
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, Tlp. (021) 72796042, email : ppbj.tangmer@yahoo.com

PENGUMUMAN SELEKSI PRAKUALIFIKASI JASA KONSULTANSI
Nomor : PB.03.01/TPT-TM/PPBJ/III/10032021

Berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 500.12/322-36.04/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, maka Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Tim Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Tol Tangerang- Merak, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan Seleksi Prakualifikasi Jasa Konsultansi untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut:

1. **Paket Pekerjaan**
   Nama Paket Pekerjaan : **PENGADAAN JASA PENILAI GANTI KERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PIPITAN KECAMATAN WALANTAKA, KELURAHAN TAMAN BARU KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG DAN DESA UNDAR - ANDIR KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEKERJAAN PENAMBAHAN LAJUR KE - 4 JALAN TOL TANGERANG-MERAK TAHAP II DAN TAHAP III TAHUN 2021**
   Nilai Tolat HPS : **Rp. 248.849.260,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)**
   Sumber Pendanaan : Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Tangerang-Merak oleh Badan Usaha Jalan Tol PT. Marga Mandalasakti
   Tahun : 2021
2. **Persyaratan Peserta**
   Paket pekerjaan terbuka untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi persyaratan kualifikasi Bidang Layanan Jasa Penilai Publik yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan serta lisensi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk memberikan jasa penilaian pada pengadaan tanah.
3. **Jadwal Pelelangan**
   a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi mulai tanggal **10 Maret 2021 s.d. 24 Maret 2021 pukul 09.00 – 15.00 WIB**, bertempat di Ruang Subdit Pengadaan Tanah, Gedung Bina Marga Lantai IV, Kementerian PUPR, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
   b. Penyedia jasa konsultansi dapat mendaftar di alamat tersebut di atas dengan membawa salinan izin usaha dari Menteri Keuangan serta lisensi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI yang masih berlaku dan bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang mendaftar selain Pemimpin atau Pemimpin Rekan yang namanya tercantum dalam Akta Izin Usaha dimaksud, wajib membawa surat kuasa bermaterai dari pimpinan.
   c. Dokumen kualifikasi dapat diambil saat pendaftaran.
   d. Batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi : **25 Maret 2021 pukul 16.30 WIB**
   e. Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada panitia pengadaan.
4. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) Penyedia Jasa dalam mendaftar dan mengambil dokumen.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 10 Maret 2021
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
pada Tim Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Tol Tangerang-Merak

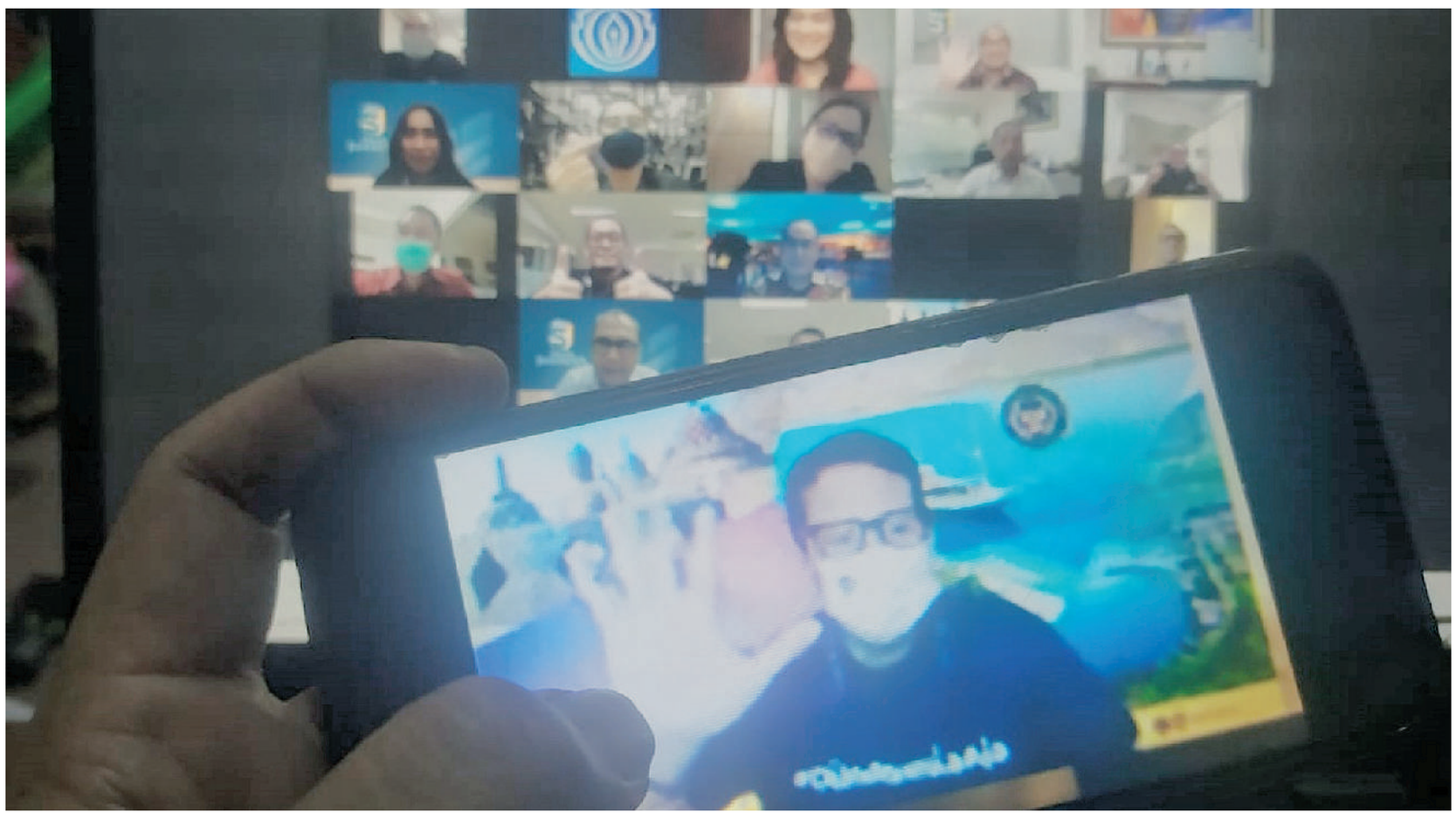

MI/AGUNG W

VIRTUAL MEETING MEDIA GROUP: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyapa jajaran redaksi Media Group saat *virtual meeting* Media Group dengan Menparekraf, kemarin. Kemenparekraf tengah menyiapkan empat daerah untuk proyek percontohan (*pilot project*) dalam menyambut wisatawan mancanegara (wisman) melalui program *free covid corridors* (FCC).

Pertumbuhan Listrik Membaik

Pada periode April 2020 hingga Januari 2021, stimulus listrik telah diberikan kepada 33,04 juta pelanggan senilai Rp14,24 triliun.

M Iqbal Al Machmudi
iqbal@mediaindonesia.com

TREN pemulihan tampak pada pemakaian listrik oleh masyarakat dan industri. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat pertumbuhan listrik secara nasional sudah mulai membaik.

"Februari tumbuh 1,24% secara nasional. (Pertumbuhan di) Februari ada penurunan yang cukup signifikan karena di akhir Januari dan Februari ada banjir dan kejadian alam," ujar Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril di Kantor Pusat PLN, Jakarta, kemarin.

Bob menjelaskan, di awal pandemi kemarin konsumsi listrik tergerus parah. Namun, memasuki Oktober pertumbuhan listrik mulai terasa. Pada April 2020 pertumbuhan listrik khususnya di sektor industri minus 8%. Saat ini pertumbuhan listrik sudah membaik di minus 1%.

"Artinya pertumbuhannya tetap positif meski secara nasional masih minus," ujar Bob.

Bob menyatakan PLN tetap optimistis pertumbuhan konsumsi listrik akan membaik dan bisa kembali positif di angka 3%.

"Kita optimistis tahun ini tumbuh 3%. Oktober-Desember, meski masih minus, ada pertumbuhan di sektor industri," tandas Bob.

Pemberian stimulus

Di sisi lain, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan pemberian stimulus diskon tarif listrik, pembebasan biaya beban atau abonemen, dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum kepada masyarakat dan pelaku usaha pada triwulan II atau periode April sampai Juni 2021.

"Pemerintah terus berkomitmen memberikan stimulus untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan, serta kelompok industri dan komersial dalam menghadapi masa pendemi covid-19," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM.

Pada periode April 2020 hingga Januari 2021, stimulus listrik telah diberikan kepada 33,04 juta pelanggan senilai Rp14,24 triliun.

Stimulus tarif tenaga listrik yang diberikan pemerintah ini bersifat sementara, tidak permanen. Mulai triwulan II 2021, stimulus yang diberikan sebesar 50% dari stimulus yang diterima sebelumnya.

"Dengan membaiknya perekonomian nasional, diputuskan pemberian diskon tarif untuk golongan rumah tangga, industri, dan bisnis kecil 450 VA akan diberikan 50%, tidak lagi 100%. Selain stimulus, juga tetap menerima subsidi," ujar Rida.

Hal itu diputuskan sesuai rapat koordinasi tiga menteri, yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN, pada 2 Maret 202 yang membahas kebijakan subsidi listrik dan program stimulus sektor ketenagalistrikan.

PLN siap menjalankan keputusan pemerintah untuk terus memberikan stimulus listrik bagi masyarakat kecil, pelaku usaha dan sosial yang terdampak covid-19. "Karena sifatnya perpanjangan, saya yakin penyaluran akan berjalan lancar," ujar Bob Saril. (Ant/E-1)

Sandiaga Siapkan Pilot Project buat Wisman

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno tengah menyiapkan empat daerah untuk uji coba pariwisata bagi wisatawan mancanegara (wisman) di masa pandemi covid-19.

Lewat program *free covid corridors* (FCC) yang tengah dirancang kementeriannya, wisman dapat berpelesiran di kawasan yang sudah berkategori zona hijau.

"Saya sudah melaporkannya ke Pak Presiden Joko Widodo, pembukaan (wisata) ini kita lakukan bertahap. Pembukaan itu dengan *green zone corridor arrangement*. Itu bisa digagas di Bali, Sulawesi Utara, Batam, dan Bintan (Kepulauan Riau) sebagai *pilot project*," kata Sandiaga dalam *virtual meeting* dengan Media Group, kemarin.

Dia menerangkan, rencana itu akan diawali dengan pemberian vaksin terhadap pelaku pariwisata di empat daerah tersebut.

"Dengan poin fundamental itu, kami berharap kesiapan *re-open tourism* bisa cepat. Sekitar 21 juta hingga 22 juta pelaku ekonomi kreatif, dengan mayoritas dari pelaku UMKM, sangat menggantungkan nasib mereka di sektor itu. Kuncinya adalah terus adaptasi, kolaborasi, dan inovasi," jelas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia menyebut program wisata yang disiapkannya, *free covid corridor*, saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Indonesia baru membuka perbatasan jika aspek kesehatan sudah benar-benar terjamin.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pemberitaan *Media Indonesia* Gaudensius Suhardi mengapresiasi langkah Sandiaga yang dalam beberapa waktu belakangan kerap berkantor di Bali pada akhir pekan.

Selain menyerap aspirasi pelaku pariwisata di sana, langkah Sandiaga itu sekaligus membangun kepercayaan publik akan pariwisata yang aman dan nyaman di masa pandemi.

"Terobosan yang digaungkan Mas Sandiaga ini harus didukung banyak pihak. Kalau bisa, selain buka kantor di Bali, mudah-mudahan bisa juga di Labuan Bajo untuk mendongkrak pariwisata di sana," ujarnya. (Ins/E-2)

Daya Beli masih Lemah Ekspansi Bisnis belum Terlihat

PELAKU usaha masih mencermati dampak dari stimulus yang digelontorkan pemerintah terhadap dunia usaha. Pasalnya, hingga penghujung kuartal I 2021, dampaknya belum terlihat signifikan.

"Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih lemah menjadi dasar ekspansi bisnis pada awal tahun ini belum sesuai harapan," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, kemarin.

Dalam pengamatannya, rendahnya suku bunga acuan yang dikeluarkan Bank Indonesia juga belum direspons cepat oleh perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit.

"Kami melihat stimulus ekonomi melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih sangat dibutuhkan, terutama yang terkait dengan bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan program padat karya," ujarnya.

Stimulus PEN, ujar Nico, masih cukup efektif mendorong kembali belanja masyarakat level bawah karena kecenderungan konsumsinya lebih tinggi. Hal itu berdasarkan karakteristik masyarakat menengah-bawah yang jika mendapatkan uang langsung membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di kesempatan berbeda, dalam Rakornas Penanganan Bencana Tahun 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada lagi program perlindungan sosial berupa subsidi gaji di 2021. Pemerintah fokus mendorong sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini.

"Perlindungan sosial di tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji, tetapi untuk tahun ini kita dorong lebih ke sektor yang produktif," ungkapnya.

Sektor produktif yang didorong, lanjutnya, merupakan sektor padat karya seperti pertanian hingga infrastruktur. Selain itu, sektor UMKM untuk mengurangi angka pengangguran dan tetap meningkatkan daya beli masyarakat. (Try/Van/E-2)

Didukung Insentif PPN, Wish for Home Raup Rp210 Miliar

SINAR Mas Land meraup penjualan dari Wish for Home sebanyak Rp210 miliar dalam dua hari (7-8 Maret 2021) setelah program itu diluncurkan secara resmi, Sabtu (6/3).

Lewat Wish for Home yang merupakan program penjualan terbaru perusahaan properti nasional tersebut, Sinar Mas Land berupaya memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli hunian.

"Program tersebut berlangsung hingga akhir tahun ini dan dibagi menjadi tiga periode, yaitu 6 Maret-30 Juni, 1 Juli-30 September, dan 1 Oktober-31 Desember. Besaran promo paling tinggi ditawarkan pada periode pertama selama 6 Maret-30 Juni dan semakin berkurang dalam periode selanjutnya," papar Managing Director Sinar Mas Land Alim Gunadi dalam keterangan resminya, kemarin.

Dalam catatannya, 107 unit terjual dalam dua hari setelah peluncuran Wish for Home. Sejumlah klaster telah habis terjual, antara lain Aure, Amata, Savia Park, dan Visana, yang terdapat di BSD City. Selain itu, klaster Nebraska di Kota Wisata (Cibubur) dan Da Vinci di Legenda Wisata (Cibubur) juga sudah ludes terjual.

"Antusiasme masyarakat itu tak lepas dari berbagai keringanan pembayaran yang diberikan Wish for Home, baik pembelian secara tunai maupun KPR Express," ujar Alim.

Keringanan itu, sambungnya, mencakup keringanan sampai dengan 15%, insentif huni/insentif bangun hingga 10%, gratis BPHTB, keringanan DP sampai dengan 15%, subsidi cicilan KPR, gratis biaya pengalihan, gratis biaya KPR/KPA, dan diskon tambahan untuk beberapa produk pilihan.

Kemudahan itu masih didukung oleh kebijakan pemerintah yang menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk hunian hingga seharga Rp5 miliar dan Bank Indonesia yang juga menurunkan suku bunga acuan agar kredit perbankan semakin terjangkau.

"Sekarang memang waktu yang tepat membeli properti karena didukung kebijakan pemerintah berupa keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) sehingga memudahkan masyarakat memiliki hunian," ujarnya. (RO/E-2)

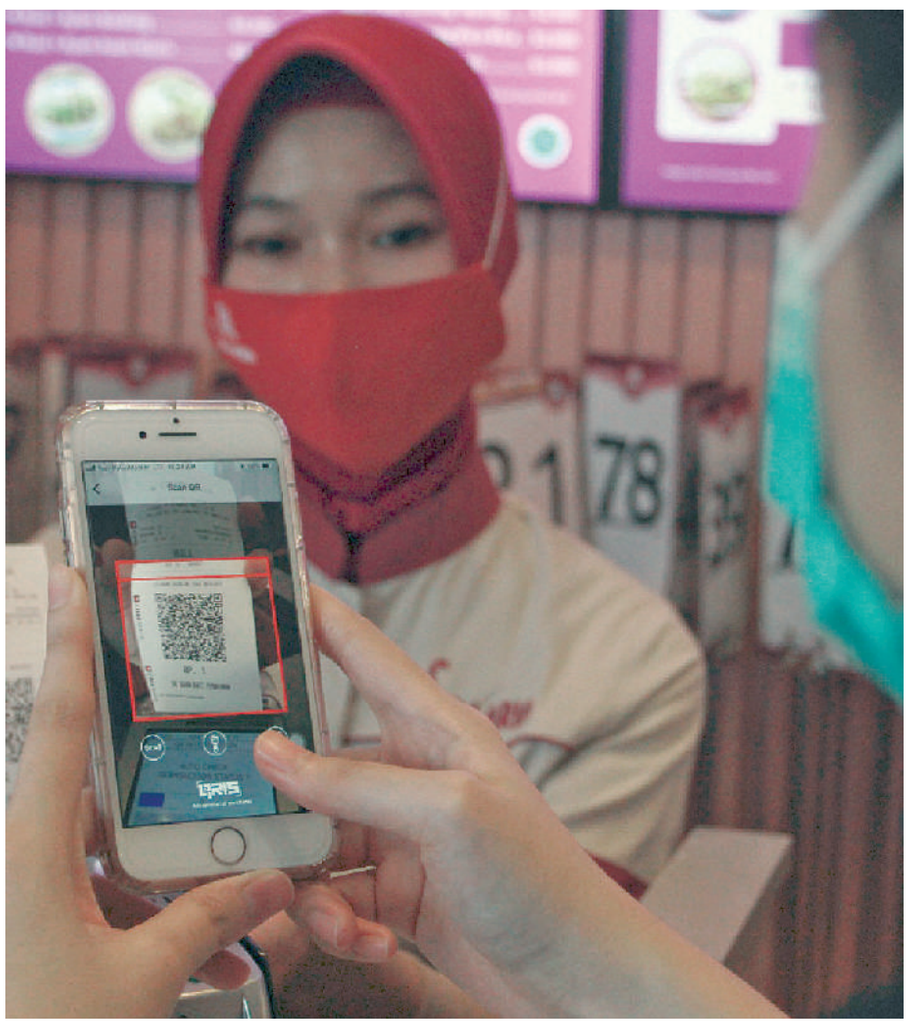

ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

QRIS OCTO MOBILE: Nasabah bank melakukan transaksi pembayaran menggunakan *scan* QRIS OCTO Mobile saat bertransaksi di Restoran Bintaro Jaya Mall, Tangerang Selatan, kemarin. CIMB Niaga mendorong nasabah selalu bertransaksi secara *cashless* dan *contactless* dengan *scan* QRIS OCTO Mobile dari *smartphone* sehingga lebih praktis dan mudah tanpa perlu membawa uang tunai atau mengeluarkan kartu debit/kartu kredit. Nasabah juga dapat menikmati program *cashback* hingga 30% di *merchant-merchant* yang telah bekerja sama.

Obligasi Indonesia Tetap Memikat di 2021

Real yield yang ditawarkan obligasi Indonesia masih di atas 400 bps, yakni sekitar 4,4%.

Fetry Wuryasti
fetry@mediaindonesia.com

POTENSI pasar obligasi Indonesia diprediksi masih positif pada 2021. Beberapa faktor menjadi pertimbangan tersebut. Salah satunya ialah imbal hasil (*yield*) obligasi Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain masih relatif lebih memikat atau cukup tinggi.

"*Real yield* yang ditawarkan obligasi Indonesia masih di atas 400 bps, yaitu sekitar 4,4%. *Real yield* ini adalah selisih dari imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi dikurangi dengan tingkat inflasi di negara yang bersangkutan," kata Head of Fixed Income Portofolio Allianz Life Indonesia Fitri Lindawati dalam webinar Outlook 2021 Allianz Indonesia, kemarin.

Dia menyebutkan di Malaysia *real yield* 4,2%, Meksiko 2%, Tiongkok 3,9%, dan Brasil 2,9%. Namun, *real yield* obligasi Indonesia masih di bawah Afrika Selatan yang sebesar 5,5%.

Faktor lainnya ialah likuiditas sektor perbankan yang masih cukup besar karena masih melambatnya pertumbuhan kredit sehingga perbankan menggunakan likuiditas tersebut untuk membeli obligasi di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan aliran keluar dana asing yang terjadi di 2020. Mereka melihat masih belum terjadi pembalikan atau masuk kembali ke pasar obligasi Indonesia. "Kami melihat bahwa hal tersebut probabilitasnya masih cukup tinggi," kata Fitri.

Lalu defisit fiskal di 2021 memang masih berada di kisaran 5,7% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, defisit itu masih bisa dikelola dan dampaknya terhadap kemungkinan pengeluaran obligasi Indonesia masih *managable* dan bisa dikontrol pemerintah Indonesia.

Maka, potensi pasar obligasi tahun ini masih cukup bagus jika dibandingkan dengan di 2020 meskipun masih akan terlihat asing keluar dari pasar obligasi.

"Namun, bila kami berbicara dengan beberapa pelaku asing, mereka masih melihat bahwa potensi Indonesia masih positif karena memang *prudent*-nya kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia," kata Fitri.

Tahun lalu, ketika terjadi kenaikan *yield* obligasi yang cukup tinggi, pemerintah dan Bank Indonesia sigap mengeluarkan skema *burden sharing* sehingga *yield* obligasi masih cukup terjaga.

"Jadi, kami melihat tahun ini ada kemungkinan dana asing akan masuk ke pasar obligasi Indonesia jika mereka melihat *yield* sudah cukup menarik menurut pandangan mereka," tukas Fitri.

Kurs rupiah

Sementara itu, masih tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) membuat nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta kemarin sore ditutup melemah. Rupiah ditutup melemah 0,31% atau 45 poin ke posisi 14.405 per dolar AS dari posisi penutupan hari sebelumnya 14.360 per dolar AS.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan pelemahan rupiah terjadi akibat tren penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia di tengah tren peningkatan imbal hasil *US treasury* sebesar 47 bps sejak akhir Januari 2021.

Imbal hasil obligasi AS tenor saat ini masih berada di level 1,53% meski sebelumnya sempat mencapai level 1,6%. Masih adanya potensi kenaikan imbal hasil obligasi AS juga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup turun, kemarin.

IHSG ditutup melemah 48,82 poin atau 0,78% ke posisi 6.199,65. Adapun kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 12,38 poin atau 1,32% ke posisi 927,85.

"Pelemahan IHSG salah satunya dipicu masih ada potensi tren kenaikan dari *US treasury 10 year*," kata analis Bina Artha Sekuritas, Nafan Aji. (Des/Ant/E-3)

OJK Keluarkan Aturan Disiplinkan Emiten

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pembaruan aturan melalui POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Di dalam aturan baru ada sejumlah perubahan yang bertujuan melindungi investor ritel di pasar modal, mendisiplinkan emiten, dan mengakomodasi hal-hal baru dan perkembangan industri sektor jasa keuangan secara global.

Beberapa aturan yang berubah, yaitu jumlah modal disetor bagi bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

"Ada penyesuaian nilai denda untuk keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat. Denda kami naikkan dari aturan lama karena mengikuti perkembangan zaman," kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana dalam webinar, kemarin.

Perincian denda yang harus dibayarkan ialah untuk pihak *self regulatory organization* (SRO) dari sebelumnya Rp500 ribu menjadi Rp1 juta per hari. Kemudian denda bagi emiten dari Rp1 juta per hari menjadi Rp2 juta per hari.

Lalu denda bagi emiten kecil hingga menengah menjadi Rp1 juta per hari, perusahaan publik Rp500 ribu per hari, bagi profesi penunjang pasar modal sebesar Rp100 ribu per hari dan maksimal Rp100 juta, serta denda bagi penasihat investasi (PI), biro administrasi efek (BAE), pemeringkat efek (PE), wakil perusahaan efek (WPE), dan lembaga penunjang pasar modal lainnya sebesar Rp200 ribu per hari.

"Denda lebih besar lagi bila laporan dan pengumuman tidak diserahkan sama sekali," kata Djustini.

Djustini menegaskan, salah satu tujuan hal itu dibuat ialah melindungi investor ritel sebab selama ini emiten yang melakukan *delisting* atau penghapusan pencatatan saham sangat merugikan investor ritel karena saham yang dibeli tak lagi bernilai.

"Dengan ketentuan ini kita memberikan syarat untuk mewajibkan emiten-emiten tersebut membeli kembali saham," kata Djustini. (Try/E-1)

Kartu Kredit BNI JCB Raih Dua Penghargaan

KARTU kredit BNI JCB, yang merupakan hasil kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) dan PT JCB International Indonesia, perusahaan merek pembayaran terkemuka yang berkantor pusat di Jepang, meraih dua penghargaan pada ajang JCB Indonesia Award 2020 yang digelar secara daring di Jakarta, kemarin.

Kartu kredit BNI JCB memenangi penghargaan untuk kategori internasional, yakni The 3rd Best of Issuing Sales Volume in Southeast Asian Countries 2020 dan kategori Indonesia sebagai Best Total Number of Cards in Circulation in Indonesia 2020.

Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies mengapresiasi penghargaan tersebut. Corina mengungkapkan penghargaan tersebut menjadi lebih istimewa karena diraih di tengah kondisi perekonomian global yang menantang akibat pandemi covid-19.

Kendati menghadapi tantangan berat, pada 2020 *outstanding* kartu kredit BNI JCB mencatatkan pertumbuhan 2,15% jika dibandingkan dengan pencapaian di periode yang sama pada 2019.

"Sejak kerja sama dilakukan tahun 2014, BNI dan JCB telah banyak melakukan kolaborasi program untuk akuisisi maupun *usage* yang bertujuan meningkatkan jumlah kartu dan *sales volume*, termasuk melakukan *event* Japan Travel Fair," jelas Corina.

Dia menambahkan Jepang merupakan salah satu negara favorit tujuan wisatawan Indonesia. Itulah alasan BNI bekerja sama dengan JCB karena melihat adanya potensi yang dapat digarap dari segmen tersebut.

Secara terpisah, Bank Mandiri dan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) meluncurkan kartu E-Money Co-Branding Commuterpay edisi Yogyakarta-Solo. Dengan kartu itu, transaksi pembayaran pada *gate* stasiun di sepanjang wilayah Yogya-Solo dapat dilakukan secara nontunai.

Peluncuran kartu ini dilakukan oleh Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto dan Dirut KAI Commuter Wiwik Widayanti di Jakarta, kemarin. (Ant/Des/E-3)

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN MALAYAN BANKING BERHAD
PERUSAHAAN INDUK PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Jakarta, 10 Maret 2021
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Taswin Zakaria
Presiden Direktur

Thilagavathy Nadason
Direktur Keuangan

Maybank
www.maybank.com

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", di bawah ini adalah informasi keuangan yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Malayan Banking Berhad yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Malayan Banking Berhad disusun berdasarkan *chapter 9, part K of the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, MFRS 134 Interim Financial Reporting* dan *IAS 34 Interim Financial Reporting*.

Laporan keuangan di bawah ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Maybank Indonesia Tbk per 31 Desember 2020 yang telah dipublikasikan melalui surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 19 Februari 2021.

MALAYAN BANKING BERHAD
(Incorporated in Malaysia)
AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020

	31 December 2020 (RM'000)	31 December 2019 (RM'000)
ASSETS		
Cash and short-term funds	**43,884,714**	46,469,074
Deposits and placements with financial institutions	**10,128,931**	14,093,218
Financial assets purchased under resale agreements	**17,543,987**	13,639,082
Financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss	**14,028,031**	14,323,303
Financial investments at fair value through profit or loss	**27,179,846**	20,370,865
Financial investments at fair value through other comprehensive income	**127,502,681**	123,351,533
Financial investments at amortised cost	**46,475,916**	34,784,476
Loans, advances and financing to financial institutions	**899,986**	1,128,618
Loans, advances and financing to customers	**511,310,107**	512,291,092
Derivative assets	**19,907,957**	10,335,629
Reinsurance/retakaful assets and other insurance receivables	**5,778,581**	4,232,089
Other assets	**10,236,874**	9,479,084
Investment properties	**941,545**	921,471
Statutory deposits with central banks	**7,468,213**	15,052,752
Interest in associates and joint ventures	**2,680,402**	2,490,548
Property, plant and equipment	**2,206,849**	2,335,798
Right-of-use assets	**1,245,454**	1,548,208
Intangible assets	**6,648,504**	6,836,463
Deferred tax assets	**790,936**	729,712
TOTAL ASSETS	**856,859,514**	834,413,015
LIABILITIES		
Customers' funding :		
- Deposits from customers	**556,349,372**	544,530,912
- Investment accounts of customers	**23,840,796**	20,737,670
Deposits and placements from financial institutions	**37,878,866**	43,557,209
Obligations on financial assets sold under repurchase agreements	**11,131,215**	13,978,744
Derivative liabilities	**19,151,751**	11,182,307
Financial liabilities at fair value through profit or loss	**10,161,921**	6,530,753
Bills and acceptances payable	**997,663**	1,291,814
Insurance/takaful contract liabilities and other insurance payables	**37,694,765**	30,885,630
Other liabilities	**21,027,915**	21,569,527
Recourse obligation on loans and financing sold to Cagamas	**-**	1,526,225
Provision for taxation and zakat	**151,919**	187,061
Deferred tax liabilities	**1,470,856**	878,276
Borrowings	**38,097,224**	41,339,415
Subordinated obligations	**8,967,831**	9,321,125
Capital securities	**2,827,793**	2,827,123
TOTAL LIABILITIES	**769,749,887**	750,343,791
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE BANK		
Share capital	**48,280,355**	48,280,355
Retained profits	**29,494,627**	27,162,899
Reserves	**6,661,665**	6,127,684
	84,436,647	81,570,938
Non-controlling interests	**2,672,980**	2,498,286
	87,109,627	84,069,224
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	**856,859,514**	834,413,015
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES	**1,305,384,589**	1,208,622,674

(These audited condensed interim financial statements should be read in conjunction with the audited annual financial statements for the financial year ended 31 December 2019).

MALAYAN BANKING BERHAD
(Incorporated in Malaysia)
AUDITED INCOME STATEMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

	1 January 2020 to 31 December 2020 (RM'000)	1 January 2019 to 31 December 2019 (RM'000)
Interest income	**19,350,764**	24,131,021
Interest expense	**(8,260,375)**	(12,036,016)
Net interest income	**11,090,389**	12,095,005
Income from Islamic Banking Scheme operations	**6,135,582**	5,979,577
Net earned insurance premiums	**9,458,856**	6,760,618
Other operating income	**7,299,202**	7,276,998
Total operating income	**33,984,029**	32,112,198
Net insurance benefits and claims incurred, net fee and commission expenses, change in expense liabilities and taxation of life and takaful fund	**(9,220,803)**	(7,371,318)
Net operating income	**24,763,226**	24,740,880
Overhead expenses	**(11,245,177)**	(11,561,939)
Operating profit before impairment losses	**13,518,049**	13,178,941
Allowances for impairment losses on loans, advances, financing and other debts, net	**(4,598,581)**	(2,287,490)
(Allowances for)/writeback of impairment losses on financial investments, net	**(413,918)**	20,400
Allowances for impairment losses on other financial assets, net	**(57,741)**	(56,344)
Operating profit	**8,447,809**	10,855,507
Share of profits in associates and joint ventures	**209,147**	158,373
Profit before taxation and zakat	**8,656,956**	11,013,880
Taxation and zakat	**(1,937,877)**	(2,538,231)
Profit for the financial year	**6,719,079**	8,475,649
Attributable to:		
Equity holders of the Bank	**6,481,219**	8,198,074
Non-controlling interests	**237,860**	277,575
	6,719,079	8,475,649
Earnings per share attributable to equity holders of the Bank		
Basic / diluted	**57.66 sen**	73.45 sen

MALAYAN BANKING BERHAD
(Incorporated in Malaysia)
AUDITED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

	1 January 2020 to 31 December 2020 (RM'000)	1 January 2019 to 31 December 2019 (RM'000)
Profit for the financial year	**6,719,079**	8,475,649
Other comprehensive income/(loss):		
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:		
Defined benefit plan actuarial gain	**15,586**	4,905
Income tax effect	**(6,911)**	337
Net gain from change in fair value on equity instruments at fair value through other comprehensive income	**57,365**	20,918
	66,040	26,160
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss :		
Net gain on debt instruments at fair value through other comprehensive income	**1,484,970**	2,546,409
- Net gain from change in fair value	**1,566,740**	2,829,231
- Changes in expected credit losses	**245,897**	390,646
- Income tax effect	**(327,667)**	(673,468)
Net (loss)/gain on foreign exchange translation	**(484,026)**	537,081
Net loss on cash flow hedge	**-**	(433)
Net gain on net investment hedge	**2,922**	1,556
Cost of hedging for fair value hedge	**13,150**	(345)
Net (loss)/gain on capital reserve	**(2,446)**	908
Share of change in associates' reserve	**15,454**	(239,822)
	1,030,024	2,845,354
Other comprehensive income for the financial year, net of tax	**1,096,064**	2,871,514
Total comprehensive income for the financial year	**7,815,143**	11,347,163
Other comprehensive income for the financial year, attributable to:		
Equity holders of the Bank	**1,093,958**	2,818,869
Non-controlling interests	**2,106**	52,645
	1,096,064	2,871,514
Total comprehensive income for the financial year, attributable to:		
Equity holders of the Bank	**7,575,177**	11,016,943
Non-controlling interests	**239,966**	330,220
	7,815,143	11,347,163

MALAYAN BANKING BERHAD
(Incorporated in Malaysia)
AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

	Attributable to equity holders of the Bank										
		Non-Distributable									
	Share Capital (RM'000)	Statutory Reserve (RM'000)	Regulatory Reserve (RM'000)	Fair Value Through Other Comprehensive Income Reserve (RM'000)	Exchange Fluctuation Reserve (RM'000)	ESGP Reserve (RM'000)	Other Reserves (RM'000)	Retained Profits * (RM'000)	Total Shareholders' Equity (RM'000)	Non-Controlling Interests (RM'000)	Total Equity (RM'000)
At 1 January 2020	**48,280,355**	**279,355**	**2,771,806**	**2,973,151**	**399,826**	**37,195**	**(333,649)**	**27,162,899**	**81,570,938**	**2,498,286**	**84,069,224**
Profit for the financial year	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,481,219**	**6,481,219**	**237,860**	**6,719,079**
Other comprehensive income/(loss)	**-**	**-**	**-**	**1,600,503**	**(527,393)**	**-**	**20,848**	**-**	**1,093,958**	**2,106**	**1,096,064**
Defined benefit plan actuarial gain	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,928**	**-**	**6,928**	**1,747**	**8,675**
Share of associates' reserve	**-**	**-**	**-**	**64,691**	**(49,237)**	**-**	**-**	**-**	**15,454**	**-**	**15,454**
Net loss on foreign exchange translation	**-**	**-**	**-**	**-**	**(478,156)**	**-**	**-**	**-**	**(478,156)**	**(5,870)**	**(484,026)**
Net gain on financial investments at fair value through other comprehensive income	**-**	**-**	**-**	**1,535,812**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,535,812**	**6,523**	**1,542,335**
Net gain on net investment hedge	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,922**	**-**	**2,922**	**-**	**2,922**
Cost of hedging for fair value hedge	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,150**	**-**	**13,150**	**-**	**13,150**
Net loss on capital reserve	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,152)**	**-**	**(2,152)**	**(294)**	**(2,446)**
Total comprehensive income/(loss) for the financial year	**-**	**-**	**-**	**1,600,503**	**(527,393)**	**-**	**20,848**	**6,481,219**	**7,575,177**	**239,966**	**7,815,143**
Net gain on disposal of financial investments at fair value through other comprehensive income	**-**	**-**	**-**	**(1,085)**	**-**	**-**	**-**	**1,085**	**-**	**-**	**-**
Share-based payment under Maybank Group Employees' Share Grant Plan ("ESGP")	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,991**	**-**	**-**	**58,991**	**-**	**58,991**
Effect of changes in corporate structure within the Group	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,235**	**24,235**
Transfer to statutory reserve	**-**	**38,468**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(38,468)**	**-**	**-**	**-**
Transfer from regulatory reserve	**-**	**-**	**(656,351)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**656,351**	**-**	**-**	**-**
Dividends paid	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(4,384,131)**	**(4,384,131)**	**(89,507)**	**(4,473,638)**
Dividends payable	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(384,328)**	**(384,328)**	**-**	**(384,328)**
Total transactions with shareholders/other equity movements	**-**	**38,468**	**(656,351)**	**(1,085)**	**-**	**58,991**	**-**	**(4,149,491)**	**(4,709,468)**	**(65,272)**	**(4,774,740)**
At 31 December 2020	**48,280,355**	**317,823**	**2,115,455**	**4,572,569**	**(127,567)**	**96,186**	**(312,801)**	**29,494,627**	**84,436,647**	**2,672,980**	**87,109,627**
At 1 January 2019	46,747,442	239,009	2,127,290	457,045	113,510	-	(339,752)	25,985,583	75,330,127	2,407,133	77,737,260
Profit for the financial year	-	-	-	-	-	-	-	8,198,074	8,198,074	277,575	8,475,649
Other comprehensive income	-	-	-	2,526,450	286,316	-	6,103	-	2,818,869	52,645	2,871,514
Defined benefit plan actuarial gain	-	-	-	-	-	-	4,638	-	4,638	604	5,242
Share of associates' reserve	-	-	-	636	(240,458)	-	-	-	(239,822)	-	(239,822)
Net gain on foreign exchange translation	-	-	-	-	526,774	-	-	-	526,774	10,307	537,081
Net gain on financial investments at fair value through other comprehensive income	-	-	-	2,525,814	-	-	-	-	2,525,814	41,513	2,567,327
Net gain on net investment hedge	-	-	-	-	-	-	1,556	-	1,556	-	1,556
Net loss on cash flow hedge	-	-	-	-	-	-	(433)	-	(433)	-	(433)
Cost of hedging for fair value hedge	-	-	-	-	-	-	(345)	-	(345)	-	(345)
Net gain on capital reserve	-	-	-	-	-	-	687	-	687	221	908
Total comprehensive income for the financial year	-	-	-	2,526,450	286,316	-	6,103	8,198,074	11,016,943	330,220	11,347,163
Net gain on disposal of financial investments at fair value through other comprehensive income	-	-	-	(10,344)	-	-	-	10,344	-	-	-
Share-based payment under Maybank Group Employees' Share Grant Plan ("ESGP")	-	-	-	-	-	37,195	-	-	37,195	-	37,195
Effect of changes in corporate structure within the Group	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(128,395)	(128,395)
Transfer to statutory reserve	-	40,346	-	-	-	-	-	(40,346)	-	-	-
Transfer to regulatory reserve	-	-	644,516	-	-	-	-	(644,516)	-	-	-
Issue of shares pursuant to Dividend Reinvestment Plan ("DRP")	1,532,913	-	-	-	-	-	-	-	1,532,913	-	1,532,913
Dividends paid	-	-	-	-	-	-	-	(6,346,240)	(6,346,240)	(110,672)	(6,456,912)
Total transactions with shareholders/other equity movements	1,532,913	40,346	644,516	(10,344)	-	37,195	-	(7,020,758)	(4,776,132)	(239,067)	(5,015,199)
At 31 December 2019	48,280,355	279,355	2,771,806	2,973,151	399,826	37,195	(333,649)	27,162,899	81,570,938	2,498,286	84,069,224

* The retained profits of the Group include the non-distributable non-par surplus from an insurance subsidiary amounted to RM559,6 million (31 December 2019 : RM536,2 million) (net of tax). This non-distributable non-par surplus is only available for distribution to shareholder on the amount recommended by the Appointed Actuary in accordance with the Financial Services Act 2013.

MALAYAN BANKING BERHAD
(Incorporated in Malaysia)
AUDITED COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
AS AT 31 DECEMBER 2020

	31 December 2020			31 December 2019		
	Full Commitment (RM'000)	Credit Equivalent Amount* (RM'000)	Risk-Weighted Amount* (RM'000)	Full Commitment (RM'000)	Credit Equivalent Amount* (RM'000)	Risk-Weighted Amount* (RM'000)
Contingent liabilities						
Direct credit substitutes	**10,940,746**	**9,408,679**	**6,667,779**	11,651,981	10,549,467	6,180,568
Certain transaction-related contingent items	**14,338,122**	**6,901,117**	**4,717,191**	17,933,219	8,010,772	4,956,866
Short-term self-liquidating trade-related contingencies	**2,788,743**	**715,672**	**419,682**	2,963,469	614,984	378,984
	28,067,611	**17,025,468**	**11,804,652**	32,548,669	19,175,223	11,516,418
Commitments						
Irrevocable commitments to extend credit :						
- Maturity within one year	**128,087,058**	**13,806,768**	**4,562,969**	120,543,741	12,568,585	5,201,397
- Maturity exceeding one year	**39,195,697**	**55,482,054**	**26,617,515**	43,154,904	43,431,330	19,424,913
	167,282,755	**69,288,822**	**31,180,484**	163,698,645	55,999,915	24,626,310
Miscellaneous commitments and contingencies	**5,728,133**	**986,226**	**371,132**	8,965,841	836,389	88,766
Total credit-related commitments and contingencies	**201,078,499**	**87,300,516**	**43,356,268**	205,213,155	76,011,527	36,231,494
Derivative Financial Instruments						
Foreign exchange related contracts :						
- Less than one year	**544,059,314**	**8,706,925**	**1,529,800**	538,237,679	5,300,386	897,466
- One year to less than five years	**30,742,568**	**2,619,230**	**1,315,007**	31,495,367	1,856,999	930,782
- Five years and above	**6,596,360**	**958,528**	**335,022**	5,314,451	749,621	314,812
	581,398,242	**12,284,683**	**3,179,829**	575,047,497	7,907,006	2,143,060
Interest rate related contracts :						
- Less than one year	**186,361,268**	**72,980**	**32,188**	78,438,765	263,545	76,054
- One year to less than five years	**221,399,527**	**1,504,867**	**852,397**	256,963,893	1,737,197	1,026,458
- Five years and above	**109,622,660**	**2,168,784**	**1,403,142**	87,560,165	1,861,518	1,238,571
	517,383,455	**3,746,631**	**2,287,727**	422,962,823	3,862,260	2,341,083
Equity and commodity related contracts :						
- Less than one year	**5,383,643**	**245,702**	**101,334**	4,075,338	257,581	150,897
- One year to less than five years	**65,390**	**13,880**	**12,253**	1,260,171	101,036	72,194
	5,449,033	**259,582**	**113,587**	5,335,509	358,617	223,091
Credit related contracts :						
- Less than one year	**75,360**	**-**	**-**	63,690	-	-
Total treasury-related commitments and contingencies	**1,104,306,090**	**16,290,896**	**5,581,143**	1,003,409,519	12,127,883	4,707,234
Total commitments and contingencies	**1,305,384,589**	**103,591,412**	**48,937,411**	1,208,622,674	88,139,410	40,938,728

* The credit equivalent amount and the risk-weighted amount are derived from using the credit conversion factors and risk-weights respectively as specified by Bank Negara Malaysia for regulatory capital adequacy purposes.

Kuala Lumpur, 25 February 2021

Board of Directors
Malayan Banking Berhad

Investor Relations, Sentral Senayan (SS) III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, Telp.: +62 21 2922 8888, Fax : +62 21 2922 8914

INFODEMI

Vaksin Covid-19 Marak di Darknet

TIGA merek vaksin covid-19, yakni Pfizer/BioNTech, Astra Zeneza, dan Moderna marak dijual bebas di pasar gelap *online (darknet).* Peneliti Kaspersky memeriksa 15 pasar berbeda di darknet dan menemukan iklan untuk tiga merek vaksin tersebut.

Peneliti juga mendapati penjual yang mengiklankan vaksin covid-19 yang tidak terverifikasi. Adapun, mayoritas penjual berasal dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Harga per dosis berkisar antara 250 (Rp3,6 juta) hingga US$1.200 (Rp17 juta) dengan biaya rata-rata sekitar US$500 (Rp7 juta).

Pakar keamanan Kaspersky Dmitry Galov mengungkapkan komunikasi di *darknet* dilakukan melalui aplikasi perpesanan terenkripsi, seperti *Wickr* dan *Telegram*, sementara pembayaran diminta dalam bentuk mata uang kripto, terutama bitcoin.

"Mayoritas penjual 'bawah tanah' ini sudah melakukan sekitar 100 hingga 500 transaksi, yang menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan penjualan, sedangkan kejelasan barang tersebut masih belum diketahui efektivitasnya," beber Galov dalam siaran persnya.

Agar terhindar dari penipuan, ahli Kaspersky mengimbau publik untuk tidak membeli produk vaksin sembarangan.

Dalam merespons temuan ini, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi peredaran pasar gelap vaksin covid-19 di Tanah Air.

"Saya berharap ada sejumlah langkah yang bisa memastikan masyarakat mendapatkan vaksin yang aman dan tepat, di tengah maraknya pemberitaan pasar gelap vaksin covid-19 di dunia," tegasnya.

Saat ini pola pasokan vaksin covid-19 di Indonesia disepakati bisa dilakukan oleh pemerintah dengan vaksin gratisnya dan pihak swasta dengan program vaksin gotong-royong. Rerie berharap pengadaan vaksin gotong-royong yang dilakukan pihak swasta diawasi betul untuk mencegah peredaran vaksin covid-19 di pasar gelap.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, jangan sampai vaksin dari pasar gelap ini masuk ke wilayah Indonesia, karena bila aspek keamanan vaksin tidak terjamin, upaya vaksinasi yang dilakukan akan berisiko tinggi terhadap masyarakat. (RO/H-2)

Kalbe Farma Luncurkan Prove Family

SEHAT dan tetap produktif ialah dua hal yang amat dibutuhkan di masa pandemi covid-19. Terkait hal itu, PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) meluncurkan Prove Family yang terdiri atas Prove Family Layanan dan Prove Family Product secara virtual, kemarin.

"Di tengah pandemi covid-19 ini, banyak masyarakat yang harus tetap beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh dengan konsumsi nutrisi sehat, rutin olahraga, dan memenuhi kebutuhan multivitamin," kata Vidi Agiorno Metupawan, Group Product Manager PT Kalbe Farma, Tbk.

Ia menjelaskan, Prove Family Layanan merupakan sarana informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, Prove Family Product ialah solusi multivitamin untuk memenuhi kebutuhan suplemen daya tahan tubuh dalam menghadapi pandemi.

Selain mengonsumsi suplemen, ahli gizi Cindiwaty Josito Pudjiadi mengingatkan penuhi juga kebutuhan nutrisi dengan menerapkan pola makan sehat dan bergizi, serta berolahraga. Hal itu mampu menjaga level imun kita.

Dokter spesialis paru Erlina Burhan menambahkan, vaksinasi juga jangan dilupakan. "Pandemi covid-19 belum selesai sehingga pencegahan menjadi hal yang utama dan salah satu upaya pencegahannya adalah vaksinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujar Erlina. (Fer/H-2)

KEHILANGAN

Hilang BPKB Motor Honda Vario 125cc 2016, Atas Nama : Delina Widiyanti, NoPol: B-3724-SVP Nosin: JFU1E1411920 Noka: MH1JFU111GK417055.

LOWONGAN

Dibthkan 1 Apoteker yg masih aktif dan pernah kerja di pabrik. Lokasi Bekasi-Cikarang. CV email:Frj7272@gmail.com

SEGERA DILELANG
DENGAN HARGA MENARIK
TANAH & BANGUNAN
LT: 98.800 M2
LB: ± 10.716 M2
Lokasi Strategis :
Jl. Raya Cibening Km. 11, Purwakarta
Hubungi : 0813 8922 8084
www.balindo.com

METRO TV

AGENDA | RABU, 10 MARET 2021

METRO XIN WEN | **07.05 WIB**

Metro Xinwen merupakan program berita berbahasa Mandarin pertama di Indonesia. Dengan perjalanan 19 tahun Metro TV, Metro Xinwen semakin memperluas isi berita dengan melingkupi berita-berita besar dari dalam negeri. Metro Xinwen juga berisi tayangan berita yang berhubungan dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Jangan lewatkan kehadiran Metro Xinwen, hanya di Metro TV.

SUSI CEK OMBAK| **20.05 WIB**

Kali ini Susi Pudjiastuti akan berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Mereka akan membahas strategi pariwisata agar bisa bangkit di tengah pandemi, termasuk wisata prioritas sport tourism yang manjadi andalan wisata masa kini. Ada pula Sudarti, pengrajin kerang asal Pangandaran yang terdampak pandemi. Terakhir, Ryan Tirta akan menjelaskan produk yang digunakan Susi Pudjiastuti yang sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Jangan lewatkan!

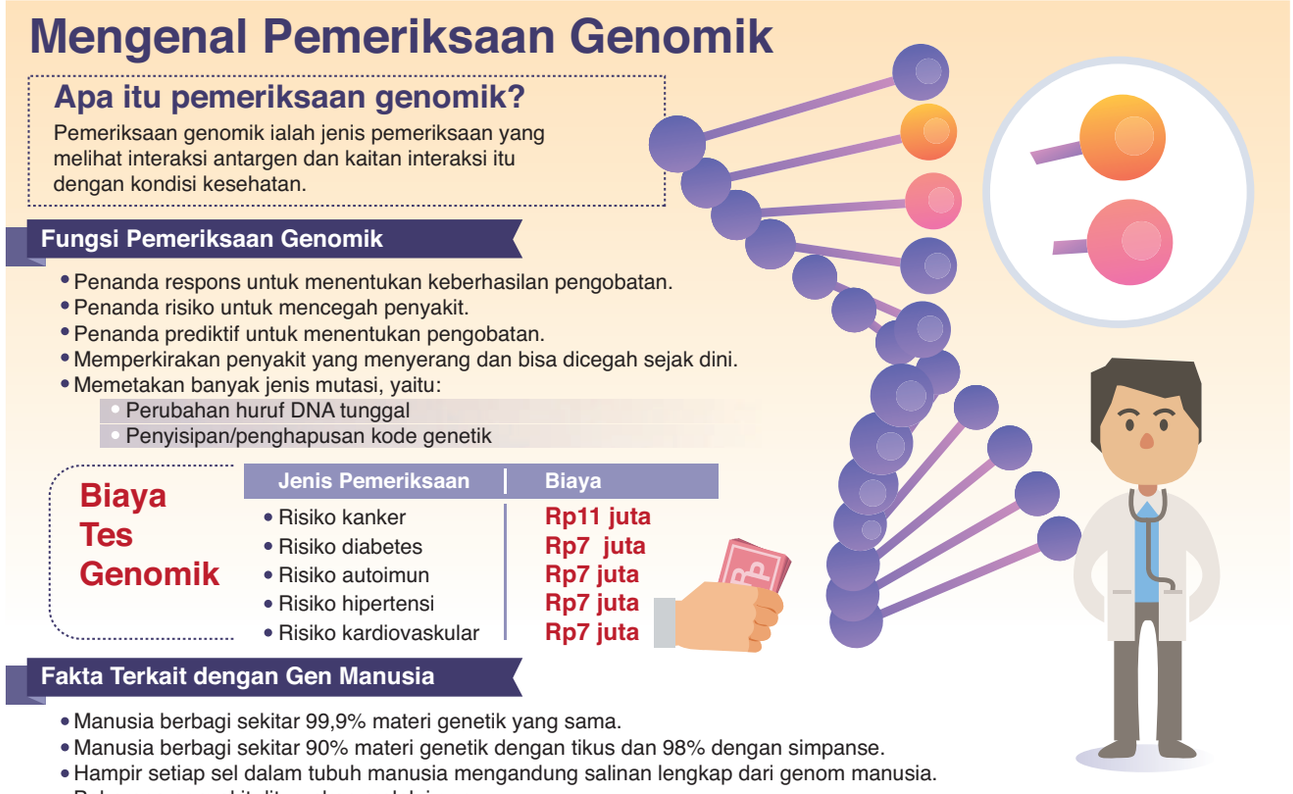

Mengelola Takdir dengan Tes Genomik

Beragam penyakit muncul karena 'diwariskan'. Beberapa di antaranya bisa diobati, dicegah, tetapi ada yang masih menjadi misteri.

SURYANI WANDARI PUTRI PERTIWI
wandari@mediaindonesia.com

SUKA atau tidak, penyakit yang diturunkan secara genetik akan terus muncul. Itu juga yang ada di benak aktris Hollywood Angelina Jolie ketika ia secara terbuka memutuskan untuk melakukan mastektomi ganda (pengangkatan kedua payudaranya) pada 2013 silam. Ia juga mengangkat ovarium, serta saluran tuba miliknya.

Jolie memiliki riwayat kanker di keluarga dari garis ibunya. Sang ibu meninggal dunia karena kanker ovarium di usia 56 tahun, sedangkan bibinya meninggal karena kanker payudara di usia 61 tahun.

Dari hasil tes genomiknya, Jolie memiliki BRCA1. *Breast cancer gene* (BRCA) ialah gen yang bertanggung jawab atas munculnya penyakit kanker payudara. Jika ada sifat BRCA 1 atau 2, dipastikan 85% kemungkinan terjadi kanker.

Tes genomik menjadi sebuah harapan baru di saat begitu banyak penyakit baru yang muncul dan sulit diobati. Sebenarnya bukan hanya kanker, tes genomik juga menjadi alat diagnostik yang ampuh dalam mengidentifikasi kondisi genetik yang langka.

Seorang bayi bernama Michael di Florida Tengah, Amerika Serikat, terselamatkan hidupnya karena tes genomik tersebut. Tubuh sang bayi sangat kurus, dan pucat setelah beralih dari ASI ke susu formula.

Setelah berbagai tes yang melibatkan ginjal, hati, dan jantung Michael, ditemukan bahwa organ tubuhnya itu bekerja seperti orang berusia 60-70 tahun. Namun, dokter tidak dapat menjelaskan alasannya.

Bayi Michael lalu menjalani uji kelainan genetik menggunakan sekuensing genom keseluruhan yang sangat cepat. Hasil tes kemudian mendiagnosis Michael dengan kondisi genetik langka yang disebut *Hereditary Fructose Intolerance* (HFI).

Kondisi ini menyebabkan tubuh mengalami kekurangan enzim protein untuk mengurai fruktosa, yang sering ditemukan dalam susu formula bayi. "Michael kehilangan enzim itu. Tubuhnya memperlakukan gula sebagai racun," kata Majed Dasouki, pakar kedokteran genetik dan direktur medis untuk Genetika Medis Grup Medis Advent di Orlando, dikutip dari *Fox35orlando*.

Cegah lebih baik

Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Pemeriksaan genomik membuka paradigma baru dalam menilai risiko penyakit yang mendukung *preventive medicine*.

Pemeriksaan genomik sangat penting bagi orang yang memiliki riwayat kanker ataupun tumor di keluarga, orang dengan pekerjaan berisiko seperti terpapar bahan kimia, radiasi, dan petugas kesehatan. "Juga orang yang memiliki faktor risiko seperti perokok, peminum alkohol , maag akut hingga obesitas," sebut konselor genetika, Widya Eka Nugraha dalam diksusi di Instagram Prodia, belum lama ini.

Ia menjelaskan, tubuh memiliki lebih dari 20 ribu gen dengan jenis dan fungsi yang berbeda. Dengan pemeriksaan genomik, seseorang bisa mengetahui risiko penyakit yang diturunkan tersebut dan mencegahnya. "Bisa dicegah sejak dini," serunya.

Ia mencontohkan, penyakit kanker yang terkait erat dengan gen dan menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Seseorang yang memiliki gen kanker belum tentu akan terkena kanker, tetapi berisiko lebih tinggi untuk terkena jenis kanker tertentu.

Untuk mengelola risiko kanker yang diwariskan itu, kata Widya, di sinilah pentingnya melakukan tes genomik. Saat ini, pemeriksaan genomik dapat digunakan untuk menganalisis lebih dari 64 gen dan 65 varian terkait dengan risiko 9 jenis kanker, yaitu kanker payudara, usus besar atau kolorektal, serviks, hati, pankreas, paru, lambung, tiroid, dan uterus.

"Tes genomik cukup sekali sumur hidup karena susunan genetiknya tidak berubah kecuali saat ia terkena kanker," ungkapnya. (H-2)

Jadi Komorbid Tertinggi, Waspadai Hipertensi

HINGGA saat ini, hipertensi masih menjadi penyakit penyerta atau komorbid tertinggi dan berbahaya ketika terinfeksi covid-19 sehingga diperlukan suatu kewaspadaan khusus.

"Data terkini menyebutkan bahwa hipertensi merupakan komorbid tertingi covid-19 di dunia termasuk di Indonesia dengan perbandingan di AS sebanyak 56,6%, Tiongkok 58,3%, Italia 49% serta Indonesia 50,5%," terang President of Indonesian Society of Hypertension (InaSH) Tunggul D Situmorang dalam webinar bertajuk Tata Laksana Hipertensi pada Masa Pandemi, belum lama ini.

Dari data Riskesdas 2018 diketahui, ada 63 juta atau 34,1% penduduk di Indonesia yang menderita hipertensi. Menurut Tunggul, sebesar 8,8% dari mereka sudah terdiagnosis hipertensi. Namun, hanya 54,4% yang rutin minum obat.

Di masa pandemi, kata Tunggul, banyak sekali pasien hipertensi yang enggan datang ke fasilitas kesehatan karena pembatasan aktivitas dan khawatir tertular covid-19. Padahal, hipertensi yang terkontrol sangat penting dijaga.

Dalam situasi ini, sahut Tunggul, pengukuran tekanan darah sendiri di rumah menjadi penting, di samping penggunaan telemedicine (layanan kesehatan jarak jauh).

"Pada pasien hipertensi yang terkena covid-19, obat yang digunakan sebelumnya harus dilanjutkan," sebutnya.

Sekretaris Jendral InaSH, Eka Harmeiwaty, SpS, menambahkan, upaya deteksi pada kelompok usia 18 tahun ke atas juga menjadi penting dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas covid-19 akibat hipertensi terselubung (*masked hypertension*) yang dampaknya merusak organ tubuh.

"Hipertensi terselubung menunjukkan tekanan darah normal saat diperiksa di klinik. Namun, pengukuran di luar klinik hasilnya menunjukkan tekanan darah yang meningkat. Dari berbagai studi prevalensi adalah 9%-48%," terangnya.

Selain itu, dokter Eka juga meminta masyarakat mewaspadai *white coat hypertension* (hipertensi jas putih) pada pasien hipertensi derajat 1 (tekanan darah siatolik 140-159 dan atau tekanan sistolik 90-99 mmHg) pada pemeriksaan di klinik. Namun, pada pengukuran di rumah, tekanan darahnya normal. (Ata/H-2)

Anak Telat Ngomong? Jangan Dibiarkan

YOLANDA tidak pernah menyangka bahwa masalah telat bicara yang dialami anaknya, Odelia, 9, disebabkan oleh gangguan pendengaran *treacher collins syndrome* (TCS). Ia mengaku telat dalam membaca tanda-tanda yang dialami anaknya saat masa pertumbuhan.

"Odelia baru dideteksi mengidap TCS pada usia 6 tahun. Saat ia berusia 4-5 tahun, sebenarnya sudah melakukan terapi wicara. Ia belajar *face to face* dengan terapisnya. Kosakata yang dimilikinya banyak, dia bisa bicara, tapi ternyata selama ini ia belajar bicara dengan melihat gerak bibir terapisnya, bukan dengan mendengar menggunakan telinga," tuturnya saat *live Instagram* bersama RSCM Kencana, Senin (1/3).

TCS merupakan cacat bawaan dari lahir yang berpengaruh pada sistem pendengaran di bagian tengah. Yolanda baru menyadari bahwa anaknya mengalami gangguan pendengaran saat ia mencoba untuk berbicara dengan Odelia sambil menutup mulutnya. Dari situ, Odelia terlihat bingung dan tidak dapat merespons perkataannya.

ANTARA

"Dari situ kita tahu betapa pentingnya *screening*, dan yang terpenting bahwa kita harus ingat belajar bicara bukan hanya lewat mulut, tapi juga telinga," ucapnya.

Setelah sejumlah *treatment*, Odelia kini bisa mendengar dengan jelas menggunakan alat bantu di kedua telinganya dan bersekolah di sekolah umum dengan tetap didampingi guru khusus.

Spesialis THT RSUPN Cipto Mangunkusumo Fikry H Yasin mengungkapkan skrining fungsi pendengaran anak seharusnya dilakukan sejak dini, di mulai ketika bayi berusia dua hari.

"*Screening* pada bayi baru lahir bisa dilakukan saat mereka berusia dua hari. Di situ akan dilihat apakah ia punya kecenderungan pada kelainan sistem pendengarannya atau tidak," ungkapnya.

Ia pun menyesalkan banyak orangtua yang kemudian baru datang ke dokter setelah usia anaknya lebih dari 2 tahun. Fikry mengingatkan para orangtua untuk memantau kemampuan bicara anak saat masa pertumbuhan.

Dijelaskannya, bayi di usia 0-6 bulan sudah melakukan vokalisasi pralinguistik yang tidak memiliki arti, seperti tertawa ataupun *bubbling*. Ketika berusia di atas 6 bulan, bayi sudah bisa mengeluarkan kata yang memiliki arti, seperti mengucapkan kata mama atau papa.

"Nah, untuk bayi tuli,tidak ada penambahan kosa kata, hanya segitu-segitu saja. Fungsi perkembangan bicaranya gak ada perubahan. Setahun dia biasanya bisa menyebutkan kata yang berarti 'mama papa', dia gak ada perkembangan," katanya.

Selain itu, gejala lain yang dapat diketahui, yakni apabila anak tidak merespons terhadap bunyi-bunyian. Umumnya, anak pada usia 4 bulan akan mencari sumber bunyi-bunyian. Hal itu dapat dilihat dari respons gerak mata dan kepalanya. (Ata/H-2)

ANTARA /NYOMAN HENDRA WIBOWO

TANGKAL DAN ANALISIS BERITA BOHONG COVID-19: Petugas mendeteksi berita hoaks yang beredar di jejaring media sosial dengan menggunakan aplikasi *E-Tangkal* dan *Analisa Berita Bohong* (*Taboo*) di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar, Bali, kemarin. Aplikasi *E-Tangkal* dan *Analisa Berita Bohong* (*Taboo*) itu telah menangkal sebanyak 53 berita hoaks terkait vaksin dan covid-19 yang beredar di jejaring media sosial pada bulan Januari hingga Februari 2021 serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat melalui situs *Tangkalhoax.denpasarkota.go.id*.

Urgensi Musik Indonesia

Kontribusi musik bagi kehidupan sehari-hari tak terbantahkan. Namun, perhatian terhadap musik dan nasib musisi masih terabaikan.

Syarief Oebaidillah
obay@mediaindonesia.com

PEMAJUAN dan perlindungan musik di Tanah Air merupakan suatu keharusan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan komitmennya untuk memajukan musik Indonesia.

"Upaya memajukan musik Indonesia bisa melalui perlindungan hak cipta, sistem pendataan terpadu, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, peningkatan kesejahteraan musisi, dan penyiapan infrastruktur pendukung sesuai dengan janji Presiden Jokowi," ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. Hal itu dia kemukakan bertepatan dengan Hari Musik Nasional yang diperingati setiap 9 Maret.

Peringatan Hari Musik Nasional ini, kata Hilmar, merupakan salah satu peran pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan yang salah satu obyeknya adalah seni.

Hilmar menambahkan, dengan terbentuknya unit baru di bawah Ditjen Kebudayaan yakni Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru (PMMB), pihaknya akan berusaha mencari jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi di dunia musik.

Untuk direktorat baru fokusnya di bidang musik antara lain penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Advokasi yang mencakup pelayanan dan pendampingan untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan SDM mencakup pemberdayaan dan peningkatan kompetensi musisi, penyelenggaraan World Music Expo sebagai bentuk diplomasi budaya, dan memperbanyak lagu anak-anak.

Rencana aksi jangka pendek direktorat baru di bidang musik ini akan dimulai dari setiap kegiatan di Kemendikbud. "Jadi kegiatan apa pun yang menggunakan musik atau lagu, akan dihitung royaltinya untuk diberikan kepada yang berhak," ungkap Hilmar.

Kemendikbud, ujarnya, juga tengah merancang dua kebijakan strategis bidang musik. Pertama menyusun kebijakan tata kelola perlindungan kekayaan intelektual bagi musisi tradisi yang mengembangkan repertoir-nya berbasis musik dan instrumen tradisional Indonesia.

Berikutnya, Kemendikbud akan pengembangan materi dan metode pembelajaran apresiasi musik yang berbasis eksperimental dan pendidikan kontekstual untuk siswa tingkat PAUD hingga SMP.

Aspirasi

Nuansa Hari Musik Nasional kemarin mewarnai obrolan para seniman dan musisi serta tokoh pers di acara virtual bertajuk World Vaccine Update. Hadir di acara itu antara lain Addie MS, Vina Panduwinata, Edo Kondologit, dan Dharma Oratmangun, serta James F Sundah selaku penyelenggara acara. Tampak tokoh pers lintas generasi ialah Dahlan Iskan, Jos Katoppo, dan Wendi Putranto, dan lainnya.

Menurut Dharma Oratmangun pencanangan Hari Musik Nasional dilaksanakan di Istana Negara pada 9 Maret 2003. Ketua Umum Karya Cipta Indonesia (KCI) ini mengatakan memaknai Hari Musik Nasional tidak sekadar seremonial melainkan memperdalam peran musik sebagai salah satu pembentuk karakter bangsa melalui budaya.

Adapun Dahlan Iskan menjelaskan bahwa musik telah menjadi salah satu bagian dalam kesehariannya. Salah satu pengalaman paling berkesan ialah mendengarkan musik menjelang operasi hati di China.(H-1)

Pancasila dan Agama Ada di Peta Jalan Pendidikan

PETA Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 yang dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan agar mampu menghasilkan anak-anak Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Hendarman di Jakarta, kemarin, sekaligus menyikapi adanya anggapan tidak dimasukkannya aspek keagamaan dalam rencana dan tujuan strategis pendidikan nasional tersebut.

"Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja. Agama sangat esensial bagi kita, bangsa Indonesia, dan karena itu kami refleksikan pada profil pelajar Pancasila. Kemendikbud tidak pernah berencana menghilangkan pelajaran agama," tegas Hendarman yang juga menjabat Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud.

Dalam menanggapi dokumen PJPN 2020-2035 yang beredar di tengah masyarakat, Hendarman mengakui sejauh ini hanya ada satu rancangan atau draf yang sudah pernah dibuat dan dokumen tersebut bukanlah dokumen final. "Dapat dilihat pada keterangan di setiap halaman bahwa dokumen tersebut masih berupa draf. Substansinya belum lengkap, sehingga tidak dapat dikatakan dokumen final," terang Hendarman.

Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 mulai disusun atas masukan yang sangat positif dari Komisi X DPR RI. Hendarman menjelaskan saat ini status PJPN 2020-2035 masih terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak.

Terpisah, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai dimensi keagamaan pada PJPN 2020-2035 merupakan faktor fundamental. "Bagi bangsa Indonesia dimensi keagamaan adalah fundamental dan bagian dari gerakan moral yang akan mewarnai dalam pembangunan peradaban," kata Sekjen FSGI Heri Purnomo, kemarin.

Heru berharap pembahasan pada PJPN yang melibatkan lebih banyak kalangan menjadi masukan yang lebih baik. Dia menilai dari 10 poin penting PJPN, belum tampak dimensi keagamaan.(Bay/H-1)

ANTARA /DIDIK SUHARTONO

PERINGATI HARI MUSIK NASIONAL: Warga memainkan biola saat berziarah, di kompleks makam WR Soepratman di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilakukan Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur di makam pencipta lagu Indonesia Raya tersebut dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional

BKKBN Potret Data Mikro Keluarga untuk Atasi Stunting

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan pendataan keluarga (PK) 2021. PK 2021 merupakan cara untuk mengetahui kondisi keluarga Indonesia secara mikro dan mengurainya sehingga bisa membangun keluarga yang berkualitas.

"Untuk mengurai berbagai masalah seperti kemiskinan, *stunting*, kesehatan, dan masalah sosial lainnya harus dirunut sampai ke tingkat keluarga. Akar permasalahan harus diketahui terlebih dahulu sebelum menentukan langkah-langkah penanganannya," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam diskusi virtual, kemarin.

Pendataan keluarga menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi keluarga. Hal itu merupakan tanggung jawab BKKBN sebagai lembaga yang mempunyai visi membangun keluarga berkualitas.

"Oleh karena itu, memotret keluarga itu menjadi suatu keniscayaan bagi BKKBN. BKKBN tidak pernah bisa memperbaiki keluarga menjadi berkualitas tanpa tahu potretnya keluarga itu seperti apa," imbuhnya.

Rencananya, BKKBN melakukan PK 2021 pada 1 April hingga 31 Mei 2021 setelah rencana awal pada 2020 diundur karena pandemi covid-19. Data yang dibutuhkan BKKBN bersifat mikro yang akan dilakukan petugas kepada setiap keluarga Indonesia.

Hasto juga mengungkapkan prediksi angka *stunting* meningkat selama pandemi covid-19. "Kenapa masa pandemi ini (*stunting*) meningkat karena berbagai macam masalah. Contohnya penyebab *stunting* itu karena sakit berulang-ulang di masa pandemi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk BKKBN untuk memimpin program penurunan *stunting*. Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan pemerintah menargetkan penurunan angka *stunting* sampai 14% hingga tahun 2024. Sementara berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi *stunting* di Indonesia tercatat sebesar 27,67%. (Van/H-3)

SEKILAS

Kekerasan pada Perempuan di Kota

PEREMPUAN di perkotaan mengalami lebih banyak kekerasan dibandingkan dengan para perempuan di perdesaan.

"Yang paling tinggi di perkotaan 36,3%. Di perdesaan 29,8%," kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Valentina Gintings dalam webinar bertajuk Perempuan, Berani Bicara, kemarin.

Berdasarkan Sensus BPS 2020, jumlah penduduk perempuan mencapai 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari total penduduk Indonesia. Valentina menuturkan berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016, satu di antara tiga perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual.

Satu di antara lima perempuan yang pernah atau sedang menikah mengalami kekerasan psikis. Satu di antara empat perempuan yang pernah atau sedang menikah mengalami kekerasan berbasis ekonomi.(Wan/H-1)

Bersiap Sambut Ibadah Haji

MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan pihaknya terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji meskipun kepastian keberangkatan menunggu informasi resmi dari pemerintahan Arab Saudi.

"Penyiapan dokumen jemaah tetap dilakukan bertahap, pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) juga mulai dilakukan dengan Komisi VIII DPR RI," ujarnya kemarin.

Tim manajemen krisis yang dibentuk Menag pada akhir Desember 2020 juga terus bekerja menyiapkan beragam skenario. Demikian juga koordinasi dengan pihak Saudi, terus dilakukan melalui Konsul Haji KJRI Jeddah.

Ada kabar dari pejabat agama Turki melalui pernyataannya kemarin bahwa otoritas Arab Saudi menunda ibadah umrah setelah libur Lebaran Idul Fitri tahun ini lantaran percepatan normalisasi pascapandemi yang lebih lamban. Idul Fitri dilaksanakan setelah Ramadan, yang tahun ini berakhir pada pertengahan Mei.(Bay/Ant/H-1)

Angka Kemiskinan Lebih Berat

MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengatakan pandemi covid-19 membuat angka kemiskinan Indonesia menjadi lebih berat, sebab kebutuhan masyarakat meningkat.

"Kita lihat sekali lagi kemiskinan bukan hanya terkait masalah apakah dapat mengakses pekerjaan atau tidak, tapi terkait kebutuhan yang bertambah. Kita dulu tidak pernah membayangkan untuk memakai masker, *sanitizer*, sekarang harus kita adakan," katanya saat Rakornas Penanggulangan Bencana di Graha BNPB Jakarta, kemarin.

Ia memaparkan masyarakat Indonesia bukan hanya kesulitan ekonomi akibat hilangnya kesempatan kerja ataupun terkena dampak pengangguran, tetapi harus menambah pengeluaran di saat pandemi.

Selain pengeluaran alat perlindungan diri untuk mencegah penularan covid-19, katanya, pengeluaran untuk akses internet dan gawai yang memadai juga bertambah bagi anak sekolah.(Ant/H-1)

PARIWISATA DUNIA MASIH SEPI: Wisatawan berfoto di sekitar taman Patung Liberty di New York City, AS, pekan lalu. Badan pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan hampir sepertiga dari destinasi wisata di seluruh dunia benar-benar tertutup untuk wisatawan internasional karena situasi epidemiologis yang serius.

AFP/ KENA BETANCUR

32% Destinasi Wisata di Dunia Ditutup akibat Covid-19

Munculnya varian baru virus covid-19 mendorong banyak pemerintah membatalkan upaya pelonggaran pembatasan perjalanan, dengan penutupan total wisatawan paling umum di Asia Pasifik, Eropa, dan Afrika.

ATIKAH ISHMAH WINAHYU
atikah@mediaindonesia.com

PANDEMI covid-19 yang melanda dunia selama lebih dari setahun menimbulkan dampak besar bagi sektor pariwisata. Badan pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa hampir sepertiga dari destinasi wisata di seluruh dunia benar-benar tertutup untuk wisatawan internasional karena situasi epidemiologis yang serius.

Pada awal Februari, 69 dari 217 lokasi wisata di seluruh dunia, atau 32%, sepenuhnya tertutup untuk pariwisata internasional, termasuk 30 lokasi di Asia dan Pasifik, 15 di Eropa, dan 11 di Afrika.

Jumlah itu turun dari puncaknya pada Mei 2020 ketika 75% destinasi di seluruh dunia ditutup sepenuhnya. Namun, pada November lalu terjadi penurunan dengan hanya sekitar 27% yang ditutup.

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) yang berbasis di Madrid mengatakan ada kecenderungan menuju pendekatan yang lebih bernuansa, bukti, dan berbasis risiko untuk pembatasan perjalanan, seperti mewajibkan wisatawan internasional untuk memberikan bukti tes negatif pada saat kedatangan.

Kedatangan turis internasional turun 1 miliar atau 74%, pada 2020, menurut UNWTO, yang menyebutnya sebagai tahun terburuk dalam sejarah pariwisata.

Rugikan pariwisata

Pandemi merugikan industri pariwisata global sebesar US$1,3 triliun tahun lalu atau lebih dari 11 kali kerugian yang tercatat selama krisis keuangan global 2009.

"Pembatasan perjalanan telah banyak digunakan untuk membatasi penyebaran virus. Sekarang, saat kami berupaya memulai kembali pariwisata, kami harus menyadari bahwa pembatasan hanyalah salah satu bagian dari solusi," kata Ketua UNWTO Zurab Polilikashvili dalam sebuah pernyataan.

Pada saat yang sama, penelitian UNWTO juga menunjukkan kecenderungan mengadopsi pendekatan yang lebih bernuansa, bukti, dan berbasis risiko untuk menerapkan pembatasan perjalanan.

Semakin banyak tujuan di seluruh dunia sekarang mengharuskan wisatawan internasional untuk menunjukkan PCR negatif atau tes antigen pada saat kedatangan dan juga memberikan rincian kontak untuk tujuan penelusuran.

Tetap berhati-hati

Laporan pembatasan perjalanan juga mencatat bagaimana pemerintah yang berbeda mengeluarkan nasihat kepada warga mereka sendiri.

Analisis dari 10 besar pasar sumber pariwisata yang saat ini menyarankan untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak penting ke luar negeri menemukan bahwa mereka menghasilkan 44% dari semua kedatangan internasional pada 2018.

UNWTO mencatat bahwa saran yang dikeluarkan pemerintah akan memainkan peran penting dalam memulai kembali dan pemulihan pariwisata dalam beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan. (The Guardian/I-1)

Protes Perempuan di Meksiko Berubah Menjadi Bentrokan

PARA wanita yang berbaris pada Hari Perempuan Internasional bentrok dengan polisi di barikade yang mengelilingi Istana Nasional di Mexico City. Petugas menembakkan semprotan merica seusai pengunjuk rasa berusaha merobohkan dinding logam.

"Enam puluh dua petugas dan 19 warga sipil terluka," kata Marcela Figueroa, pejabat badan kepolisian kota.

Pemerintah Mexico City dengan tegas menyangkal telah menggunakan jenis gas apa pun terhadap pengunjuk rasa.

Presiden Andres Manuel Lopez Obrador memasang barikade logam yang digambarkan sebagai tembok perdamaian oleh juru bicaranya sebelum protes berlangsung. Dia mengaku memasang barikade untuk melindungi properti pemerintah dari vandalisme.

Namun, tembok itu terbukti memprovokasi perempuan, yang menuduh Presiden takut akan gerakan feminis dan mengabaikan kekhawatiran seperti kekerasan seksual yang merajalela dan jumlah korban harian femisida mencapai 10 orang. Setidaknya 939 wanita telah menjadi korban femisida tahun lalu di Meksiko, menurut data resmi.

"Di mana Anda saat saya diperkosa?" terdengar seorang wanita berteriak kepada polisi.

Lopez Obradors memiliki hubungan yang kurang baik dengan gerakan feminis, yang dituduh dimanipulasi lawan konservatif dan dipengaruhi ide-ide asing.

"Kami ingin dia melindungi kami dengan cara yang sama seperti dia melindungi gedung-gedung ini," kata Vania Palacios, 19.

Korban femisida

Para pengunjuk rasa menuliskan nama-nama korban femisida di barikade setelah dipasang pada Jumat (5/3) dan kemudian ditutup dengan bunga. Mereka juga memproyeksikan slogan-slogan di Istana Nasional berbunyi, 'Femisida Meksiko' dan 'aborsi legal sekarang'.

Slogan lain membawa tuduhan 'pemerkosa tidak akan menjadi gubernur', merujuk pada Felix Salgado Macedonio, yang mencalonkan diri untuk jabatan di Negara Bagian Guerrero, dengan dukungan Lopez Obrador. Salgado membantah telah melakukan pelecehan seksual terhadap lima wanita dan tidak ada dakwaan yang diajukan terhadapnya. (Aiw/The Guardian/I-1)

India Deportasi Pengungsi Rohingya ke Myanmar

SEKITAR 170 pengungsi Rohingya yang tinggal di India telah ditangkap dan dibawa ke pusat-pusat penahanan. Mereka diberi tahu bahwa mereka akan dideportasi secara paksa kembali ke Myanmar tempat mereka sebelumnya melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia genosida.

Penahanan massal yang dimulai di Kota Jammu di Kashmir selama akhir pekan ialah bagian dari tindakan keras nasional yang lebih luas terhadap muslim Rohingya yang berjumlah sekitar 40 ribu orang di India. Banyak di antara mereka merupakan pemegang kartu identitas pengungsi dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) yang terdaftar, yang seharusnya menawarkan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang.

Pada Sabtu (6/3), ratusan orang Rohingya termasuk wanita dan anak-anak dipanggil polisi sebagai bagian dari latihan 'verifikasi' dan lainnya ditangkap selama penggerebekan di kamp-kamp di pinggiran Kota Jammu tempat sekitar 5.000 Rohingya tinggal.

Mereka dibawa dengan bus ke penjara di dekat Hiranagar, yang digambarkan polisi sebagai 'pusat penahanan'.

Akram Mohammad termasuk di antara mereka yang ditahan pada Sabtu. Setelah dia, istrinya, Amina, dan ketiga anaknya dipanggil ke stadion setempat oleh polisi. Polisi dan paramiliter melarang mereka pergi dan pada sore hari mereka mulai memanggil nama.

"Saya punya anak kecil, ke mana saya akan pergi? Kejahatan apa yang telah dilakukan suami saya? Kami datang ke sini pada 2012 melarikan diri dari kekerasan brutal di negara kami. Suami saya bekerja sebagai buruh di sini dan kami semua memiliki kartu identitas UNHCR. Ini penindasan," kata Amina, 28.

Aizu Rahaman, pengungsi di Jammu, mengatakan pamannya, putra, dan istri saudara laki-lakinya dikirim ke penjara karena mereka tidak dapat menunjukkan paspor Myanmar atau visa India.

"Polisi berkata, 'Anda imigran ilegal' dan menangkap mereka," kata Rahaman.

Saksi mengungkapkan bahwa selama penggerebekan di kamp, seorang pengungsi Rohingya dipukuli polisi ketika dia mencoba melawan penangkapan. (Aiw/The Guardian/I-1)

Anak-Anak Suriah tidak Bisa Lihat Masa Depan di Negara Mereka

BANYAK anak Suriah, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak bisa membayangkan masa depan di tanah air mereka saat konflik di sana memasuki tahun ke-11.

"Perang selama 10 tahun ini telah mengorbankan masa kecil anak muda Suriah," kata Direktur Regional Save the Children, Jeremy Stoner, pada kemarin.

"Konflik yang berlarut-larut telah menimbulkan ketakutan dan pesimisme tentang kemampuan anak-anak untuk membangun kehidupan mereka di negara yang dilanda perang," katanya dalam sebuah pernyataan.

Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 387 ribu orang dan membuat jutaan orang mengungsi sejak dimulai 2011 dengan penindasan brutal terhadap protes antipemerintah.

Antara November dan Desember 2020, Save the Children mewawancarai 1.900 anak telantar dan pengasuh mereka di Suriah dan di Yordania, Libanon, Turki, dan Belanda.

Rata-rata, 86% dari anak-anak pengungsi Suriah yang disurvei mengatakan mereka tidak ingin kembali ke negara asal mereka, kata badan amal Inggris itu, yang mengutip laporan yang diterbitkan untuk menandai peringatan tersebut.

"Saya tidak ingin kembali ke sana. Saya tidak ingin kembali dan tinggal di Suriah lagi. Saya juga tidak ingin tinggal di Libanon," kata Nada, pengungsi Suriah yang berusia 17 tahun yang tinggal di Libanon utara, seperti dikutip laporan itu.

"Ke mana pun saya pergi, jika kami pergi ke sekolah, mereka mengganggu kami dan mengatakan mereka tidak menginginkan kami," katanya.

Di Suriah, satu dari tiga anak telantar yang disurvei mengatakan mereka lebih suka tinggal di negara lain, menurut organisasi nonpemerintah tersebut. Mereka termasuk Lara, yang berusia tujuh tahun yang tinggal di kamp pengungsian di Suriah. "Setelah 10 tahun, masa depan kami menjadi tentang perang," katanya seperti dikutip laporan itu.

"Saya ingin tinggal di negara mana pun selain Suriah, yang aman dan ada sekolah serta mainan," tambahnya.

Lebih dari 8,5 juta anak Suriah, kata Unicef, bergantung pada bantuan di dalam Suriah dan di negara-negara tetangga.

Hingga 60% anak-anak tidak dapat secara konsisten mengakses atau membeli makanan yang cukup di Suriah, dan lebih dari setengahnya tidak masuk sekolah. (AFP/Nur/I-1)

Barca Mencari Keajaiban

Barcelona menyiapkan strategi menyerang sejak awal, tetapi tetap mewaspadai serangan balik mematikan yang menjadi keunggulan PSG.

AKMAL FAUZI
akmal@mediaindonesia.com

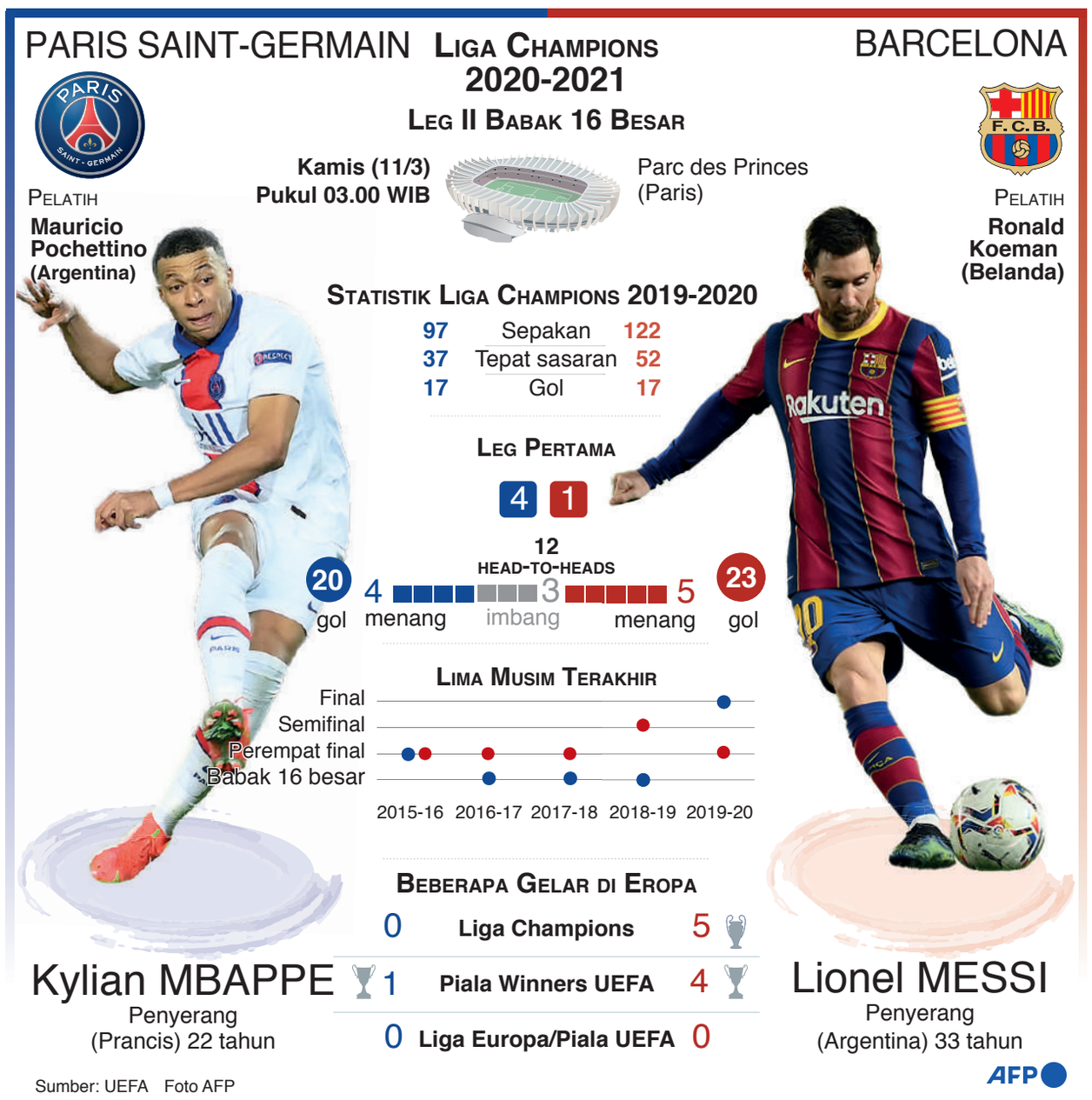

BARCELONA membawa beban berat bertandang ke markas Paris Saint-Germain (PSG) pada *leg* kedua babak 16 besar Liga Champions 2021 di Parc des Princes, dini hari nanti.

Saat menjamu PSG di Camp Nou di duel pertama, Barcelona kalah dengan skor 1-4. Namun, *Blaugrana* belum mau menyerah. Lionel Messi dan kawan-kawan setidaknya perlu menang 4-0 di kandang PSG untuk melenggang.

Pelatih Barcelona Ronald Koeman masih tetap yakin timnya bisa mengendalikan keadaan. Koeman berharap ada keajaiban untuk Barcelona. "Saya tidak ingin mengatakan itu tidak mungkin, tetapi kami akan pergi ke sana untuk mendapatkan hasil yang baik," kata Ronald Koeman.

Sebelum laga melawan PSG, Barcelona memiliki hasil yang positif di Liga Spanyol dan Copa del Rey. Bahkan, pada ajang Copa del Rey, Barcelona mampu meraih *comeback* setelah *leg* pertama kalah 0-2, lalu *leg* kedua menang 3-0.

Berbekal hasil positif pun Koeman tidak ingin jemawa dan mencoba mempersiapkan tim dengan baik untuk melawan PSG. Dengan setidaknya empat gol yang dibutuhkan untuk membalikkan defisit gol, Lionel Messi dan kawan-kawan mau tidak mau harus menyerang sejak peluit awal pertandingan berbunyi.

Namun, menyerang tentu membuat banyak ruang di lini belakang Barcelona. Itu yang dan perlu diwaspadai karena tim tuan rumah lihai memanfaatkan serangan balik yang mematikan. Dari kubu PSG, Moise Kean dinyatakan positif covid-19 dan bakal absen. Bintang Brasil Neymar, masih belum dipastikan bisa tampil karena cedera.

Pelatih PSG Mauricio Pochettino tetap ingin menang di kandang sendiri. Langkah untuk mengantar PSG meraih trofi Liga Champions untuk pertama kali setelah musim lalu harus puas sebagai finalis.

Di laga lain, tuan rumah Liverpool cukup tenang bermodal kemenangan 2-0 saat menjamu RB Leipzig Jerman. Anak asuh Juergen Klopp tinggal fokus mempertahankan keunggulan itu, melupakan hasil minor di kompetisi lokal sepanjang beberapa pekan terakhir.

Laga penuh gairah

Dari ajang Liga Europa, pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan duel melawan Manchester United pada *leg* pertama babak 16 besar, Jumat (12/3) dini hari WIB, pasti akan berlangsung sulit.

"Sekarang kami menghadapi pertandingan yang sulit melawan Manchester United. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi juga menggairahkan," kata Pioli mengenai laga tandang di Old Trafford itu.

Baik AC Milan maupun MU, tengah *on fire* di kompetisi domestik masing-masing. *Rossoneri* saat ini menduduki tangga kedua klasemen Liga Italia lewat koleksi 56 poin.

Mereka berjarak enam angka dari Inter Milan yang tengah nyaman di puncak tabel Seri A.

Sementara itu, MU saat ini juga duduk di tangga kedua klasemen Liga Inggris. MU tengah dalam kepercayaan diri tinggi seusai menang 2-0 atas Manchester City dalam derbi Manchester. 'Setan Merah' mengoleksi 54 poin, berselisih 11 angka dari City yang memimpin klasemen.

Meski demikian, Pioli begitu tak sabar melakoni duel ini untuk menguji kapasitas skuad muda Milan. "Kami sadar akan kualitas kami dan musim ini masih panjang dan sulit," jelasnya. (Marca/Goal/Footballitalia/R-2)

Hasil Pertandingan
Selasa (9/3)

Liga Primer Inggris

Chelsea	2-0	Everton
Godfrey 31'-bd Jorginho 65'-pen		
West Ham United	2-0	Leeds United
Lingard 21' Dawson 28'		

La Liga Spanyol

Real Betis	3-2	Deportivo Alaves
Iglesias 61'-pen,88' Joaquin 81'		Joselu 12' Mendez 24'

Seri A Italia

Inter Milan	1-0	Atalanta
Skriniar 54'		

Jadwal Pertandingan

Kamis (11/3)

Liga Champions
- 03.00 WIB Liverpool vs RB Leipzig
- 03.00 WIB PSG vs Barcelona

Liga Primer Inggris
- 01.00 WIB Man City vs Southampton

La Liga Spanyol
- 01.30 WIB Atletico Madrid vs A Bilbao

Jumat (12/3)

Liga Europa
- 00.55 WIB Ajax vs Young Boys
- 00.55 WIB Dynamo Kyiv vs Villarreal
- 00.55 WIB Man United vs AC Milan
- 00.55 WIB Slavia Praha vs Rangers
- 03.00 WIB Granada vs Molde
- 03.00 WIB Olympiacos vs Arsenal
- 03.00 WIB Roma vs Shakhtar Donetsk
- 03.00 WIB Tottenham vs Dinamo Zagreb

Seri A Italia
- 21.00 WIB Lazio vs Crotone

Sumber: Livescore/Litbang MI

Macan Kemayoran Tampil Bernyali Petarung

DIREKTUR Olahraga Persija Ferry Paulus sangat optimistis menatap Piala Menpora 2021, bahkan ia berani menyebut timnya siap melawan klub mana pun pada turnamen pramusim itu. Tergabung di grup yang cukup berat, Persija bakal tampil sebagai petarung. Hasil undian grup Piala Menpora 2021 di Jakarta, Senin (8/3) malam, Persija Jakarta masuk Grup B bersama Bhayangkara Solo FC, Borneo FC, dan PSM Makassar.

Grup B yang dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan, Malang, menjanjikan laga menarik. Borneo FC yang sudah jor-joran mendatangkan pemain dalam menyambut kompetisi musim 2021 akan berusaha membuktikan performa kualitas pemain.

> Persija Jakarta masuk Grup B bersama Bhayangkara Solo FC, Borneo FC, dan PSM Makassar.

Demikian juga Bhayangkara Solo FC yang dipenuhi pemain bintangnya, termasuk Evan Dimas yang baru saja memutuskan hengkang dari Persija.

Menanggapi hasil undian tersebut, Ferry mengatakan skuad 'Macan Kemayoran' akan selalu siap bertarung. "Persija selalu optimistis di mana pun kami berada. Bersama dengan klub mana pun kami tetap siap bertarung," ujar Ferry Paulus seusai pengundian.

"Yang pastinya tidak ada klub yang ringan. Karena masa ini adalah masa-masa yang sangat sulit sehingga persiapan demi persiapan harus terus kita lihat," kata dia menambahkan.

Ferry beranggapan bahwa yang terpenting dalam penyelenggaraan Piala Menpora 2021 ialah menghidupkan kembali sepak bola Indonesia. Selain itu, kesempatan bagi para pemain yang akhirnya bisa kembali berlatih dan bertanding setelah satu tahun tak merasakan atmosfer berkompetisi.

Di bagian lain, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, selaku operator kompetisi, tetap memasukkan Persipura Jayapura dalam undian Piala Menpora 2021. Tim berjuluk 'Mutiara Hitam' telah menyatakan bersurat kepada PSSI untuk mundur dari ajang pramusim tersebut.

Berikut hasil undian Piala Menpora 2021 yang dilangsungkan 21 Maret hingga 25 April mendatang: Grup A di Stadion Manahan, Solo: Arema FC, PSIS Semarang, Barito Putera, Tira Persikabo, Persipura Jayapura. Grup B di Stadion Kanjuruhan, Malang: Persija Jakarta, Bhayangkara Solo FC, Borneo FC, PSM Makassar. Grup C di Stadion si Jalak Harupat, Bandung: Persebaya, Persik Kediri, Persela Lamongan, PSS Sleman, Madura United. Grup D di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta: Persib Bandung, Persiraja Banda Aceh, Persita Tangerang, Bali United. (Ant/R-2)

SEKILAS GELANGGANG

Marc Marquez Segera Lepas dari Cedera

PEMULIHAN cedera juara Moto-GP delapan kali, Marc Marquez, mulai menunjukkan hasil positif, ungkap Marquez dalam sebuah video wawancaranya dengan Repsol Honda.

Delapan bulan setelah kecelakaan di Spanyol, pemulihan cedera Marquez berjalan cukup lambat. Marquez telah tiga kali masuk ke ruang operasi dan yang terakhir pada Desember tahun lalu.

Absen pada hampir sepanjang seri Moto-GP 2020, *rider* asal spanyol itu mengungkapkan saat ini dia sudah bisa menggunakan lengan kanan untuk beraktivitas tanpa rasa sakit yang berlebihan.

"Lengan kanan saya sudah terasa kembali normal. Sebulan lalu sulit sekali untuk mandi, membuka pintu, atau makan dengan tangan kanan," jelas *the Baby Alien*--julukan Marquez--dalam wawancaranya yang diunggah Repsol Honda, Senin (8/3).

"Saya merasakan kondisi lengan saya terus membaik setiap harinya dan itu merupakan hal yang penting untuk dapat kembali membalap," imbuhnya.

Meski demikian, SuperMarc mengungkapkan saat ini dirinya masih terus melakukan pemulihan dengan melakukan sejumlah latihan olahraga ringan.

Pekan lalu, Marquez tak terlibat tes pramusim di Sirkuit Losail. Stefan Bradl kembali menggantikannya untuk tes pramusim di Qatar itu, bersama Pol Espargaro. (HondaRacing/Rif/R-2)

Hapkido Indonesia Tuai Pujian

PENGURUS Pusat Hapkido Indonesia yang menaungi olahraga seni bela diri asal Korea Selatan berhasil mencuri perhatian masyarakat dunia dengan menggelar kompetisi secara daring 1st Online South East Asia Hapkido Championships, 6-7 Maret pekan lalu. Sebanyak 200 atlet bersaing, termasuk atlet tamu asal Korsel, AS, Hong Kong, Panama, dan Inggris.

Grand Master Choi Don Oh sebagai presiden World Hapkido Martial Art Federation (WHMAF) dalam sambutan pada upacara pembukaan, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dari Hapkido Indonesia untuk melaksanakan kejuaraan internasional daring, yang pertama bagi seni bela diri Hapkido di dunia.

"Di situasi pandemi covid-19, tapi Hapkido Indonesia mewujudkan inisiatif melaksanakan kejuaraan secara *online* berskala internasional," puji Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman.

Kejuaraan se-Asia Tenggara itu dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Zoom* yang dioperasikan dari Yogyakarta. "Ini menjadi *performance* yang menarik dilihat atlet, pelatih, maupun semua orang di rumah masing-masing," ujar GBPH H Prabukusumo, presiden South East Asia Hapkido Union (SEAHU).

Kejuaraan juga menjadi ajang persiapan Hapkido tampil sebagai olahraga ekshibisi di PON XX Papua tahun ini. (RO/R-2)

Kirab Obor Olimpiade tanpa Penonton

KIRAB obor Olimpiade Tokyo yang dijadwalkan digelar Maret ini, kemungkinan akan diadakan tanpa penonton. Namun, penggemar tetap dapat melihatnya di rute kirab tersebut.

Surat kabar Jepang, dikutip dari *AFP*, kemarin, melaporkan bahwa pihak penyelenggara khawatir orang-orang akan berdesakan dalam acara yang digelar pada 25 Maret di Fukushima tersebut. Itu membuat bakal ada larangan terhadap 3.000 orang yang direncanakan hadir.

Penyelenggara Olimpiade Tokyo telah menetapkan aturan ketat terkait dengan pelaksanaan kirab obor menyusul pandemi covid-19 yang masih terjadi di 'Negeri Matahari Terbit'. Dalam aturan tersebut, orang-orang akan dilarang keras bersorak-sorak di sepanjang rute kirab dan hanya diperbolehkan menonton dari bagian yang dekat dengan rumah mereka serta menghindari keramaian. Penonton juga diwajibkan menggunakan masker dan diminta untuk menyemangati dengan tepuk tangan atau lewat atribut yang akan didistribusikan, bukan berteriak atau bersorak.

Dikatakan, porsi kirab akan dapat dikurangi bila terjadi kepadatan penonton di rute kirab.

Penyelenggara juga akan memutuskan bulan ini, terkait dengan apakah Olimpiade dapat dihadiri penonton luar negeri. (AFP/Rif/R-2)

AFP/OLIVER BUNIC

TOREHKAN REKOR BARU: Petenis Serbia Novak Djokovic menunggu saat bersejarah dalam kariernya di Balai Kota Beograd bersama pendukung fanatik, Senin (8/3) waktu setempat atau kemarin dini hari WIB. Djokovic, pemilik 18 gelar *grand slam*, menorehkan rekor sebagai pemain nomor satu dunia selama 311 pekan. Catatan yang melampaui raihan Roger Federer (Swiss) yang berkuasa selama 310 pekan. Kini Djokovic, 33, mengejar raihan trofi *grand slam* milik Federer yang telah mengoleksi 20 gelar.

MEDIA INDONESIA

SELEBRITAS

CUSTOMER SERVICE: (021) 5821303
PEMASANGAN IKLAN: (021) 5812113 / 5801480

RABU, 10 MARET 2021

PODIUM

Demokrasi Ambyar

EBET

Abdul Kohar
Dewan Redaksi Media Group

YANGON dan Mandalay, bagi Khin Lay, serupa padang Kurusetra. Dalam pewayangan, Kurusetra adalah sebuah palagan peperangan besar Pandawa melawan Kurawa. Yang pertama melambangkan keagungan dan kebenaran, sedangkan yang kedua menggambarkan kejahatan dan kebengisan.

Khin Lay, bersama ribuan demonstran penentang kudeta militer Myanmar, hari-hari ini sangat diliputi keresahan. "Penumpasan dan penindasan terhadap pengunjuk rasa oleh polisi dan tentara terhadap pemrotes semakin brutal. Di Yangon dan Mandalay, mereka menembaki pengunjuk rasa yang menggelar aksi secara damai, tanpa kekerasan," ungkap Khin Lay.

Gelombang protes menentang kudeta militer di Myanmar memang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera surut, bahkan bertambah besar. Sudah lebih dari 40 demonstran tewas ditembus timah panas sejak aksi menentang junta militer 1 Februari lalu. Inilah aksi terbesar di Myanmar sejak Revolusi Saffron menentang rezim militer pada 2007 yang dipimpin barisan biksu Buddha berkain oranye.

Protes massal ditandai dengan gerakan pembangkangan sipil, belakangan semakin dihadapi dengan unjuk kekuatan oleh aparat keamanan.

Pemerintahan militer pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing berkali-kali mengingatkan bahwa pihak berwenang tak akan segan-segan mengambil tindakan 'tegas' guna mengendalikan unjuk rasa jika terus berlanjut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi negara pada Senin (1/3), Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing mengatakan pemimpin protes dan 'penghasut' akan dihukum.

Namun, protes tak kunjung reda. Kemarahan demonstran memuncak saat Kyal Sin, gadis 19 tahun, yang ditembak mati pada pekan lalu, jenazahnya dilaporkan digali lagi oleh aparat Myanmar. Mempunyai panggilan Angel, Kyal tewas dengan luka di kepala pada Rabu (3/4), dan menjadi ikon gerakan penentang kudeta. Penggalian kembali jenazah Kyal menuai kemarahan publik, yang menyebut junta militer berusaha menyembunyikan kejahatan mereka.

Mereka yang marah salah satu di antaranya Khin Lay, salah seorang aktivis yang kerap berorasi di tengah massa dan juga di depan perwakilan sejumlah negara di Yangon, termasuk Kedutaan Besar Indonesia.

Pesannya jelas, "Tolong jangan berbicara dengan pihak militer dan hormatilah suara kami, rakyat Myanmar."

Suara yang dimaksud ibu berusia 50 tahun itu ialah hasil pemilu pada 8 November 2020 yang kembali dimenangi secara mutlak oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Namun, oleh kubu oposisi dan militer, hasil pemilu tersebut dinyatakan tidak sah dengan alasan diwarnai kecurangan, kendati Komisi Pemilihan Umum setempat menampik tudingan itu. Sengketa hasil pemilu lantas digunakan sebagai landasan perebutan kekuasaan oleh militer pada 1 Februari 2021, bertepatan dengan hari pertama sidang parlemen baru.

Peta sosial politik antara Myanmar sekarang dan Indonesia pada 1998 ketika gelombang demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur sekaligus mereformasi tatanan Orde Baru, tidak sepenuhnya berbeda. Hampir semua elemen masyarakat Indonesia ketika itu turun ke jalan. Semula diawali dengan aksi damai, demonstrasi massal akhirnya berubah frontal dan tidak pelak lagi pecah kekerasan.

Praktik korupsi dan nepotisme, ditambah ada krisis ekonomi yang terjadi saat itu, tak pelak menyadarkan banyak orang bahwa Orde Baru sudah saatnya selesai. Ditambah dengan penembakan mahasiswa Trisakti, jadilah rezim yang berkuasa lebih dari tiga dekade itu tumbang. Sejak itu, demokratisasi di Tanah Air jadi pilihan yang disepakati tak akan dipukul mundur. Terlepas masih adanya persoalan pada pelembagaan demokrasi, kita patut bersyukur semua elemen di negeri ini tak tergoda untuk meniru gaya Myanmar.

Di Myanmar, transisi demokrasi sudah ambyar. Di sejumlah negara, jalan demokrasi terus dikritisi, bahkan digerogoti. Namun, tak banyak pilihan jalan yang mendatangkan kemajuan peradaban, dan demokrasi masih terbukti yang paling baik. John Jeffries Martin, profesor sejarah dari Duke University, termasuk yang optimistis demokrasi tetaplah jalan terbaik untuk keadilan dan kemajuan.

Dalam artikel yang dia tulis di *Washington Post*, pada 21 Mei 2019, berjudul *Why Study History? Because It Can Save Us from Democratic Collapse*, Martin menandaskan jika orang mau belajar pada sejarah demokrasi, khususnya sejarah gagasan demokrasi dari para 'bapak demokrasi', orang akan mendapatkan bekal yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap demokrasi yang memang selalu ada di dalamnya.

Martin percaya bahwa ide dasar demokrasi dalam wujud pembagian kekuasaan negara ke beberapa lembaga yang berbeda, merupakan pembelajaran yang cermat terhadap pengalaman sejarah manusia dalam mengelola kekuasaan. Formula demokrasi yang melahirkan mekanisme *checks and balances* atau saling periksa yang memunculkan keseimbangan, tidak lahir dari angan-angan kosong.

Apa yang terjadi di Myanmar, termasuk kegelisahan Khin Lay, memberi pelajaran penting bagi negeri ini untuk setia pada konsensus bersama: jalan demokrasi. Tak ada alasan untuk mundur karena anak panah demokrasi telah meluncur. Ingatlah pesan Bung Hatta, proklamator kita dalam *Demokrasi Kita* (1966), yang menyerukan, 'Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan'.

ONLINE

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

1 Bus Listrik Ditarget Operasi Tahun ini tapi belum Dikaji Biayanya

PT Trans-Jakarta menargetkan bus listrik dapat beroperasi komersial mulai tahun ini. Namun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut biaya operasional yang akan menentukan dana buy the service rupiah/km kepada operator hingga saat ini belum dikaji. (Megapolitan)

2 Sprindik KPK buat Anak Bupati Bandung Barat Beredar

BEREDAR selembar surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisi pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Andri Wibawa, putra keempat Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, atas kasus pengadaan bantuan sosial pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat 2020. (Nusantara)

JENNIFER LOPEZ

Perempuan tak Berbatas

Menurutnya, perempuan yang memberdayakan perempuan lain menjadikan kekuatannya tak terbatas.

Deden Muhamad Rojani
Deden_rojani@mediaindonesia.com

AKTRIS dan penyanyi Jennifer Lopez, 51, menggunakan momentum Hari Perempuan Internasional untuk mendorong para perempuan bersuara untuk saling menyemangati. J Lo, sapaannya, membagikan kompilasi video di *Instagram* yang menampilkan beberapa teman sesama penyanyi, di antaranya Alicia Keys, Andra Day, Vanessa Bryant, Regina King, Tiffany Haddish, Gabrielle Union, dan Zaya Wade.

Video tersebut menampilkan setiap artis yang memegang tanda buatan sendiri yang bertuliskan '*I am unlimited*' yang diiringi dengan lagu milik Lope berjudul *Limitless*. Lagu ini ditulis Sia & Jesse Shatkin untuk film *Second Act*.

"Untuk semua ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan para perempuan yang hebat di dunia, aku memuji kalian. Aku memuji kita. Ini untuk Hari Perempuan Internasional hari ini dan setiap hari," kata J Lo yang bermain dalam film *Maid in Manhattan* tersebut.

J Lo menambahkan, perempuan harus menggunakan suara mereka dengan tegas untuk mempertahankan yang mereka percayai. "Perempuan memberdayakan perempuan lain dan mewujudkan hal itu agar tidak berbatas (*limitless*)," tandasnya.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara di kanal *Youtube* Coach, J Lo yang tampil dalam inaugurasi Presiden Joe Biden pada Januari lalu mengungkapkan afirmasi baginya yang senada dengan pesan yang ia bagikan pada Hari Perempuan Internasional. "Hal paling kuat yang dapat dilakukan perempuan adalah membangkitkan semangat satu sama lain," kata dia.

Lopez lahir di kawasan Bronx, New York, 24 Juli 1969. Ayahnya, David Lopez, ialah seorang spesialis komputer dan ibunya, Guadalupe Rodriguez, seorang guru taman kanak-kanak. Obsesinya mendorongnya pindah ke Manhattan untuk memperdalam keahlian tarinya.

Dari semula menjadi penari latar video klip Janet Jackson, *That's the Way Love Goes*, ia kemudian tampil sebagai penyanyi melalui *Jennie on the Blocks*. J Lo pun terjun ke dunia akting dan bermain dalam sejumlah film, seperti *Money Train*, *Wedding Planner*, dan *Hustlers*.

Pandemi

Dalam sebuah wawancara, J Lo mengatakan, ia menghabiskan waktu bersama keluarganya selama menjalani karantina sepanjang 2020. "Aku sangat sering bepergian karena pekerjaanku dan jauh dari anak-anakku. Di masa pandemi, aku bisa bersama anakku, makan malam bersama, menidurkan dan membangunkan mereka tiap pagi," kata dia. "Hal itu sangat membahagiakan dan seperti hikmah dari semua ini."

J Lo yang telah menunda pernikahannya dengan tunangannya, Rodriguez, karena pandemi, mengaku dia belajar banyak selama pandemi.

"Kupikir, salah satu yang kusadari adalah kita harus mengubah banyak hal dalam hidup," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelum pandemi, dia telah selalu bekerja dan bekerja. "Aku tidak meluangkan cukup waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup," tukasnya. (H-3)

AFP/EMMA MCINTYRE

ROSE BLACKPINK

Pre-Order Albumnya Catat Rekor

AGENSI yang menaungi Blackpink, YG Entertainment, menyatakan album solo salah satu personelnya, Rose, 24, telah mencatatkan *pre-order* sebanyak 400 ribu kopi pada Senin (8/3). *Pre-order* album berjudul *R* tersebut baru saja diluncurkan pada 4 Maret pekan lalu.

Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi yang diraih solois perempuan di Korea. Angka ini diprediksi akan bertambah menjelang perilisan resmi album, dilansir dari *Soompi*.

Sebelumnya, Rose telah membocorkan pada penggemarnya mengenai *single* pertamanya yang akan diluncurkan pekan ini. "*Single* pertamaku, *On the Ground*, akhirnya akan keluar pada 12 Maret. Untuk semua yang telah menunggu dengan sabar, terima kasih," kata Rose dalam unggahan *Instagram*-nya, pekan lalu.

Sebelumnya, *full* album pertama Blackpink, *The Album*, juga telah memecahkan rekor *girl group K-pop* untuk *pre-order*, mencapai hampir 1 juta kopi. Sekarang, Rose memegang rekor ini, baik sebagai grup maupun sebagai solois.

Album *R* dan lagu *On the Ground* dijadwalkan rilis pada 12 Maret mendatang, sementara album fisik akan dirilis pada 16 Maret. (H-3)

INSTAGRAM@ROSES_ARE_ROSIE

INSTAGRAM@ANGGINOEN

YOSEP ANGGI NOEN

Sutradara Terpilih Piala Maya

SINEAS Yosep Anggi Noen, 37, memenangi penghargaan Piala Maya 9 untuk kategori penyutradaraan terpilih. Akun *Twitter* resmi Piala Maya mengunggah pengumuman tersebut pada Minggu (7/3). "Selamat untuk *@angginoen*, sutradara film *The Science of Fictions*, untuk penyutradaraan terpilih Piala Maya 9," demikian keterangan pada cicitan tersebut.

"Semoga setelah ini saya makin *larisssssss*... terima kasih Piala Maya," kata Anggi, sapaannya, dalam unggahan *Twitter*-nya.

Anggi memenangi penghargaan tersebut lewat film *The Science of Fiction* yang diproduksi pada 2019. Pemeran utama dalam film tersebut, Gunawan Maryanto, juga memenangi penghargaan kategori aktor utama terpilih.

Anggi sebelumnya menggambarkan *The Science of Fictions* sebagai film tentang orang yang berjalan lambat sembari berkostum astronaut, lalu seakan pendaratan di bulan, lalu menghubungkannya dengan konteks politik di Indonesia pada 1960-an. Film tersebut mengambil lokasi di Gumuk Pasir, Yogyakarta. Menurut Anggi, lokasi itu memikat secara visual serta dianggap mirip dengan permukaan bulan. (Ant/H-3)

ISYANA SARASVATI

Kawinkan Opera dan Rock dalam Lagu

MUSIKUS Isyana Sarasvati, 27, merilis *single* baru berjudul *Il Sogno*, bahasa Italia yang berarti mimpi. Sesuai judulnya, lagu itu lahir dari pengalaman dan penghayatan Isyana akan mimpi.

"Sering kali kita tidak menyadari bahwa hanya dalam waktu yang singkat, mimpi dapat menyuguhkan banyak sekali adegan, waktu, dan tempat yang berbeda-beda. Hal ini yang membuat mimpi menjadi sesuatu yang mengasyikkan, dan yang berusaha aku gambarkan melalui lagu ini; sebuah kumpulan cerita dari alam bawah sadar yang terangkum kurang dari 4 menit," kata Isyana dalam keterangan pers, kemarin.

Secara aransemen, *Il Sogno* masih menampilkan sisi eksplorasi Isyana yang berbeda dari awal kehadirannya di industri musik. Secara berani Isyana mengawinkan gaya opera dengan progresif *rock*, menunjukkan bagaimana Isyana memiliki daya jelajah musikal yang luas.

Il Sogno ditulis langsung oleh Isyana, diproduseri Kenan Loui, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Isyana pada *single Ragu Semesta*, *Pendekar Cahaya*, *Lexicon*, dan *Unlock the Key*.

"*Buongiorno! official lyric video Il Sogno* sudah tersedia di *Youtube channel*-ku," kata Isyana dalam *Instagram*-nya. (Medcom.id/H-3)

MI/TOSIANI

FOKUS

Ancaman Kematian di Tambang Ilegal

Jumlah korban yang tewas memberi peringatan bahaya tambang ilegal. Longsor menjadi sinyal bagi aparat untuk menutup pertambangan liar.

M Taufan SP Bustan
m.taufan@mediaindonesia.com

NAMA Buranga belum akrab dengan telinga orang Indonesia. Namun, sejak 24 Februari lalu, Burangga menjadi bahan perbincangan, khususnya bagi para pegiat lingkungan di Tanah Air.

Buranga adalah nama salah satu desa di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Di lokasi inilah kecelakaan tambang kembali terjadi.

Jumlah nyawa yang terenggut ada 6 orang. Sementara 20 penambang lainnya menderita luka, empat orang di antara mereka harus menjalani perawatan intensif karena mengalami luka berat.

Nahas di pertambangan ilegal sudah sering terjadi di Tanah Air. Deretan daftar korbannya juga sudah sangat panjang. Namun, kejadian yang sama terus terulang.

Risna, 30, pendulang emas yang selamat dari peristiwa itu menjadi saksi betapa sangat mengerikan kejadian yang menimpa rekan-rekannya.

"Saya selamat lantaran saat kejadian saya sudah berada di bibir lubang. Tidak lama naik dari lobang, tiba-tiba material tanah dan bebatuan merangsek masuk ke lubang sedalam 15 meter," ujarnya.

Semua pendulang berusaha lari. Ada yang selamat sampai ke atas, tapi sebagian lainnya tertimbun hidup-hidup.

Risna yang mengaku mendulang baru sekitar lima bulan, saat itu panik tidak kepalang. "Tidak ada hujan atau pun angin kencang, material galian berupa tanah, pasir, dan bebatuan kecil langsung longsor dan menutupi lubang."

Ia pun berteriak-teriak meminta tolong kepada warga setelah melihat lubang tertutup saat beberapa rekannya masih beraktivitas di dalamnya.

"Pokoknya berteriak minta tolong sampai warga yang ada di atas berusaha menolong semampunya. Sampai akhirnya ada bantuan dari Basarnas, Polri, dan TNI," ungkapnya.

Paling menguntungkan

Selama mendulang di Buranga, Risna sudah pernah mengantongi bijih emas lebih dari satu gram. "Dijual langsung dengan harga Rp650 ribu hingga Rp700 ribu per gram," katanya.

Saat pendulang masih sepi, harga emas masih di posisi Rp700 ribu per gram. Tetapi, setelah pendulang makin banyak harganya mulai turun menjadi Rp650 ribu per gram. "Sekarang harganya turun," ungkapnya.

Meski rawan terjadi bencana, Risna tidak takut untuk kembali mendulang di lubang. Baginya tidak ada pekerjaan lain yang lebih menguntungkan selain mendulang emas.

"Saya tahu di sini bahaya dan lokasinya tidak berizin, tapi mau bagaimana, hanya di sini kami bisa bekerja dengan penghasilan yang baik. Dulu waktu saya menjual ikan di pasar, tidak bisa mendapat untung seperti ini," tambahnya.

Jadi, ketika aparat menyatakan bahaya mendulang emas dengan cara menggalir ke dalam lobang, karena longsor, Risna tidak peduli. Saya rasa semua teman-teman di sini juga punya pendapat yang sama," imbuhnya.

Tindak tegas

Nahas di Desa Buranga membuka mata semua pihak bahwa bahaya di pertambangan ilegal itu nyata adanya. Koordinator Pelaksana Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, Mohammad Taufik menyatakan bahwa bahaya tidak hanya mengancam di areal pertambangan emas ilegal Desa Buranga.

Namun, berdasarkan catatannya, sampai saat ini ada empat lokasi pertambangan emas ilegal di Sulawesi Tengah yang masih terus digali.

"Terkesan dibiarkan pemerintah dan aparat penegak hukum."

Keempat lokasi tambang ilegal itu ialah di Poboya, Palu; Kayuboko, Siniu, Parigi Moutong; Dongi-Dongi, Sigi, dan yang baru dibuka penambang liar ialah di Kabupaten Banggai.

"Jika ditambah Buranga, ada lima lokasi pertambangan emas ilegal yang aktif saat ini di Sulawesi Tengah," tandas Taufik.

Ia mengakui sampai saat ini Jatam tidak memiliki data resmi dari pemerintah tentang berapa jumlah korban meninggal dunia di lokasi pertambangan emas ilegal di Sulawesi Tengah setiap tahunnya.

"Dulu di lokasi pertambangan emas ilegal Poboya, Palu setiap tahun ada dua sampai tiga orang mati di lokasi pertambangan. Tapi itu hanya berlangsung hingga dua sampai tiga tahun, setelah itu tidak ada lagi korban jiwa," ujarnya.

Taufik menilai tidak adanya data yang dirilis pemerintah daerah terkait angka kematian di penambangan emas ilegal, mengesankan bahwa pemerintah menutupi data yang ada agar tidak mengundang perhatian publik. "Kejadian di Buranga membuat semua pihak kaget. Karena jumlah orang yang meninggal dunia banyak," tegasnya.

Dari amatan Jatam, kasus di Buranga menjadi pintu masuk penegakan hukum untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Sulteng. Adanya aktivitas pertambangan ilegal bukan hanya merusak lingkungan sehingga merugikan negara, namun juga bisa mengorbankan nyawa orang yang terlibat langsung di lokasi pertambangan dan orang yang berada di sekitar lokasi pertambangan.

"Pertambangan emas ilegal di Sulteng masih eksis, karena lemahnya penegakan hukum. Karena itu, Jatam Sulteng minta Kapolri yang turun langsung menyelesaikan persoalan tambang ilegal," tambah Taufik.

Pihaknya mendesak Kapolri agar menindak, karena ini jelas tindak pidana yang diatur dalam UU Pertambangan. "Kapolri harus serius. Kalaupun ada oknum aparat yang terlibat, wajib juga ditindak," tegasnya.

Sebagai jalan keluar bagi warga untuk mendapatkan penghasilan, Taufik mengusulkan pengembangan potensi agrikultur. "Itu mencegah petani beralih profesi menjadi penambang."

Setelah tambang ilegal ditutup, pemerintah pusat dan daerah tidak perlu mendorong penambangan dilegalkan di wilayah yang sama.

"Dampaknya pasti akan buruk bagi lingkungan. Daya rusak pertambangan legal dan besar lebih besar, lebih merugikan negara daripada keuntungannya," papar Taufik. (N-3)

123RF

Makin Berbahaya karena Merkuri dan Sianida

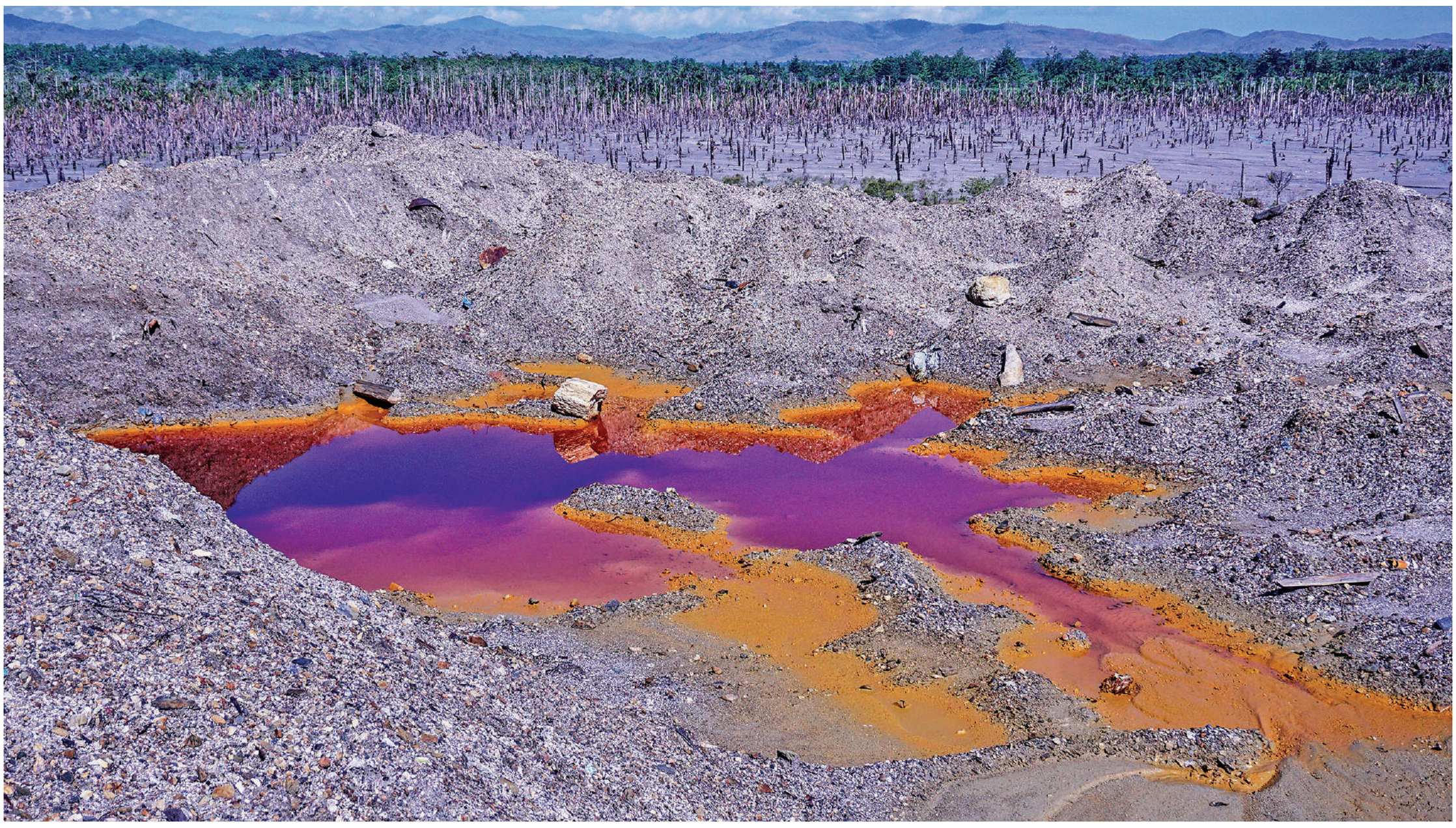

ANTARA /RIVAN AWAL LINGGA

TERCEMAR MERKURI: Kawasan kebun sagu yang terkena limbah merkuri di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, Rabu (28/11/2018). Penambangan emas ilegal dengan menggunakan merkuri dan sianida di kawasan itu mengakibatkan kebun sagu seluas 40 hektare mengalami kerusakan dan puluhan hewan ternak mati.

Dulu penambangan rakyat tidak menggunakan bahan kimia. Munculnya pemodal membuat penambang lebih menyukai merkuri dan sianida.

M Taufan SP Bustan
m.taufan@mediaindonesia.com

TANAH longsor bukan satu-satunya ancaman bahaya di pertambangan ilegal. Merkuri dan sianida, dua bahan kimia untuk mengolah emas menjadi ancaman yang tidak kalah berbahaya.

Para penambang ilegal menggunakan berbagai cara untuk memilah dan mendapatkan emas. Salah satunya dengan sistem rendaman. Sistem ini memilah emas di dalam kolam menggunakan merkuri dan sianida. Kolam juga bisa diganti-kan dengan tong.

Yang berbahaya, limbah merkuri dan sianida ini dibuang sembarangan. Lingkungan yang tercemar keduanya juga mengancam keberlangsungan hidup satwa dan manusia.

Merkuri pernah menjadi tragedi kemanusiaan di Minamata, Prefektur Kumamoto di Jepang pada 1958. Saat itu, PT Chisso membuang limbah kimianya di Teluk Minamata dalam jumlah besar.

Ikan-ikan tercemar merkuri. Warga terkena penyakit cacat fisik, penyakit aneh, hingga kini. Bahkan ratusan warga meninggal akibat kelumpuhan saraf setelah makan ikan dari perairan itu.

Tragedi yang sama nyaris terjadi di Pulau Buru. Penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak menjadi sumber bahayanya.

Pada 2018 lalu, tiga kerbau mati mendadak dalam posisi saling berdekatan setelah minum limbah merkuri. Mereka berada di lokasi pengolahan emas ilegal sistem rendaman Jalur A Dusun Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Tidak jauh dari kawasan Gunung Botak.

Seekor kerbau lainnya ditemukan mati di Teluk Kayeli. Ia diduga mati setelah minum air atau memakan tumbuhan yang tercemar merkuri. Limbah merkuri dari Gunung Botak mengalir ke Teluk Kayeli.

Lebih murah

Koordinator Pelaksana Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, Mohammad Taufik, mengakui bahaya merkuri dan sianida dari lokasi tambang emas ilegal. Namun, berdasarkan investigasi Jatam, banyak penambang tidak menghiraukan ancaman bahaya bahan kimia itu.

"Limbah merkuri dan sianiga mengacam kehidupan dalam jangka dan waktu yang panjang. Para penambang ilegal tahu, tapi menurut mereka, tanpa merkuri dan sianida, pengolahan emas sangat sulit dan tidak ekonomis untuk dijalankan," paparnya.

Mau atau tidak mau, peredaran merkuri dan sianida harus dihentikan. Penegak hukum harus melakukannya sebagai upaya mencegah tambang liar berbahaya bagi lingkungan.

Di Sulawesi Tengah, seperti penambangan di wilayah lain, merkuri digunakan untuk memisahkan emas dari lapisan tanah yang melekat. Fungsinya ialah memurnikan emas.

Sementara itu, sianida digunakan di kolam rendam. Fungsinya sama, yakni untuk memisahkan emas dari mineral dan tanah.

Indonesia sudah melarang penggunaan kedua bahan kimia itu di pertambangan emas. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 57 Tahun 2016, pemerintah dengan tegas melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan sianida dan merkuri. Semua tindakan yang masih menggunakannya ialah ilegal.

"Sampai saat ini tidak ada tambang atau penjualan sianida dan merkuri yang legal di Indonesia. Kalaupun masih beredar, itu bisa dipastikan ilegal," tandas Taufik.

Karena itu, aparat yang harus bertindak. Pasalnya, sianida dan merkuri masih digunakan di pertambangan ilegal. Sianida dan merkuri juga masih dijual bebas.

Sangat berbahaya

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah I Komang Adi Sujendra sepakat orang yang beraktivitas di lokasi pertambang emas dan menggunakan

sianida serta merkuri bisa terkena dampak kronis. "Tidak hanya mereka. Dua bahan kimia itu juga bisa berdampak kepada orang-orang yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan."

Karena sianida dan merkuri merupakan bahan kimia yang persisten dan bersifat bioakumulatif dalam ekosistem, keduanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan dalam jangka panjang.

"Jika setiap hari terpapar dengan sianida atau pun merkuri orang itu pasti mengalami serangkaian gangguan kesehatan. Di antaranya bisa merusak ginjal, hati, paru-paru, dan merusak sistem pencernaan," lanjutnya.

Dampak keduanya memang tidak langsung dirasakan. Namun, sianida dan merkuri bisa mengancam kehidupan, menimbulkan kematian.

"Ancaman bahan kimia tidak boleh dianggap remeh. Sianida dan merkuri, punya karakteristik toksik atau memiliki kandungan racun yang cukup tinggi. Sianida masuk ke air tanah, sedangkan merkuri bisa tersebar melalui udara, air, tanah, dan makanan," tandas Komang Adi.

Aktivis lingkungan dan agraria Sulawesi Tengah Syahrudin Ariestal Douw juga menaruh perhatian besar terhadap daya rusak merkuri dan sianida. "Setahu saya, merkuri dan sianida digunakan oleh sejumlah kelompok penambang ilegal untuk mengurai endapat emas. Karena itu, aparat penegak hukum harus menghentikan mereka," jelasnya.

Mantan Ketua Jatam Sulteng itu menambahkan isu penambangan emas tanpa izin merebak sejak 2010. Pada awalnya, penambang rakyat melakukannya secara konvensional dengan cara mendulang.

Namun, dalam perjalanan, penambangan emas bergeser menggunakan bahan kimia. Praktik itu berjalan setelah kelompok-kelompok pemodal ikut mendanai penambangan rakyat.

"Penambangan ilegal marak karena kontrol dan penindakan dari aparat penegak hukum lemah," tandasnya. (Ant/N-2)

ANTARA /RIVAN AWAL LINGGA

PENAMBANGAN EMAS ILEGAL GUNUNG BOTAK: Areal tempat penambangan emas ilegal yang ditutup pihak keamanan setempat di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, Rabu (28/11/2018). Polres Pulau Buru menyegel sejumlah tempat penambangan ilegal yang beroperasi dengan menggunakan merkuri dan sianida di Gunung Botak.

MI/M TAUFAN SP BUSTAN

LOKASI LONGSOR: Warga bekumpul di dekat lubang pertambangan emas yang longsor dan menewaskan enam penambang di lokasi pertambangan emas ilegal Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (25/2).

Menanti Tindakan Tegas Polisi

Buranga hanya salah satu tambang liar yang dibiarkan di Sulawesi Tengah. Kegiatan eksploitasi alam tanpa izin di lokasi lain juga masih terus beroperasi dengan dukungan dana dari pengusaha.

M Taufan SP Bustan
m.taufan@mediaindonesia.com

LONGSOR di Buranga membuka fakta bahwa ada pemodal yang membiayai para penambang. Terungkap juga bahwa lokasi penambangan liar terus meluas karena tangan-tangan kuat yang membawa fulus besar.

Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah menunjuk adanya 14 alat berat jenis ekskavator di desa yang berada di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, itu. Hanya ada empat alat berat yang berada di sekitar lokasi kejadian tanah longsor. Sepuluh alat berat lainnya terlihat disiapkan untuk melakukan pembukaan kawasan baru.

"Lima ekskavator disiapkan di sebuah kebun cengkih. Jaraknya sekitar 100 meter di sisi barat dari kawasan yang longsor," ujar staf kampanye Walhi Sulawesi Tengah, Khairul Syahputra Laadjim.

Lima alat berat lainnya juga disiapkan di jarak 200 meter di sisi timur dari lokasi longsor. Walhi menyimpulkan 10 ekskavator itu merupakan bukti keterlibatan pemodal besar dalam aktivitas pertambangan ilegal di Buranga.

Walhi juga menduga pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah kabupaten tentu tahu dengan pergerakan alat berat itu. "Ada pembiaran dari aparat pemerintah. Karena itu, kami mendesak kepolisian bertindak, menertibkan tambang illegal, dan menyita alat berat," tandas Khairul.

Sudah melapor

Tidak kurang dari Gubernur Longki Djanggola juga mengaku sudah banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dengan maraknya aktivitas pertambangan ilegal. Buranga salah satunya.

"Saya sudah meneruskan semua laporan ke pihak berwajib. Tidak hanya di Buranga, tapi di lokasi lain juga," jelas pemimpin daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini.

Ia menambahkan, Pemprov Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menyurati polda, Februari lalu. Isinya terkait dengan permohonan penertiban/tindakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Buranga.

Surat itu dibuat menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Buranga. Mereka keberatan dengan adanya tambang ilegal di desanya. Surat itu dibuat sebelum tanah longsor terjadi di Buranga.

"Kami sudah berupaya supaya hal yang tidak diinginkan terjadi di Buranga. Dari lokasi kejadian, kami melihat tidak mungkin masyarakat menggali lubang seperti itu kalau tidak ada alat berat yang didanai pemodal," tegasnya.

Selain menyurati polda, Pemprov Sulawesi Tengah juga sudah berkali-kali memperingatkan warga agar tidak melakukan penambangan tanpa izin karena risikonya sangat berbahaya.

Tidak hanya di Buranga. Gubernur dua periode itu juga melihat belum ada penindakan atau penertiban di lokasi tambang ilegal lainnya. "Di beberapa daerah lainnya itu juga perlu penindakan serius aparat sehingga tidak ada korban jiwa dan kerugian negara yang terjadi," tegas Longki.

Desakan juga datang dari anggota DPRD Mohammad Hidayat Pakamundi. "Sudah ada nyawa yang terenggut karena aktivitas tambang ilegal. Kenapa dibiarkan?"

Meski kewenangan perizinan tambang ada di tangan pemerintah pusat, Hidayat meminta pemerintah daerah juga harus ikut mengawasi aktivitas tambang, terutama tambang ilegal. "Dinas pertambangan punya inspektur bidang pengawasan. Tambang harus diawasi, legal apalagi ilegal," tandasnya.

MI/M TAUFAN SP BUSTAN

TAMBANG ILEGAL: Alat berat mengeruk tanah untuk mencari emas di lokasi pertambangan emas ilegal Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (25/2). Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah menunjuk adanya 14 alat berat jenis ekskavator bersiap untuk melakukan pengerukan.

Janji tertibkan

Menjadi pihak yang diharapkan segera bergerak, Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Abdul Rakhman Baso berjanji akan menindak tegas pengusaha dan pemodal yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Buranga dan wilayah lain. "Khusus di Buranga, saat ini kami masih melakukan penyelidikan," ungkapnya.

Rakhman membenarkan dalam penyelidikan awal di lapangan ditemukan alat berat jenis ekskavator di sekitar lokasi penambangan. Ada dugaan pengusaha berperan menyediakan alat dan bahan bakar. Dia mengaku sudah beberapa kali menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Buranga. Hanya, setelah ditertibkan, tidak lama kemudian penambang beraktivitas lagi. Kebandelan itu juga terjadi di wilayah lain, di antaranya di Dongi-Dongi, Sigi.

"Dilema bagi kepolisian karena harus melakukan penindakan hukum tegas terhadap masyarakat kecil. Sementara itu, aktivitas penambangan adalah mata pencarian mereka," sebutnya.

Untuk itu, Rakhman meminta semua pemangku kepentingan bergerak bersama melakukan penyadaran, edukasi, serta sosialisasi ke masyarakat akan bahayanya melakukan penambangan ilegal. "Kami tidak akan membiarkan penambang liar terus beraksi, tapi penyadaran ke mereka juga bisa dilakukan bersama."

PAD

Di sisi lain, lembaga pengawasan publik Ombudsman Sulawesi Tengah mengajak semua pihak mengkaji diri setelah kejadian tanah longsor di Buranga. "Kepala daerah yang semakin ketat mengawasi pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya," tutur Kepala Ombudsman Sulteng Sofyan Fardi Lembah.

Ketika pengawasan terabaikan, lanjut dia, kerusakan lingkungan akan terjadi. Selain itu, seperti kejadian di Buranga, nyawa pun bertumbangan.

Menurut Sofyan, pelonggaran kebijakan atas nama investasi dan pendapatan asli daerah tidak boleh mengabaikan pengawasan terhadap pengelolaan SDA. Tidak hanya tambang, tapi juga galian C dan perkebunan kelapa sawti.

Dalam kajian Ombudsman ternyata banyaknya izin pengelolaan SDA tidak berbanding lurus dengan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. "Sulteng, misalnya, di satu sisi masuk lima besar dalam bidang investasi. Namun, ironisnya, Sulteng masih berkutat di 10 provinsi termiskin," lanjutnya.

Gubernur Sulawesi Tengah terpilih hasil Pilkada 2020, Rusdi Mastura, berjanji tidak akan membiarkan tambang ilegal beroperasi terus. "Kami akan memprioritaskan pemberantasan tambang ilegal. Saya sudah menerima banyak laporan tambang ilegal marak di Sulteng dan melibatkan tangan-tangan kuat," tegas politikus NasDem tersebut. (N-2)

MEDIA INDONESIA

FOKUS

CUSTOMER SERVICE:
(021) 5821303
PEMASANGAN IKLAN:
(021) 5812113 / 5801480

RABU, 10 MARET 2021

HALAMAN A4

Tambang Ilegal di Sulawesi Tengah kian Marak

Masyarakat Sulawesi Tengah, salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi, menggantungkan perekonomian mereka pada sektor pertanian. Namun, perkembangan tambang ilegal di Sulawesi Tengah menyebabkan banyak warga menekuni profesi sebagai penambang ilegal. Besarnya penghasilan yang didapat dari pertambangan ilegal menjadi pangkalnya. Hal itu tentunya menimbulkan banyak masalah terutama karena beberapa tambang berlokasi di Taman Nasional Lore Lindu. Selain mengancam ekosistem, tambang ilegal itu berbahaya bagi masyarakat di sekitar tambang. Kejadian longsor baru-baru ini di wilayah tambang ilegal Desa Buranga menjadi contoh bahaya tambang ilegal serta pentingnya pemerintah menertibkan lokasi tambang ilegal yang ada.

Mengenal Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)

- Memiliki luas 217.991 hektare (ha).
- Terletak di bagian selatan Kabupaten Donggala dan bagian barat Kabupaten Poso.
- Memiliki flora dan fauna endemik Sulawaesi.

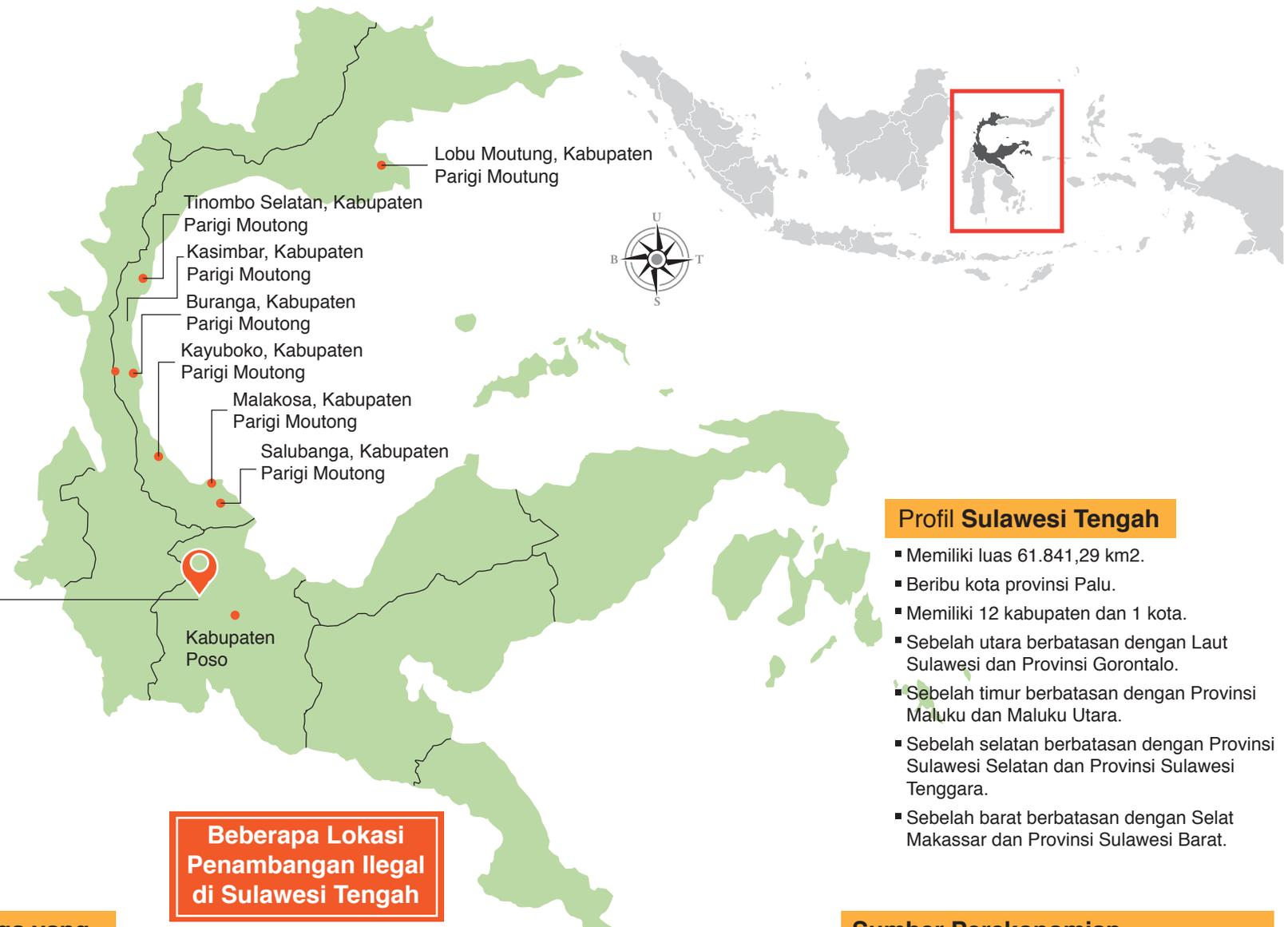

Beberapa Lokasi Penambangan Ilegal di Sulawesi Tengah

Profil Sulawesi Tengah

- Memiliki luas 61.841,29 km2.
- Beribu kota provinsi Palu.
- Memiliki 12 kabupaten dan 1 kota.
- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Bencana pada Tambang Emas Ilegal Desa Buranga yang Terletak pada Taman Nasional Lore Lindu

- Terjadi pada 24 Februari 2021.
- Menyebabkan 6 orang meninggal dunia.
- Sebanyak 16 penduduk mengalami luka ringan.
- Sebanyak 4 orang lainnya mengalami luka berat.
- Disebabkan longsor secara mendadak pada lubang tambang.

Sumber Perekonomian Sulawesi Tengah

- Sebagian besar mengandalkan sektor pertanian.
- Perdagangan.
- Perikanan.
- Pertambangan.

Beberapa Asal Wilayah Penambang di Luar Sulawesi Tengah

- Gorontalo
- Jawa
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara

Bahaya yang Ditimbulkan dari Tambang Ilegal

- Merugikan negara.
- Merusak lingkungan.
  - Menggunakan sianida dan merkuri untuk mengolah emas.
  - Seluas 1.700 ha sawah di Kabupaten Moutong mengalami gagal panen.
  - Lumpur memasuki persawahan warga.
  - Melakukan penggundulan lahan hijau.
- Merusak infratruktur daerah.
  - Jembatan putus di Desa Galumpang akibat galian tambang.
- Banyak menelan korban jiwa.

Respons Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Penambang Ilegal

- Menerima laporan terkait dengan tambang ilegal dari masyarakat.
- Meminta pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu untuk segera melakukan langkah konkret.
- Menutup lokasi tambang ilegal dan melakukan penghijauan.
- Mengubah satatus tambang ilegal menjadi wilayah pertambangan rakyat.
- Memprioritaskan pemberantasan pertambangan tanpa izin.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penertiban dan Pengawasan Tambang Ilegal

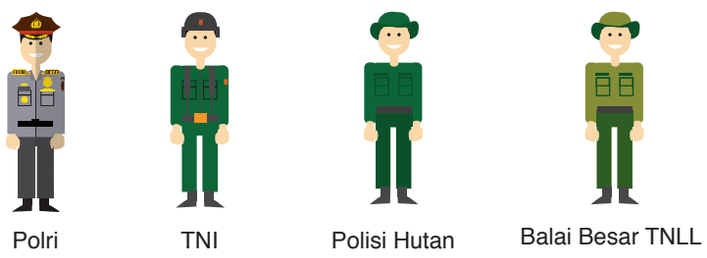

Permasalahan Tambang Ilegal di Sulawesi Tengah

- Mulai bermunculan sejak 2009 di Poboya.
- Meluas ke berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
- Diduga didanai pengusaha lokal dan oknum-oknum penegak hukum.
- Sudah terjadi lama dan tidak memiliki izin.
- Setiap tahun menelan korban jiwa dua sampai tiga orang.
- Penegakan hukum pada pelaku tambang ilegal lemah.
- Dianggap menguntungkan bagi masyarakat sekitar.

Alasan Warga masih Melakukan Penambangan Ilegal

- Dianggap menguntungkan secara ekonomi.
- Potensi penghasilan mencapai Rp700 ribu per gram emas yang didapatkan.
- Potensi penghasilan dari tambang dianggap lebih menguntungkan daripada berjualan.

Hukuman Penambangan Ilegal

- **UU Nomor 4 Tahun 2009** menyebutkan semua aktivitas penambangan harus memiliki izin.
- Menambang tanpa izin akan diancam dengan **kurungan penjara paling lama 10 tahun** dan **denda maksimal Rp10 miliar**.

WALHI

Pandangan Walhi mengenai Tambang Ilegal di Sulawesi Tengah

- Sudah sering terjadi dari tiga sampai empat bulan terakhir.
- Ditemukan 14 alat berat jenis ekskavator.
- Diduga melibatkan pemodal yang mendatangkan alat berat.
- Menurut Walhi, longsor disebabkan penggalian tambang secara ilegal.

Upaya Komnas HAM Terkait dengan Kondisi Tambang Ilegal di Sulawesi Tengah

- Meminta gubernur dan jajarannya melakukan pengawasan ketat terhadap lokasi tambang ilegal di Sulawesi Tengah.
- Melakukan penertiban secara tegas pada lokasi tambang-tambang ilegal.
- Meminta pihak-pihak di belakang tambang ilegal ditindak tegas.

Sumber: Pemprov Sulawesi Tengah/Komnas HAM/Walhi/Antara/Litbang MI